

**STUDI KEBIJAKAN KAWASAN ANDALAN**

**DI PROVINSI JAWA TIMUR**

C. 50/08

Sar  
S

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**



**DIAJUKAN OLEH**

**NURVI RAHMA DWI SARTIKA**

**No. Pukok : 046317984**

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**KEPADA**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2007**

**SKRIPSI**

**STUDI KEBIJAKAN KAWASAN ANDALAN  
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

**DIAJUKAN OLEH  
NURVI RAHMA DWI SARTIKA  
No. Pokok : 040317984**

**TELAH DIAJUKAN DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :**

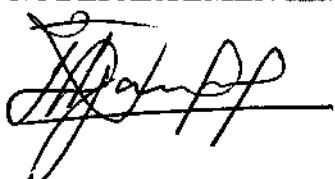
**DOSEN PEMBIMBING,**



**Prof. Dr. DJOKO MURSINTO, Drs., Ec., MSc.**

**TANGGAL ...../...../.....** *15/-2008*

**KETUA DEPARTEMEN ILMU EKONOMI**



**Drs. Ec. TRI HARYANTO, MP.**

**TANGGAL ...../...../.....** *22/2/2008*

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rakhmat dan karuniaNya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu Departemen Ilmu Ekonomi Konsentrasi Perencanaan Universitas Airlangga.

Secara khusus saya ucapan terimakasih dan penghargaan yang sangat mendalam terhadap kedua orang tuaku, ayahku Dr. H. Abdur Rivai, M.Kes. MBA, Terima kasih ayah atas dorongan semangat yang tiada henti-hentinya, pengorbanan, bantuanmu saat aku memperlukan dan maafkan karena aku terlambat menyelesaikan skripsiku. Ibuku yang paling aku sayangi, SRI NURUL HASANAH, SPd terima kasih atas doa-doamu yang tiada henti, kasih sayangmu yang tulus kepadaku, dan sikap pantang menyerahmu yang membuatku tetap bisa bangkit dan berjalan maju.

Terima kasih dan penghargaan, saya ucapan kepada Prof. Dr. DJOKO MURSINTO, Drs., Ec., Mec. selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan, pengarahan, kritik, dan saran, mulai dari persiapan praproposal sampai dengan akhir penulisan skripsi.

Demikian pula Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Ec. Tri Haryanto, MP., selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga atas bimbungannya selama mengikuti pendidikan.
2. Kepada Kakakku tersayang Nurvi Rahmani Utami Putri, terima kasih atas dorongan semangatmu selama masa-masa aku menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Sahabat terbaikku Dian Puspa Astarini, “*Ada orang yang masuk ke dalam hidup kita dan berlalu dengan cepat. Ada yang tinggal beberapa lama dan meninggalkan jejak dalam hati kita. Dan diri kita pun tak akan pernah sama seperti sebelumnya.*” Keputusanku menyapamu untuk pertama kali di ruang 2 saat kita ada dikelas pengantar bisnis adalah keputusan terbaik selama hidupku. Terima kasih kamu telah mengisi hari-hariku!!!

4. Kepada Sahabat terbaikku Ermatry Hariani, “*Bersahabat dekat dengan seseorang itu membutuhkan banyak pengertian, waktu, dan rasa percaya. Dengan hidup yang penuh dengan ketidakpastian sahabat adalah hartaku yang paling berharga.*” Terima kasih atas pengertian dan waktumu untuk mendengarkanku. Aku tahu aku orang yang meledak-ledak, dan perlu telinga ekstra untuk menanggapinya. Dengan bersamamu menjadikanku sosok yang lebih tenang.
5. Kepada Sahabat terbaikku Swasti Pranawardani, “*Yang paling penting dalam hidup ini adalah cara kita memperlakukan satu sama lain dan kalau kau ingin dicintai, cintailah orang lain*”. Selama aku melewati hari-hari bersamamu, kebaikan hatimu selalu memberiku inspirasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih telah menjadikan hidupku lebih ceria.
6. Kepada Sahabat terbaikku Rizki Sabela dan Nurinnajiah Tsani, terima kasih atas kehadiran dan doa-doa kalian yang membuat hidupku menjadi lebih mudah dan penuh dengan keceriaan.
7. Kepada Teman-temanku, A. Fahrizal Lathif, Muhammad Taufik, Miftahul Bururi, David Nurcahyo. Terima kasih kalian telah hadir dalam hidupku dan memberi kenangan tersendiri didalamnya.
8. Seluruh teman-teman seminar konsentrasi perencanaan semester 7 tahun 2007. Terima kasih atas pengalaman hidup yang sangat berkesan saat itu.
9. Seluruh teman-teman jurusan ilmu ekonomi angkatan 2003, terima kasih atas sikap saling membantu sehingga tercipta kerjasama yang erat dalam mengikuti pendidikan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala amal baik tersebut dan dengan adanya keterbatasan yang ada, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

## KATA PENGANTAR

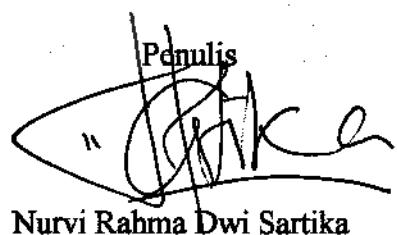
Segala puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas berkat rakhmat-Nya skripsi dengan judul Studi Kebijakan Kawasan Andalan di Provinsi Jawa Timur dapat terselesaikan.

Dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya maka skripsi ini dibuat.

Di dalam skripsi ini diuraikan tentang kebijakan kawasan andalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selain itu digunakan untuk melihat ketepatan penetapan kebijakan kawasan andalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient*, Indeks Spesialisasi Regional, dan *Binary Logistic*.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala amal baik tersebut.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacanya. Wassalam.

  
Penulis  
Nurvi Rahma Dwi Sartika

## ABSTRAK

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota dengan kondisi geografis yang beragam mendorong tiap kabupaten/kota memiliki kemampuan yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan yang otonom. Perbedaan kemampuan tersebut mendorong timbulnya kesenjangan antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Kesenjangan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, mendorong Pemerintah menetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Provinsi tentang kawasan andalan untuk mengurangi kesenjangan di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kebijakan kawasan andalan dan ketepatan penetapan kawasan andalan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian diskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumenter. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu atau *time series* selama kurun waktu tahun 1996 sampai dengan tahun 2005, pada 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, *Location Quotient* atau Kuosien Lokasi, Indeks Spesialisasi Regional, dan Model logit atau *Binary Logistic Regression*.

Hasil penelitian adalah (1). Hasil Tipologi Klassen menunjukkan yang tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah 6 kabupaten/kota, 1 kota yang tergolong daerah maju tapi tertekan, 15 kabupaten/kota yang tergolong daerah cepat berkembang, dan 16 kabupaten yang tergolong daerah relatif tertinggal (2). *Location Quotient* menunjukkan semua kabupaten/kota memiliki sektor unggulan yang berbeda satu sama lain. Akan tapi tidak ada kabupaten ataupun kota yang kesembilan sektornya merupakan sektor unggulan, akan ada satu atau lebih sektor yang bukan merupakan sektor unggulan (3). Hasil perhitungan indeks spesialisasi menunjukkan adanya kenaikan nilai rata-rata indeks spesialisasi kabupaten/kota sektor atas dasar lapangan usaha sebesar 0,57, yaitu dari (0,03) pada tahun 2001 menjadi 0,60 pada tahun 2005. Kenaikan nilai rata-rata indeks spesialisasi tersebut didorong oleh terjadinya kenaikan nilai rata-rata pada beberapa kabupaten/kota walaupun dibeberapa kabupaten/kota terjadi penurunan (4). Berdasarkan hasil uji *Binary Logistic Regression* tidak terjadi perubahan jumlah kawasan andalan. Kawasan andalan tetap terdiri dari 23 kabupaten/kota dan 15 kabupaten/kota kawasan bukan andalan, tetapi terjadi perubahan susunan kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan andalan dan yang masuk dalam kawasan bukan andalan. Kemampuan prediksi dari model yang digunakan cukup bagus di mana tingkat sukses total sebesar 63,20% dengan 69,60% kawasan andalan dan 53,30% kawasan bukan andalan mampu diprediksi secara benar

Kata Kunci : Kesenjangan, Kawasan Andalan, Tipologi Klassen, *Location Quotient*, Indeks Spesialisasi Regional, *Binary Logistic Regression*.

## ABSTRACT

East Java Province has 38 residence and cities which have various geographical condition, It is stimulating every each city has different capability in running autonomous government, so it stimulate the gap between every each city in East Java Province. The gap improvement in year to year is stimulate the government in making the program of province layout policy, it is including the main area to decrease gap in East Java Province.

The purpose of this research is describe the main area policy and the accuracy of main area establishment. The approaching of this research is descriptive research. The technique of collecting data with documenter metode. This research is using sekunder data which has time series among 1996 until 2005 in 38 residence and cities in East Java Province. The technique of analysis is Tipology Klassen, Location Quotient, Regional Specialization and Binary Logistic Regression.

This research is : (1). Tipology Klassen research showing that the advance and movement area is 6 residence or cities, 1 cities are rapid are but suppressed, the growing area are 15 residence or cities, and 16 residence is backward district (2). Based on Location Quotient, every residence or cities have another different main sector but it is not any residence or 9 sector residence or cities are main sector (3). The Specialization Index calculation result showing the increasing of specialization index average value based on industry business is 0,57 in 2001 is (0,03) become 0,60 in 2005. The increasing specialization index that average value was stimulated by the increasing average value in several residence or cities although it is decreasing (4). Based on Binary Logistic Regression test result, there is any transmutation the main are still 23 residence or cities and 15 residence or cities is hot transmutation of residence or cities, structure into the main area or not. The prediction capability of using model is quite great , in this case the total success is 63,20% with 69,60% main area and it is fact predict that 53,30% is not main area.

**Keyword :** Differences, Main Area, Tipology Klassen, Location Quotient, Regional Specialization Index, Binary Logistic Regression.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Ucapan Terima Kasih .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Grafik .....	xiv
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB 2 : TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
2.1. Landasan Teori .....	12
2.1.1. Konsep tentang Perencanaan .....	12
2.1.2. Teori Kutub Pertumbuhan ( <i>Growth Pole</i> ) .....	16
2.1.3. Konsep tentang Perwilayahkan .....	17
2.1.3.1. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) .....	20
2.1.3.2. Kawasan Andalan .....	22
2.1.4. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW .....	25
2.1.5. Analisis Potensi Relatif Perekonomian Wilayah .....	27
2.1.5.1. Analisis Tipologi Klassen .....	27

2.1.5.2. Teori Basis .....	29
2.1.5.3. <i>Location Quotient</i> atau Kuosien Lokasi .....	29
2.1.5.4. Indeks Spesialisasi (SI) Regional .....	31
2.2. Penelitian Sebelumnya .....	32
2.3. Model Analisis .....	32
<b>BAB 3 : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	33
3.2. Identifikasi Variabel .....	33
3.3. Definisi Operasional .....	33
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4. Prosedur Pengumpulan Data .....	36
3.5. Teknik Analisis .....	37
3.5.1. Tipologi Klassen .....	37
3.5.2. Kuosien Lokasi atau <i>Location Quotient (LQ)</i> .....	38
3.5.3. Indeks Spesialisasi (SI) Regional .....	39
3.5.4. <i>Binary Logistic Regression</i> .....	39
<b>BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1. Gambaran Umum .....	40
4.1.1. Deskripsi Wilayah .....	40
4.1.2. Kondisi Penduduk Jawa Timur .....	44
4.1.3. Pertumbuhan PDRB Jawa Timur .....	45
4.2. Hasil Penelitian .....	46
4.2.1. Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur .....	46
4.2.2. Sektor Ekonomi Unggulan Yang Potensial Untuk Dikembangkan .....	48
4.2.3. Spesialisasi Antardaerah di Kawasan Andalan, Antar -daerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan, maupun Antar Kawasan Bukan Andalan .....	50

<b>4.2.4. Ketepatan penetapan kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur .....</b>	<b>52</b>
<b>4.3. Pembahasan .....</b>	<b>57</b>
<b>4.3.1. Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur .....</b>	<b>57</b>
<b>4.3.2. Sektor Ekonomi Unggulan Yang Potensial Untuk Dikembangkan .....</b>	<b>60</b>
<b>4.3.3. Spesialisasi Antardaerah di Kawasan Andalan, Antar -daerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan, maupun Antar Kawasan Bukan Andalan .....</b>	<b>64</b>
<b>4.3.3.1. Spesialisasi Antardaerah di Kawasan Andalan.</b>	<b>64</b>
<b>4.3.3.2. Spesialisasi Antardaerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan .....</b>	<b>68</b>
<b>4.3.3.3. Spesialisasi Antardaerah Kawasan Bukan Andalan .....</b>	<b>72</b>
<b>4.3.4. Ketepatan penetapan kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur .....</b>	<b>75</b>
<b>BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
<b>5.1. Simpulan .....</b>	<b>78</b>
<b>5.2. Saran .....</b>	<b>80</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>82</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Indonesia Tahun 2001-2005 .....	1
Tabel 2.1 Rumus Analisis Tipologi Daerah .....	28
Tabel 4.1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Di Jawa Timur Tahun 2001 - 2005 (jutaan rupiah) .....	45
Tabel 4.2. Posisi Perekonomian Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Tipologi Daerah .....	47
Tabel 4.3. LQ Rata-Rata Atas Dasar Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Dari Tahun 1996-2005 .....	49
Tabel 4.4. Indeks Spesialisasi Regional Rata-Rata Atas Dasar Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2001 dan Tahun 2005 .....	51
Tabel 4.5 Uji Kecocokan Model Kawasan Andalan dan Kawasan Bukan Andalan .....	55
Tabel 4.6 Klasifikasi Kemampuan Prediksi Variabel Bebas Terhadap Kawasan Andalan dan Kawasan Bukan Andalan Provinsi Jawa Timur .....	55
Tabel 4.7 Persamaan Variabel, Koefisien Regresi, <i>Standard Error</i> , Statistik Wald, dan <i>Odds Ratio</i> .....	56
Tabel 4.8 Tipologi Klassen Kawasan Andalan Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005 .....	57
Tabel 4.9 Tipologi Klassen Kawasan Bukan Andalan Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005 .....	59
Tabel 4.10 LQ Rata-Rata Atas Dasar Lapangan Usaha Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005 .....	61
Tabel 4.11 LQ Rata-Rata Atas Dasar Lapangan Usaha Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005 .....	63

Tabel 4.12 Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 .....	65
Tabel 4.13 Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 .....	66
Tabel 4.14 Perubahan Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2001 ke Tahun 2005 .....	67
Tabel 4.15 Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 1996 .....	69
Tabel 4.16 Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 .....	70
Tabel 4.17 Perubahan Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2001 ke Tahun 2005 .....	71
Tabel 4.18 Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 1996 .....	73
Tabel 4.19 Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 .....	74
Tabel 4.20 Perubahan Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2001 ke Tahun 2005 .....	74
Tabel 4.21 Klasifikasi Kemampuan Prediksi Variabel Bebas Terhadap Kawasan Andalan dan Kawasan Bukan Andalan Provinsi Jawa Timur .....	76
Tabel 4.22 Kabupaten dan Kota yang Berubah dari Kawasan Andalan ke Kawasan Bukan Andalan dan Kabupaten dan Kota yang Berubah dari Kawasan Bukan Andalan ke Kawasan Andalan .....	76

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. PDRB Per Kapita Di Indonesia Tahun 1994-2003 .....	3
Grafik 1.2. PDRB Per Kapita Di Jawa Timur Tahun 2001-2004 .....	8



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pendekatan Sektor, Spasial dan Berorientasi Masalah Mendasar .... 14



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	Peta Kawasan Pengembangan Utama Provinsi Jawa Timur ...	84
Lampiran 2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2001 (jutaan rupiah) ....	85
Lampiran 3	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2002 (jutaan rupiah) ....	86
Lampiran 4	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2003 (jutaan rupiah) ....	87
Lampiran 5	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2004 (jutaan rupiah) ....	88
Lampiran 6	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2005 (jutaan rupiah) ....	89
Lampiran 7	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005 .....	90
Lampiran 8	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005 (jutaan rupiah) .....	91
Lampiran 9	Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005 (jutaan rupiah) .....	92
Lampiran 10	Tipologi Klassen Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005 ....	93
Lampiran 11	LQ Rata-rata Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Tahun 1996-2005 .....	94
Lampiran 12	Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2001 .....	95
Lampiran 13	Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005 .....	96
Lampiran 14	Data Logit dan Logistik .....	97

Lampiran 15 *Binary Logistic Regression* ..... 98



**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Irawan dan Suparmoko, 2002 : 5). Peningkatan Pendapatan Nasional Bruto atau PNB rill yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Meningkatnya pendapatan per kapita rill atau pendapatan per kapita atas dasar harga konstan pada suatu tahun tertentu merupakan salah satu ukuran kemajuan perekonomian suatu negara (Kamaludin, 1999 : 39).

Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita di Indonesia antara tahun 2001-2005 selalu meningkat, seperti tercantum pada Tabel 1.1. sebagai berikut:

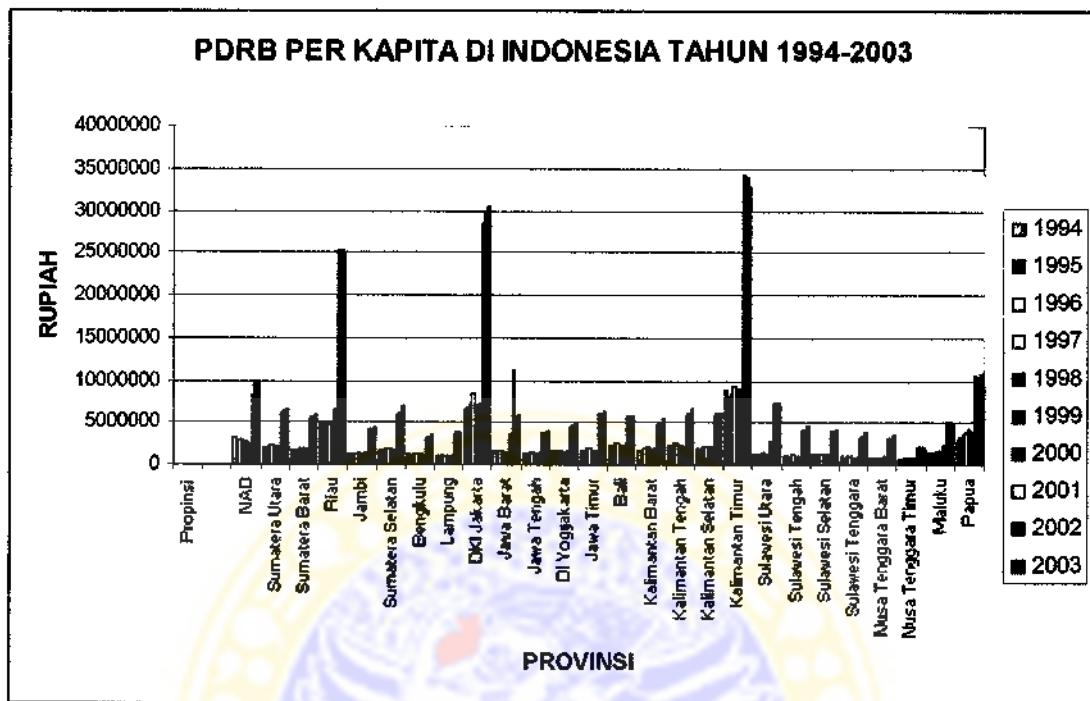
**Tabel 1.1 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2005 (dalam miliar rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Per Kapita Indonesia Atas Dasar Harga Kontan Tahun 2000</b>	<b>Selisih</b>	<b>Keterangan</b>
2001	6.922.888	-	-
2002	7.135.900	213.012	Naik
2003	7.390.707	254.807	Naik
2004	7.674.106	283.399	Naik
2005	8.012.151	338.045	Naik

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia tahun 2001-2005

Meningkatnya pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata per penduduk belum mencerminkan terdistribusinya secara merata pendapatan nasional dalam masyarakat. Ada sebagian kecil masyarakat yang memperoleh keuntungan besar dari hasil pembangunan, namun ada sebagian besar masyarakat yang tidak atau hampir tidak merasakan peningkatan kesejahteraan (Kamaludin, 1999 : 39). Ketidakmerataan pendistribusian pendapatan nasional kepada masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan PDRB per kapita yang dimiliki oleh tiap provinsi di Indonesia, menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar wilayah.

Kesenjangan antar wilayah akibat perbedaan PDRB per kapita di Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Penyebab kesenjangan tersebut adalah tingginya PDRB per kapita yang dimiliki oleh Provinsi Riau, Provinsi Daerah Khusus Ibukota atau DKI Jakarta, dan Provinsi Kalimantan Timur, yang semuanya berada di Kawasan Barat Indonesia atau KBI. Hal tersebut yang menjadi penyebab semakin tingginya kesenjangan antara KBI yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan dengan Kawasan Timur Indonesia ataau KTI yang terdiri dari Pulau Sulawesi, Maluku, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Sedangkan kondisi di provinsi yang lain cenderung tidak jauh berbeda satu sama lain. Adapun PDRB per kapita di Indonesia seperti tersebut pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Stitistik Indonesia Tahun 1996-2005 (data diolah)

Grafik 1.1. PDRB Per Kapita Di Indonesia Tahun 1994-2003

Untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah, perlu diambil langkah-langkah guna menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan yang selama ini diterapkan di Indonesia. Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua atau REPELITA II pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1978 pemerintah telah menerapkan konsep kutub pertumbuhan dengan melakukan pengelompokan Wilayah Pengembangan atau WP, yang membagi Indonesia dalam empat Wilayah Pengembangan Utama atau WPU. Ke empat WPU tersebut adalah (1). WPU A yang terdiri dari Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumetera Barat dan Riau dengan Medan sebagai pusat pengembangan; (2). WPU B terdiri dari Propinsi Jambi, Sumetera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah

Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Barat, dengan Jakarta sebagai pusat pengembangan; (3). WPU C terdiri dari Propinsi Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dengan Surabaya sebagai pusat pengembangan; (4) WPU D terdiri dari Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua dengan Makasar sebagai pusat pengembangan. Masing-masing pusat pengembangan dari WPU diharapkan akan menjadi motor penggerak kegiatan pembangunan pada wilayah bersangkutan. Pembagian empat WPU tersebut masih dilanjutkan hingga Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga atau REPELITA III pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1983 (Kamaluddin dalam Nuryasman, 1996 : 240).

Perubahan WPU terjadi pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat atau REPELITA IV pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1988, yang semula terdiri dari empat WPU berubah menjadi enam WPU. Perubahan ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan untuk masing-masing wilayah dapat ditentukan secara lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan potensi pembangunan yang terdapat pada masing-masing wilayah (Nuryasman, 1996 : 240).

Konsep kutub pertumbuhan yang pada awalnya diciptakan untuk dapat memperbaiki kesenjangan, ternyata belum dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan. Jika awalnya terdapat perubahan yang signifikan di beberapa daerah, tetapi pada akhirnya pertumbuhan tidak berlanjut dan kutub pertumbuhan tidak dapat

menjalankan fungsinya sebagai kutub pertumbuhan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal disekitarnya (Hadi, 2006 : 1).

Kegagalan tersebut diakibatkan karena kutub-kutub pertumbuhan dibangun tidak dipersiapkan untuk memiliki daya saing wilayah yang kompetitif, dan pusat pertumbuhan dibangun tidak berbasis kepada potensi unggulan lokal atau *local core competencies*. Konsekuensi logis dari pembangunan di era globalisasi adalah berhadapannya seluruh daerah di wilayah nasional secara langsung dengan tingkat persaingan yang semakin tajam, di pasar domestik maupun di pasar internasional (Hadi, 2006 : 1).

Sebagai langkah awal penyempurnaan perencanaan pembangunan sejak tahun 2004 pemerintah melakukan perubahan sebutan untuk perencanaan pembangunan nasional dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima atau REPELITA menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Dalam RPJMN bagian IV agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran kedua tercantum tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan jalan meningkatkan peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di pedesaan, meningkatkan pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal, meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antarkota metropolitan, kota besar, kota

menengah, dan kota kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah (Perpres No 7 Tahun 2005).

Sebagai wujud nyata dari penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN adalah penetapan konsep kawasan andalan. Konsep kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah yang memiliki karakteristik sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan dengan daerah lain dalam suatu provinsi, memiliki sektor unggulan dan memiliki keterikatan ekonomi dengan daerah sekitar atau *hinterland* (Royat dalam Kuncoro, 2004).

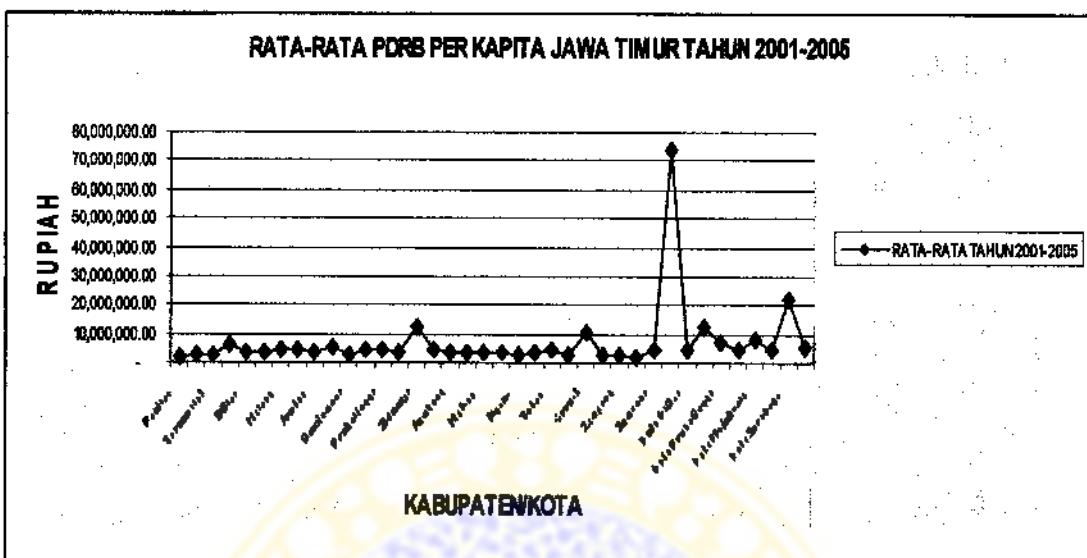
Kesenjangan antar wilayah diharapkan dapat dikurangi dengan berkembangnya wilayah-wilayah strategis, cepat tumbuh, sekaligus bersama-sama dengan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Wilayah strategis dan cepat tumbuh dibangun dengan memperhatikan keterkaitan hulu hilirnya dengan wilayah-wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan, baik melalui kawasan andalan yang strategis seperti Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau KAPET ataupun kutub-kutub pertumbuhan seperti BATAM dan Kawasan Sabang maupun melalui kawasan cepat tumbuh yang ditunjukkan antara lain melalui kawasan transmigrasi (Perpres No 7 Tahun 2005).

Pembangunan kawasan cepat tumbuh maupun kawasan andalan lainnya masih belum terasa optimal karena pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat pemerintah daerah masih berbasis pada pendekatan sektor unggulan namun

belum ada keterkaitan antara kawasan maupun antara kawasan-kawasan tersebut dalam skenario keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan kawasan tertinggal atau perbatasan (Perpres No. 7 Tahun 2005).

Konsep pengembangan kawasan andalan secara nasional masih terhambat pada belum disepakatinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Upaya pengembangan wilayah berdasarkan konsep kawasan andalan juga dihadapkan pada berbagai kendala dalam pengembangan ekonomi intra dan antardaerah, terutama dalam kerangka keterkaitan antara pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal. Hal tersebut banyak disebabkan oleh adanya kebijakan yang kurang mendukung dan tumpang tindih, akibatnya iklim usaha dan aliran investasi menjadi terhambat. Selain itu, masalah keamanan, jaminan kepastian berusaha, maupun kebijakan retribusi dan perijinan menjadi beban berat yang harus ditanggung para investor (Hadi, 2006 : 2) .

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak, berjumlah 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, juga mengalami masalah kesenjangan dalam perekonomiannya. Adapun rata-rata PDRB per kapita tahun 2001-2005 antar 38 kabupaten/kota di Jawa Timur seperti tercantum pada Gambar 1.2 sebagai berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur Dalam Angka 2001-2005 (data diolah)

Grafik 1.2. Rata-Rata PDRB Per Kapita Di Jawa Timur Tahun 2001-2005

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya merupakan kabupaten dan kota yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu diatas Rp. 6,886,575.70. Walaupun hanya terdapat tujuh kabupaten/kota yang memiliki rata-rata PDRB per kapita diatas rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Timur, tetapi menimbulkan kesenjangan di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (1), "Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional". Oleh sebab itu perencanaan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu sejalan dengan perencanaan nasional.

Untuk menanggulangi kesenjangan Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan kawasan andalan yang telah disesuaikan agar cocok dengan kondisi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kawasan andalan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang penentuannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kawasan andalan Provinsi Jawa Timur terdiri dari, (1). Gerbangkertosusila, yang terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan (2). Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu (3). Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung (4). Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan (5). Kabupaten Banyuwangi (6). Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember (7). Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro. Untuk memberikan gambaran mengenai letak kawasan andalan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kaitannya dengan uraian sebelumnya sebagai upaya untuk melihat apakah kebijakan penetapan kawasan andalan oleh pemerintah Jawa Timur telah sesuai dengan konsep kutub pertumbuhan. Karena walaupun kebijakan kawasan andalan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur secara konseptual efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mengentaskan ketertinggalan pembangunan, tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya menyimpang dari yang diinginkan oleh perancang kebijaksanaan, sehingga kebijakan yang ditetapkan hanyalah sebagai simbol kepedulian terhadap realitas keterbelakangan kabupaten/kota yang ada di Jawa

Timur (Kuncoro, 2004 : 222). Berdasarkan uraian sebelumnya maka judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah **STUDI KEBIJAKAN KAWASAN ANDALAN DI PROVINSI JAWA TIMUR**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana posisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang diukur melalui perbandingan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita kabupaten/kota terhadap Provinsi Jawa Timur?
2. Apa yang termasuk sektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana spesialisasi antardaerah di kawasan andalan, antardaerah kawasan andalan dengan bukan kawasan andalan, maupun antar kawasan bukan andalan?
4. Bagaimana ketepatan penetapan kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur, dilihat dari kriteria persyaratannya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

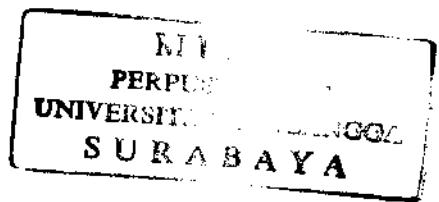
1. Mengetahui bagaimana posisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang diukur melalui perbandingan tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita kabupaten/kota terhadap Provinsi Jawa Timur ?

2. Mengidentifikasi subsektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ?
3. Mengetahui spesialisasi antardaerah di kawasan andalan, antardaerah kawasan andalan dengan bukan kawasan andalan, maupun antar kawasan bukan andalan ?
4. Mengetahui bagaimana ketepatan penetapan kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur, dilihat dari kriteria persyaratannya ?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini adalah :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk dapat menyusun perencanaan regional yang efektif agar dapat meningkatkan perekonomian di Jawa Timur.
2. Bagi peneliti merupakan media belajar dalam menetapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan dan merangsang untuk melakukan penelitian di kemudian hari.
3. Bagi peneliti lain dapat dipakai sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

**BAB 2****TINJAUAN KEPUSTAKAAN****2.1. Landasan Teori**

Dalam rangka menganalisis permasalahan dalam penelitian, diperlukan suatu perangkat analisis. Perangkat analisis tersebut harus didasarkan pada suatu teori. Menurut kamus bahasa Indonesia, teori didefinisikan sebagai suatu pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian (Poerwadarminta, 1985 : 1054). Teori tersebut yang akan dipakai sebagai dasar analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut dalam skripsi ini akan dipaparkan beberapa teori yang diharapkan dapat menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

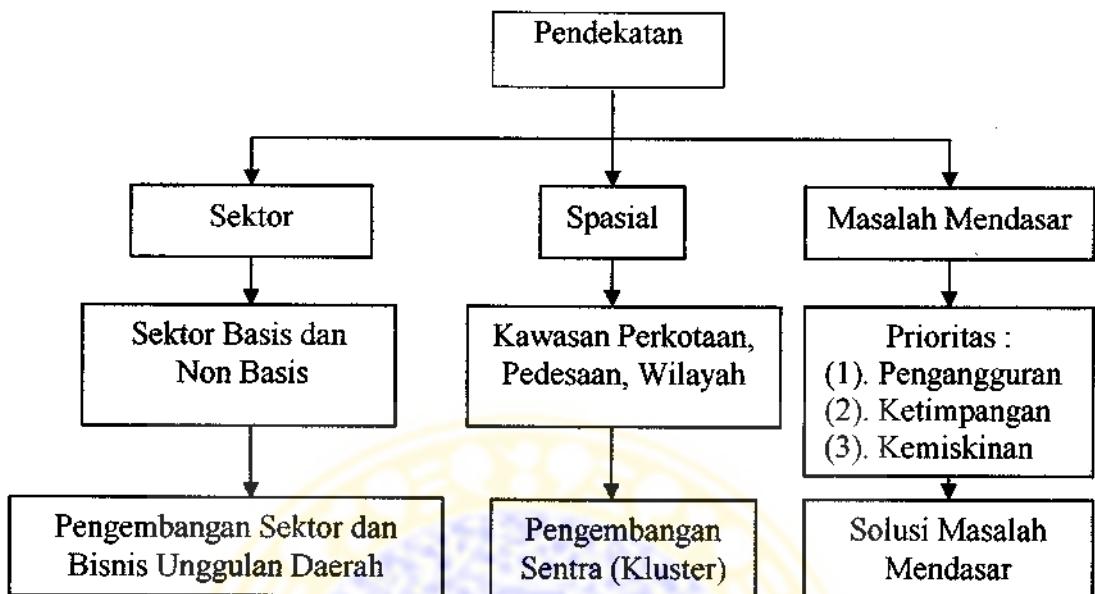
**2.1.1. Konsep tentang Perencanaan**

Pengertian perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yakni (1). merencanakan berarti memilih, (2). perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya, (3). perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, (4). perencanaan untuk masa depan (Conyers dan Hills dalam Arsyad, 1999 : 19-20). Sementara menurut Friedman, perencanaan adalah cara berpikir mengatasi

permasalahan ekonomi sosial dan ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan, sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program (Friedman dalam Tarigan, 2005a : 4).

Berdasarkan kedua definisi perencanaan di atas maka perencanaan dapat dibagi atas dua versi, yaitu satu versi melihat perencanaan adalah suatu teknik atau profesi yang membutuhkan keahlian, sementara versi yang lain melihat perencanaan atau pembangunan sebagai tindakan kolektif yang harus melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Tarigan, 2005a : 5). Dalam penulisan skripsi ini penulis cenderung menerapkan versi yang pertama, karena perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan perencana dan pembangunan daerah yang dilanjutkan dengan meminta persetujuan dari masyarakat melalui Dewan Perwakilaan Rakyat atau DPR ataupun Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah atau DPRD. Jika perencanaan melibatkan masyarakat dalam seluruh proses perencanaan, penyusunan perencanaan akan sulit diselesaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan, padahal agar berdaya guna perencanaan perlu diselesaikan tepat waktu.

Dalam perencanaan ekonomi diperlukan rencana strategik terpadu pengembangan ekonomi dan bisnis daerah yang menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan sektoral, berdimensi spasial, dan berorientasi mendasar. Adapun 3 pendekatan tersebut seperti tercantum pada Gambar 2.1 berikut ini :



Sumber : Mudrajad dalam Widodo, 2006 : 42

Gambar 2.1. Pendekatan Sektor, Spasial dan Berorientasi Masalah Mendasar

Definisi perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *non-controllable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan (Tarigan, 2005a : 4). Berdasarkan definisi perencanaan wilayah maka langkah-langkah untuk melaksanakan perencanaan wilayah di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini

dan permasalahan yang dihadapi, diperlukan kegiatan pengumpulan data sekunder maupun data primer.

2. Tetapkan visi, misi, dan tujuan umum. Visi, misi, dan tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan bersama sejak awal.
3. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.
4. Proyeksikan berbagai variabel yang terkait, yang bersifat *controllable* atau dapat dikendalikan maupun *non-controllable* atau di luar jangkauan pengendalian pihak perencana.
5. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yakni berupa tujuan yang dapat diukur.
6. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia.
7. Memilih alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan.
8. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah-langkah tersebut bisa lebih sederhana jika permasalahannya lebih sederhana. Akan tetapi, bagi perencanaan yang cukup luas, langkah-langkah di atas merupakan langkah-langkah utama, artinya, setiap langkah bisa terdiri atas berbagai

tindakan kegiatan sehingga merupakan suatu perencanaan tersendiri. Demikian pula urutannya dapat dibolak-balik (Tarigan, 2005a : 7-8).

### 2.1.2. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Perkembangan modern dari teori kutub pertumbuhan, terutama berasal dari karya ahli-ahli teori ekonomi regional Perancis, terutama Francois Perroux. Perroux telah mengembangkan konsep kutub pertumbuhan atau *pole de croissance* atau *pole de developpment* yang dicetuskan oleh Boudeville. Perroux telah mendefinisikan kutub pertumbuhan regional sebagai seperangkat industri-industri sedang mengembang yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah pengaruhnya (Richardson, 2001 : 98). Analisis kutub pertumbuhan mengandung hipotesis bahwa pendapatan di daerah pertumbuhan sebagai keseluruhan akan mencapai maksimum apabila pembangunan dikonsentrasi pada kutub pertumbuhan dibandingkan jika pembangunan itu tersebar di seluruh daerah (Richardson, 2001 : 99).

Kutub pertumbuhan atau *growth pole* dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, kutub pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar daerah belakangnya. Secara geografis, Kutub pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi kutub daya tarik atau *pole of attraction*, yang

menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disuatu tempat dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut (Tarigan, 2005b : 162).

Tidak semua kota dapat dikategorikan sebagai kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu (1). Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi; (2). Adanya efek pengganda atau *multiplier effect* (3). Adanya konsentrasi geografis (4). Bersifat mendorong daerah belakangnya. Jadi, konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap Kutub pertumbuhan apabila konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di antara berbagai sektor di dalam kota maupun ke luar atau ke daerah belakangnya (Tarigan, 2005b : 163).

### **2.1.3. Konsep tentang Perwilayah**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional, dan definisi ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Prinsip-prinsip pengembangan wilayah dalam rangka menjawab tantangan pengembangan wilayah, baik antisipasi terhadap globalisasi dan perdagangan bebas,

kesenjangan wilayah, namun tetap sesuai dengan prinsip desentralisasi, adalah dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pengembangan wilayah harus berbasis pada sektor unggulan. Prioritas pada sektor unggulan akan mengarahkan sumber daya kepada sektor yang diunggulkan melalui pemetaan antara sektor unggulan dengan sektor-sektor yang menjadi pendukungnya.
2. Pengembangan wilayah dilakukan atas dasar karakteristik daerah yang bersangkutan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Suatu program hanya dapat tepat dilakukan pada suatu daerah tertentu dan tidak pada daerah dengan karakteristik berbeda lainnya. Dalam hal ini pengenalan terhadap karakter daerah mutlak dilakukan, sehingga perencanaan dan implementasi program sesuai dengan kelompok sasaran daerah yang bersangkutan.
3. Pengembangan wilayah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Dalam hal ini pengembangan wilayah tidak dapat didasarkan pada satu sektor saja, atau pengembangan masing-masing sektor tidak dapat dilakukan secara terpisah.
4. Pengembangan wilayah mutlak harus mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkage*) secara kuat. Pengembangan kawasan produktif di *hinterland* harus dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri pengolahan di perkotaan, untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian suatu wilayah.
5. Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai wewenang

penuh dalam mengembangkan kelembagaan pengelolaan pengembangan ekonomi di daerah, mengembangkan sumber daya manusianya, menciptakan iklim usaha yang dapat menarik modal dan investasi, mendorong peran aktif swasta dan masyarakat, melakukan koordinasi terus-menerus dengan seluruh *stakeholders* pembangunan di daerah dan di pusat, atas dasar perannya sebagai fasilitator dan katalisator bagi tumbuhnya minat investasi di wilayahnya (Hadi, 2006 : 19-20).

Dalam pendekatan penataan ruang wilayah, terdapat tiga konsep pengembangan wilayah yang dirinci ke dalam wilayah propinsi dan kabupaten, yaitu :

1. Kutub pertumbuhan. Konsep ini menekankan pada perlunya melakukan investasi pada suatu wilayah yang memiliki infrastruktur yang baik. Hal ini cukup dimaksudkan untuk menghemat investasi prasarana dasar dengan harapan perkembangan sektor unggulan dapat mengembalikan modal dengan cukup cepat. Sementara pengembangan wilayah di sekitarnya diharapkan diperoleh melalui proses tetesan ke bawah atau *trickle down effect*. Di Indonesia, konsep ini diimplementasikan dalam bentuk Kawasan Andalan. Meskipun istilah kawasan andalan tidak sepenuhnya sama dengan konsep kutub pertumbuhan namun penentuan kawasan andalan dimaksudkan sebagai kawasan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah sekitarnya melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;
2. Integrasi Fungsional, Konsep ini merupakan suatu alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai kuutub pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini

menempatkan suatu wilayah memiliki hirarki. Konsep *center-periphery* yang diintegrasikan secara fungsional agar terjadi ikatan yang kuat ke depan maupun ke belakang dari suatu proses produksi merupakan pengembangan dari konsep ini;

3. Desentralisasi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumber daya modal dan sumber daya manusia (Hadi, 2006 : 22).

#### **2.1.3.1. Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur pasal 1 huruf c, Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat SWP adalah suatu wilayah dengan satu dan atau semua kabupaten/kota-perkotaan di dalamnya mempunyai hubungan hirarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air.

Pada pasal 10 ayat (3), Satuan Wilayah Pengembangan atau SWP terdiri menjadi sembilan bagian, sebagai berikut :

1. SWP Gerbangkertosusila Plus meliputi: Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan dengan pusat pengembangan di Kota Surabaya.

2. SWP Malang Raya meliputi: Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu dengan pusat pengembangan di Kota Malang.
3. SWP Madiun dan sekitarnya meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dengan pusat pengembangan di Kota Madiun.
4. SWP Kediri dan sekitarnya meliputi: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan pusat pengembangan di Kota Kediri.
5. SWP Probolinggo–Lumajang meliputi: Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, dengan pusat pengembangan di Kota Probolinggo
6. SWP Blitar meliputi: meliputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar, dengan pusat pengembangan Kota Blitar.
7. SWP Jember dan sekitarnya meliputi: Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, dengan pusat pengembangan di Kabupaten Jember
8. SWP Banyuwangi meliputi: Kabupaten Banyuwangi, dengan pusat pengembangan di Kabupaten Banyuwangi.
9. SWP Madura dan Kepulauan meliputi: Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dengan pusat pengembangan di Kabupaten Pamekasan.

### **2.1.3.2. Kawasan Andalan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur pasal 1, kawasan dapat didefinisikan sebagai wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya. Kawasan dapat diklasifikasikan menjadi 14, yaitu Kawasan lindung, Kawasan Budidaya, Kawasan Permukiman, Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Tertentu, Kawasan Pengembangan Utama Komoditi, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terintegrasi, Kawasan Pengembangan Utama, Kawasan Khusus Militer, Kawasan Prioritas, Kawasan Strategis, Kawasan Potensial, Kawasan Pengendalian Ketat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan tertentu didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Salah satu kawasan yang dapat dikategorikan sebagai kawasan tertentu adalah kawasan andalan. Kawasan andalan adalah kawasan yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan, yang memiliki keunggulan geografis dan produk unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya yang mempunyai orientasi regional atau global, yang dicirikan oleh adanya aglomerasi kegiatan ekonomi dan sentra-sentra produksi dan distribusi, adanya potensi sumberdaya dan sektor unggulan yang dapat dikembangkan, adanya kecenderungan konflik dalam pemanfaatan ruang kawasan, serta telah tersedianya prasarana penunjang meskipun terbatas (Hadi, 2006 : 22).

Pengembangan kawasan andalan dapat memberikan *multiplier-effect* untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan antar wilayah, dengan memperhatikan keterpaduan potensi daerah, permukiman, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan atau prasarana wilayah, kemampuan investasi nasional, serta kondisi ekonomi makro (Hadi, 2006 : 22-23). Menurut Kuncoro (2004 : 217) kriteria yang digunakan untuk menetapkan lokasi kawasan andalan adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Geografi

Kriteria ini merupakan pendekatan atau orientasi terhadap lokasi kawasan andalan dalam lokasi pusat pasar domestik maupun internasional. Demikian halnya dengan lokasi sumber daya alam yang menghasilkan proses produksi lebih lanjut dan dapat meminimalkan biaya transportasi.

2. Sumber Daya Alam

Kriteria ini ditujukan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial dalam menentukan lokasi kawasan andalan

3. Infrastruktur Regional

Faktor ketiga ini penting untuk menentukan lokasi kawasan andalan dalam kawasan yang mempunyai infrastruktur regional yang potensial yang mendukung sektor produksi, pasar domestik, internasional dan kawasan pedalaman.

#### 4. Keterkaitan Antar Regional

Faktor ini merupakan kriteria untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang memerlukan keterkaitan antar-regional dalam kawasan tersebut. *Trickle Down Effect* (efek menetes ke bawah) kemungkinan dapat terjadi.

Menurut Hadi (2006 : 22-23) pola dan strategi dasar pengembangan kawasan andalan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan sebagai kutub pertumbuhan memiliki sektor unggulan yang dikembangkan menjadi spesialisasi kawasan;
2. Sektor industri merupakan sektor pendorong kegiatan ekonomi yang merupakan industri pendorong atau *propulsive industry* yang memiliki nilai keunggulan daya saing komparatif dan kompetitif;
3. Pengembangan kawasan mempunyai skenario keterkaitan antara sektor sumber daya alam atau SDA unggulan dan sektor industri pendorong, ke belakang dan ke depan atau *backward and forward linkage* atau hulu-hilir, keterkaitan desa-kota, dan keterkaitan antardaerah;
4. Output atau keluaran dalam strategi pengembangan difokuskan pada pengembangan produk berdaya-saing dengan orientasi pada pasar regional, nasional atau global, serta peningkatan pelayanan jasa publik yang dapat meliputi perbaikan dalam kebijakan publik, birokrasi serta iklim usaha;
5. Sinergitas antar program menjadi kunci tuntutan keberhasilan pengembangan kawasan;

6. Pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator, dan mendorong peran aktif swasta dan masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh kawasan andalan, yaitu sebagai berikut :

1. GERBANGKERTOSUSILA, yang terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan
2. Malang Raya, yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu
3. Kediri-Tulungagung, yang terdiri dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung
4. Probolinggo-Pasuruan, yang terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan
5. Banyuwangi, yaitu Kabupaten Banyuwangi
6. Situbondo-Bondowoso-Jember, yang terdiri dari Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember
7. Tuban-Bojonegoro, yaitu Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro

#### **2.1.4. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur pasal 1, tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemansfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah provinsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur pasal 5, tujuan pemanfaatan ruang wilayah adalah

1. Mengakomodasi kebijakan pembangunan dari pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam dimensi ruang;
2. mengembangkan kebijakan pengembangan dan mendorong pertumbuhan wilayah berdasarkan potensi pembangunan;
3. mewujudkan tata lingkungan yang serasi antara sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur pasal 6 ayat 2, strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

1. Struktur pemanfaatan ruang wilayah;
2. Pola pemanfaatan ruang wilayah
3. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
4. Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

5. Arahan pengelolaan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan.
6. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah.
7. Arahan pengembangan kawasan diprioritaskan.
8. Arahan pengembangan kawasan pesisir dan kepulauan.
9. Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna udara.
10. Pemanfaatan ruang daerah.

### **2.1.5. Analisis Potensi Relatif Perekonomian Wilayah**

#### **2.1.5.1. Analisis Tipologi Klassen**

Analisis Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur perekonomian daerah (Widodo, 2006 :120). Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan PDRB sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu (1). Daerah cepat maju dan cepat tumbuh atau *high growth and high income*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia (2). Daerah maju tapi tertekan atau *high income but low growth*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB lebih rendah dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia (3). Daerah berkembang cepat atau *high growth but low income*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB

tinggi tetapi pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia (4). Daerah relatif tertinggal atau *low growth and low income*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia. Disebut “tinggi” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia, digolongkan “rendah” apabila indikator di suatu kabupaten/kota lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Kuncoro, 2004 : 118). Pada tabel 2.1. berikut ini merupakan matrik tipologi klassen:

Tabel 2.1 : Rumus Analisis Tipologi Klassen

PDRB per kapita (y)	$(y_i > y)$	$(y_i < y)$
Laju Pertumbuhan (r)	$(r_i > r)$	$(r_i < r)$
$(r_i > r)$	Pendapatan tinggi dan Pertumbuhan tinggi	Pendapatan rendah dan Pertumbuhan tinggi
$(r_i < r)$	Pendapatan tinggi dan Pertumbuhan rendah	Pendapatan rendah dan Pertumbuhan rendah

Sumber : Kuncoro, 2004 : 118

Keterangan :

r = Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

y = Rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota

$r_i$  = Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang diamati (i)

$y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota yang diamati (i)

### 2.1.5.2. Teori Basis

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas pekerjaan basis atau dasar dan pekerjaan nonbasis (Tarigan, 2005b : 55). Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lain, sedangkan kegiatan nonbasis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu kegiatan nonbasis pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut, artinya sektor ini bersifat *endogenous* atau tidak tumbuh bebas (Tarigan, 2005b : 55-56).

### 2.1.5.3. *Location Quotient* atau Kuosien Lokasi

Logika dasar *Location Quotient* atau LQ adalah teori basis ekonomi yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Adanya arus pendapatan dari luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis tetapi juga menaikkan permintaan akan industri

nonbasis. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan, juga industri lain (Widodo, 2006 : 116).

LQ adalah perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional. Berikut ini merupakan formula untuk LQ :

$$LQ = \frac{\frac{X_{iR}}{PDRBR}}{\frac{X_{iN}}{PNB}}$$

Keterangan :

- $X_{iR}$  : Total nilai tambah sektor i di daerah R
- $PDRBR$ : Produk Domestik Regional Bruto di daerah R
- $X_{iN}$  : Total nilai tambah sektor i di negara N
- $PNB$  : Produk Nasional Bruto di negara N

Ada tiga kriteria analisis LQ, yaitu sebagai berikut :

1. LQ lebih besar dari 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu di tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama di tingkat nasional sehingga sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah
2. LQ lebih kecil dari 1, maka tingkat spesialisasi sektor tertentu ditingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama ditingkat nasional sehingga sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah
3. LQ sama dengan 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu ditingkat daerah sama dengan sektor yang sama ditingkat nasional (Tarigan, 2005b : 82).

#### 2.1.5.4. Indeks Spesialisasi atau SI

Penggunaan alat analisis indeks spesialisasi regional adalah untuk mengetahui tingkat spesialisasi antardaerah, dengan menggunakan Indeks Krugman. (Kim dalam Kuncoro, 2004 : 227). Formula yang digunakan untuk Indeks Spesialisasi Regional adalah sebagai berikut :

$$SI_{jk} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{E_{ij}}{E_j} - \frac{E_{ik}}{E_k} \right|$$

Keterangan :

$S_{ijk}$  = Indeks Spesialisasi Kabupaten j dan k

$E_{ij}$  = PDRB sektor i pada Kabupaten j

$E_j$  = Total PDRB Kabupaten j

$E_{ik}$  = PDRB sektor i pada Kabupaten k

$E_k$  = Total PDRB Kabupaten k

Kriteria pengukuran adalah apabila Indeks Spesialisasi Regional mendekati 0, maka kedua daerah j dan k tidak memiliki spesialisasi, dan apabila Indeks Spesialisasi Regional mendekati 2, maka kedua daerah j dan k memiliki spesialisasi. Batas tengah 0 dan 2 adalah 1, oleh karena itu jika Indeks Spesialisasi Regional lebih besar dari 1 dapat dianggap sebagai sektor atau subsektor yang memiliki spesialisasi. Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat spesialisasi suatu daerah terhadap daerah lainnya, digunakan nilai rata-rata indeks spesialisasi seluruh daerah sebagai pembanding (Kim dalam Kuncoro, 2004 : 227).

## 2.2. Penelitian Sebelumnya

Kawasan Andalan sebelumnya pernah digunakan sebagai topik penelitian oleh Mudrajat Kuncoro dalam bukunya "Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang" yang terbit tahun 2004 dalam penelitiannya mengenai Strategi Pengembangan Kawasan Andalan atau kawasan Strategis Studi Kasus di Kalimantan Selatan. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mudrajad Kuncoro dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah daerah yang dijadikan objek penelitian berbeda. Penelitian di atas melakukan studi kasus di Kalimantan Selatan sedangkan penelitian ini melakukan studi kasus di Propinsi Jawa Timur.

## 2.3. Model Analisis

Skripsi ini berbentuk analisis kualitatif dan kuantitatif yang menjelaskan kebijakan kawasan andalan dan dalam analisis juga melihat ketepatan penetapan kebijakan kawasan andalan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembahasan yang dilakukan didasarkan pada pengolahan data yang diperoleh dengan alat analisis berupa formula yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu (1). Analisis Tipologi Klassen, (2). Analisis *Location Quotient* atau Kuosien Lokasi, (3). Analisis Indeks Spesialisasi Regional. Analisis kuantitatif dalam Penelitian menggunakan Model logit atau *Binary Logistic Regression* untuk membedakan kinerja perekonomian kawasan andalan dan kawasan bukan andalan.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif pada penelitian dilakukan dengan melihat hasil pengolahan data yang diperoleh dengan alat analisis berupa formula-formula yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu Analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient* atau Kuosien Lokasi, Indeks Spesialisasi Regional yang diamati selama kurun waktu tertentu. Analisis kuantitatif yang berupa analisis *binary logistic regression* digunakan untuk menegaskan hasil yang diperoleh dari analisis kualitatif.

#### **3.2. Identifikasi Variabel**

Pada penelitian variabel yang digunakan terdiri dari tiga variabel bebas, yaitu Pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000, dan Spesialisasi daerah sedangkan variabel tidak bebas (K) terdiri dari 2 kategori :

1. 0 untuk kabupaten dan kota yang masuk dalam kawasan bukan andalan
2. 1 untuk kabupaten dan kota yang masuk dalam kawasan andalan

#### **3.3. Definisi Operasional**

Definisi operasional mendefinisikan varibel yang telah diidentifikasi, agar dapat dioperasionalkan. Definisi operasional mengandung penjelasan atau spesifikasi

mengenai variabel yang telah diidentifikasi, pengukuran variabel, dan skala atau ukuran yang digunakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi salah pengertian. Beberapa definisi yang perlu dipahami dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Produk Regional Domestik Bruto atau PDRB merupakan jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan usahanya disuatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. PDRB disajikan atas dasar harga konstan tahun 2000, berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar, yaitu tahun 2000 dengan satuan rupiah.
2. Produk Regional Domestik Bruto per kapita atau PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara jumlah seluruh nilai PDRB dengan jumlah penduduk suatu daerah pada tahun tertentu. PDRB per kapita disajikan atas dasar harga konstan tahun 2000, berarti semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar, yaitu tahun 2000 dengan satuan rupiah.
3. Total Produk Regional Domestik Bruto atau PDRB merupakan penjumlahan nilai PDRB suatu daerah selama kurun waktu tertentu, dengan satuan rupiah.
4. Rata-rata Produk Regional Domestik Bruto per kapita atau PDRB per kapita (PK) merupakan pembagian seluruh nilai total PDRB suatu daerah pada kurun waktu tertentu dengan kurun waktu yang sama, dengan satuan rupiah.
5. Pertumbuhan PDRB (GR) adalah pengurangan PDRB tahun kedua dengan PDRB tahun pertama dibagi PDRB tahun pertama dikalikan 100%, dengan satuan persentase.

$$\frac{(PDRB_2 - PDRB_1) \times 100\%}{PDRB_1}$$

6. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pembagian seluruh nilai total PDRB suatu daerah pada kurun waktu tertentu dengan kurun waktu yang sama, dengan satuan persentase.
7. Spesialisasi Regional (SI) adalah pembagian PDRB sektor i pada kabupaten j dengan total PDRB Kabupaten j, kemudian mengurangkannya dengan hasil pembagian antara PDRB sektor i pada Kabupaten k dengan total PDRB Kabupaten k, dengan satuan rupiah.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu atau *time series* selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, pada 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang dikumpulkan guna penelitian adalah :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berdasarkan lapangan usaha masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
4. Jumlah penduduk masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.

Data tersebut diolah hingga diperoleh rata-rata untuk tiap kabupaten dan kota dengan menjumlahkan seluruh data dan dibagi lima sehingga diperoleh satu data untuk 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Data sekunder tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur, Badan Perencanaan Provinsi atau BAPEPROV Jawa Timur, sehingga validitas data yang dianalisis dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.4. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data menggunakan metode dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data sekunder yang berasal dari berbagai sumber. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada pengguna data (Kuncoro, 2004 : 25).

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengutip data-data sekunder yang terdapat diberbagai laporan yang berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Timur, Badan Perencanaan Provinsi atau BAPEPROV Jawa Timur.

2. Melengkapi dengan data pendukung dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa data dari berbagai buku literatur serta jurnal-jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian.
3. Menggunakan informasi yang berasal dari internet dan media informasi lain sebagai pelengkap.

### **3.5. Teknik Analisis**

Teknik analisis dalam penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian dan diolah kembali menggunakan alat analisis matematik yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah :

#### **3.5.1. Tipologi Klassen**

Untuk menjawab permasalahan pertama, yaitu menentukan posisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang diukur melalui perbandingan tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita kabupaten/kota terhadap Provinsi Jawa Timur digunakan Tipologi Klassen. Langkah pertama dalam Tipologi Klassen adalah membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan PDRB sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal.

Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur masuk dalam

kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh atau *high growth and high income*. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB lebih rendah dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur masuk kategori daerah maju tapi tertekan atau *high income but low growth*. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB tinggi tetapi pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur masuk kategori daerah berkembang cepat atau *high growth but low income*. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Jawa Timur masuk kategori daerah relatif tertinggal atau *low growth and low income*.

### 3.5.2. Kuosien Lokasi atau *Location Quotient (LQ)*

Untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu mengidentifikasi subsektor ekonomi unggulan yang potensial dapat dikembangkan sebagai penggerak perekonomian pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur digunakan *Location Quotient* atau LQ. Apabila LQ lebih besar dari 1, berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan. Bila LQ lebih kecil dari 1, berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan. *Location Quotient* atau LQ yang disusun atas dasar lapangan usaha terdiri dari sembilan sektor, yaitu :

1. Sektor 1 adalah sektor pertanian
2. Sektor 2 adalah sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor 3 adalah sektor industri pengolahan
4. Sektor 4 adalah sektor listrik, gas, dan air bersih

5. Sektor 5 adalah sektor konstruksi
6. Sektor 6 adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran
7. Sektor 7 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi
8. Sektor 8 adalah sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
9. Sektor 9 adalah sektor jasa-jasa

### **3.5.3. Indeks Spesialisasi (SI) Regional**

Untuk menjawab permasalahan ketiga, yaitu mengetahui spesialisasi antardaerah di kawasan andalan, antardaerah kawasan andalan dengan bukan kawasan andalan, maupun antar kawasan bukan andalan menggunakan indeks spesialisasi regional. Apabila Indeks Spesialisasi Regional mendekati 0, maka kedua daerah j dan k tidak memiliki spesialisasi, dan apabila Indeks Spesialisasi Regional mendekati 2, maka kedua daerah j dan k memiliki spesialisasi. Batas tengah 0 dan 2 adalah 1, oleh karena itu jika Indeks Spesialisasi Regional lebih besar dari 1 dapat dianggap sebagai sektor atau subsektor yang memiliki spesialisasi. Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat spesialisasi suatu daerah terhadap daerah lainnya, digunakan nilai rata-rata indeks spesialisasi seluruh daerah sebagai pembanding (Kim dalam Kuncoro, 2004 : 227).

### **3.5.4. *Binary Logistic Regression***

Untuk menjawab permasalahan keempat, yaitu mengetahui ketepatan penetapan kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur, digunakan Model logit atau *Binary Logistic Regression*. untuk membedakan kinerja perekonomian kawasan

andalan dan kawasan bukan andalan. Analisis model logit atau *Binary Logistic Regression*, dilakukan dengan menggunakan persamaan (Kuncoro, 2004 : 230), yaitu:

$$\text{Prob } [Y=0] = 1 / [1 + \exp(b_0 + b_1\text{GR}+b_2\text{PK}+ b_3\text{SI}) ]$$

Dimana :

- Y = Dummy Variabel
- 1 = Kawasan andalan
- 0 = Kawasan bukan andalan
- GR = Pertumbuhan PDRB
- PK = PDRB per kapita
- SI = Spesialisasi daerah

Berdasarkan persamaan *Binary Logistic Regression* angka 1 mewakili kawasan andalan, dan angka 0 mewakili kawasan bukan andalan, dimana penetapan untuk angka 1 dan angka 0 dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum

##### 4.1.1. Deskripsi Wilayah

Provinsi Jawa Timur terletak pada 1110 0' dan 1140 4' Bujur Timur dan antara 70 12' hingga 80 48' Lintang Selatan, dengan kedudukan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah utara dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan (Kalimantan Selatan). Luas Provinsi Jawa Timur ± 4.642.857 Ha terbagi 2 bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas Jawa Timur daratan mencakup 90% dari jumlah luas Provinsi Jawa Timur. Adapun penggunaan lahan pada tahun 2000 yakni 1.158.124 Ha atau 24,9% lahan sawah, 3.484.733 Ha atau 75,1% bukan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah teknis yaitu sebesar 672.653 Ha atau 58,31% yang lainnya setengah teknis, sederhana, desa, tada hujan, pasang surut dan lain-lain.

Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 29 Kabupaten dan 9 kota, yang terdiri dari 640 kecamatan, dan 8.464 desa atau kelurahan. Kabupaten Malang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 33 kecamatan, sedangkan Kabupaten Lamongan memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu sebanyak 474 desa/kelurahan.

Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah : Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu.

Menurut kondisi geografisnya, Jawa Timur dibagi menjadi 3 bagian : dataran tinggi yaitu lebih 100 meter di atas permukaan laut, dataran sedang yaitu 45-100 meter, dan dataran rendah yaitu di bawah 45 meter. Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan sensus bulan Juni 2000 mencapai 34.525.588 jiwa yang terdiri dari 16.980.594 jiwa laki-laki dan 17.544.944 jiwa perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 720 jiwa/km<sup>2</sup>. Berdasarkan letak geografis Provinsi Jawa Timur dibagi 4 bagian :

1. Bagian Utara dan Pulau Madura, merupakan daerah pantai dan dataran rendah serta daerah pegunungan kapur yang relatif kurang subur;
2. Bagian Tengah merupakan daerah dataran rendah dengan pembukitan dan gunung-gunung berapi yang relatif subur;

3. Bagian Selatan-Barat (Daerah Mataram) merupakan daerah pegunungan dengan gunung-gunung berbatu dan kapur yang relatif kurang subur;
4. Bagian Timur, karena posisinya sebagai penghubung dengan Pulau Bali dan Indonesia bagian Timur, maka industri dan perdagangan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan.

Wilayah Jawa Timur terdiri atas daratan seluas 47.130,15 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 111.000,00 km<sup>2</sup> dengan jumlah kepulauan sebanyak 74 buah. Jika dilihat dari kondisi sosio-kultur, potensi alam dan infrastrukturnya, Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bagian Utara dan Pulau Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur. Potensi yang menonjol adalah perikanan, pertambangan, perdagangan, galian penunjang industri, dan industri kimia. Jenjang pendidikan penduduk termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain;
2. Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur yang infrastrukturnya sudah tertata dengan baik sehingga menunjang hampir semua kegiatan pemerintah dan masyarakat. Jenjang pendidikan penduduk di wilayah ini termasuk yang terbaik dibandingkan dengan wilayah lain;
3. Bagian Selatan-Barat memiliki potensi tambang yang cukup besar. Potensi pariwisata belum tergarap dengan baik. Bagian terbesar dari struktur ekonomi adalah industri disusul dengan pertanian. Jenjang pendidikan penduduk relatif lebih baik dibandingkan wilayah utara; dan

4. Bagian Timur masih didominasi oleh pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata. Karena posisinya sebagai penghubung pulau Bali dan Indonesia Bagian Timur, industri dan perdagangan potensial untuk dikembangkan. Jenjang pendidikan penduduk wilayah ini berada pada urutan ketiga diantara empat wilayah di Provinsi Jawa Timur.

#### **4.1.2. Kondisi Penduduk Jawa Timur**

Jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan registrasi penduduk akhir tahun 2005, tercatat sebesar 37,070,731 jiwa dan ini mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sekitar 2,39%. Jumlah penduduk kabupaten/kota terbesar tahun 2005 di Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya sebanyak 2.698.972 jiwa, selanjutnya Kabupaten Malang sebanyak 2.393.959 jiwa, dan Kabupaten Jember sebanyak 2.263.794 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk kabupaten/kota terkecil adalah Kota Mojokerto sebanyak 116.383 jiwa, Kota Blitar sebesar 124.944 jiwa, dan Kota Madiun sebesar 170.931 jiwa.

Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2001 adalah 798 jiwa/1km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk terbesar di Provinsi Jawa Timur berada di Kota Surabaya sebesar 8270 jiwa/1km<sup>2</sup>, Kota Malang sebesar 7078 jiwa/1km<sup>2</sup>, Kota Mojokerto sebesar 7071 jiwa/1km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk terkecil di Kabupaten Banyuwangi sebesar 270 jiwa/1km<sup>2</sup>, Kabupaten Situbondo sebesar 385 jiwa/1km<sup>2</sup>, dan Kabupaten Pacitan sebesar 407 jiwa/1km<sup>2</sup>.

Struktur penduduk menurut jenis kelamin di Provinsi Jawa Timur tahun 2005, laki-laki berjumlah 18,285,474 jiwa, dan perempuan berjumlah 18.785.257 jiwa. Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur, berumur 0-14 tahun berjumlah 9.115.693 jiwa, berumur 15-64 tahun berjumlah 25.489.835 jiwa, dan berumur 65 tahun ke atas berjumlah 2.465.204 jiwa.

#### **4.1.3. Pertumbuhan PDRB Jawa Timur**

Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 dasar harga konstan, terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005 yang tertinggi yaitu sebesar 5,84%, seperti tersebut pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1. : PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Di Jawa Timur Tahun 2001 - 2005 (jutaan rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Kontan Tahun 2000</b>	<b>Selisih</b>	<b>Ket</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2001	210,448,570,10	-	-	-
2002	218,452,387,07	8.003.816,90	Naik	3,80
2003	228,884,458,48	10.432.071,40	Naik	4,78
2004	242,228,892,19	13.344.433,70	Naik	5,83
2005	256,374,726,55	14.145.834,40	Naik	5,84

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Indonesia tahun 2001-2005

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Posisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan dengan menggunakan Tipologi Klassen. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan PDRB sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal.

Kriteria yang digunakan untuk membagi kabupaten/kota dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh atau *high growth and high income*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
2. Daerah maju tapi tertekan atau *high income but low growth*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB lebih rendah dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
3. Daerah berkembang cepat atau *high growth but low income*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB tinggi tetapi pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
4. Daerah relatif tertinggal atau *low growth and low income*, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil pengolahan data pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdapat pada Lampiran 15 menentukan hasil tipologi daerah di Provinsi Jawa Timur seperti yang tersebut pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

**Tabel 4.2. : Posisi Perekonomian Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Tipologi Daerah**

<b>Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Daerah Maju Tapi Tertekan</b>
1. Kabupaten Gresik 2. Kabupaten Sidoarjo 3. Kota Surabaya 4. Kota Mojokerto 5. Kota Malang 6. Kota Probolinggo	1. Kota Kediri
<b>Daerah Berkembang Cepat</b>	<b>Daerah Relatif Tertinggal</b>
1. Kabupaten Tulungagung 2. Kabupaten Malang 3. Kabupaten Jember 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Banyuwangi 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Tuban 8. Kabupaten Lumajang 9. Kabupaten Nganjuk 10. Kabupaten Mojokerto 11. Kabupaten Jombang 12. Kota Blitar 13. Kota Madiun 14. Kota Batu 15. Kota Pasuruan	1. Kabupaten Pacitan 2. Kabupaten Ponorogo 3. Kabupaten Trenggalek 4. Kabupaten Blitar 5. Kabupaten Kediri 6. Kabupaten Situbondo 7. Kabupaten Bondowoso 8. Kabupaten Sumenep 9. Kabupaten Madiun 10. Kabupaten Magetan 11. Kabupaten Ngawi 12. Kabupaten Bojonegoro 13. Kabupaten Lamongan 14. Kabupaten Bangkalan 15. Kabupaten Sampang 16. Kabupaten Pamekasan

Sumber : Lampiran 10 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2. menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa timur yang tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah 6 kabupaten/kota. Terdapat 1 kota yang tergolong daerah maju tapi tertekan. Sebanyak 15 kabupaten/kota yang masuk ke dalam golongan daerah cepat berkembang, dan 16 kabupaten yang masuk ke dalam golongan daerah tertinggal. Dari keempat golongan daerah berdasarkan

tipologi daerah di Provinsi Jawa Timur, golongan keempat, yaitu daerah relatif tertinggal memiliki anggota terbanyak, yaitu 16 kabupaten.

#### **4.2.2. Sektor Ekonomi Unggulan Yang Potensial Untuk Dikembangkan**

Sektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan dapat kita lihat dengan menggunakan alat *Location Quotient* atau LQ. Berikut ini merupakan formula untuk menghitung LQ :

$$LQ = \frac{X_{iR}}{PDRB_R}$$

<u>X<sub>iR</sub></u>	Keterangan :
X <sub>iR</sub>	: Total nilai tambah sektor i di daerah R
<u>PDRB<sub>R</sub></u>	PDRB <sub>R</sub> : Produk Domestik Regional Bruto di daerah R
<u>X<sub>iN</sub></u>	X <sub>iN</sub> : Total nilai tambah sektor i di negara N
PNB <sub>N</sub>	PNB : Produk Nasional Bruto di negara N

Jika suatu sektor memiliki LQ lebih besar dari 1, maka sektor tersebut merupakan sektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah dan apabila sektor tersebut memiliki LQ lebih kecil 1, berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan di daerah dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah (Kuncoro, 2004 : 226). Hasil pengolahan LQ kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdapat pada Lampiran 16, merupakan hasil LQ rata-rata di Provinsi Jawa Timur seperti yang tersebut pada Tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3. : LQ Rata-Rata Atas Dasar Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Dari Tahun 2001-2005

<b>Kabupaten /Kota</b>	<b>SEKTOR</b>								
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Pacitan	2.26	3.42	0.13	0.41	1.81	0.40	0.89	1.61	2.03
Ponorogo	1.58	1.81	0.30	0.77	2.13	0.98	0.85	1.10	1.55
Trenggalek	1.76	1.26	0.30	0.24	0.96	0.71	0.93	0.92	2.79
Tulungagung	1.03	1.31	0.59	0.66	0.52	1.16	0.58	2.32	1.48
Blitar	2.66	1.68	0.10	0.43	0.43	0.92	0.37	1.06	1.24
Kediri	2.03	1.55	0.62	0.24	0.28	0.87	0.41	0.91	1.21
Malang	1.68	1.38	0.58	1.03	0.35	0.91	0.73	0.76	1.72
Lumajang	1.92	1.80	0.58	0.58	1.05	0.76	0.54	1.67	0.96
Jember	2.39	2.54	0.27	0.55	0.73	0.73	0.70	1.24	1.17
Banyuwangi	2.58	2.16	0.23	0.42	0.08	0.89	0.95	1.13	0.69
Bondowoso	2.67	0.20	0.26	0.34	0.69	0.69	0.33	1.67	1.33
Situbondo	1.70	1.20	0.36	0.60	0.70	1.32	0.83	0.75	1.01
Probolinggo	2.06	1.85	0.48	0.89	1.57	0.77	0.59	0.75	1.14
Pasuruan	1.46	0.01	1.07	1.28	0.55	0.82	0.48	0.74	1.21
Sidoarjo	0.23	1.07	1.93	0.97	0.51	0.77	1.68	0.27	0.48
Mojokerto	1.25	0.86	1.28	0.64	0.53	0.82	0.68	0.67	0.83
Jombang	1.85	0.87	0.36	1.45	0.59	1.06	1.10	0.73	1.28
Nganjuk	1.81	0.98	0.32	0.25	0.60	1.36	0.37	0.78	1.22
Madiun	1.89	1.47	0.12	0.54	1.95	0.94	0.48	0.90	2.14
Magetan	1.95	0.34	0.26	0.59	1.55	0.92	0.34	0.78	2.21
Ngawi	2.04	0.34	0.22	0.36	1.06	1.06	0.54	1.02	1.68
Bojonegoro	2.03	1.55	0.23	0.56	0.83	0.86	0.84	1.03	1.93
Tuban	1.47	7.07	0.65	1.82	1.75	0.65	0.50	0.63	0.91
Lamongan	2.49	0.11	0.18	0.94	0.76	1.03	0.28	0.64	1.40
Gresik	0.61	1.11	1.66	2.88	1.39	0.82	0.39	0.76	0.24
Bangkalan	2.04	0.78	0.15	0.47	1.13	0.99	1.20	0.91	1.66
Sampang	2.83	4.64	0.03	0.51	0.79	0.63	0.42	0.71	1.32
Pamekasan	3.06	0.67	0.04	0.77	1.06	0.42	0.70	1.15	1.83
Sumenep	2.99	4.82	0.09	0.06	0.47	0.55	0.55	0.74	1.13
Kota Kediri	0.01	0.00	2.59	0.14	0.04	0.79	0.13	0.62	0.12
Kota Blitar	0.50	0.04	0.37	1.88	1.29	0.85	3.28	2.47	2.24
Kota Malang	0.04	0.04	1.20	0.27	0.56	1.40	0.98	1.63	1.33
Kota Probolinggo	0.54	0.01	0.58	1.45	0.08	1.46	2.74	1.46	1.04
Kota Pasuruan	0.28	0.11	0.56	1.69	1.81	1.41	2.16	1.51	1.38
Kota Mojokerto	0.06	0.00	0.56	2.21	1.45	1.49	2.74	1.45	1.36
Kota Madiun	0.14	0.02	0.79	1.28	3.33	0.82	2.13	2.10	1.93
Kota Surabaya	0.01	0.01	1.11	1.56	1.88	1.32	1.70	1.27	0.88
Kota Batu	1.08	0.11	0.28	0.88	0.28	1.87	0.54	0.79	1.38
Jawa Timur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Sumber : Lampiran 11

Tabel 4.3. Hampir semua kabupaten di Jawa Timur mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, hanya terdapat 10 kabupaten/kota yang tidak mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan. 4 Kabupaten yang sangat mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian akan tetapi terdapat 2 kota yang mempunyai nilai LQ 0,00 dari sektor pertambangan dan penggalian. Terdapat 7 kabupaten dan kota yang menjadikan sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan. Terdapat 14 kabupaten dan kota yang mengandalkan sektor Listrik, Gas, dan Air bersih sebagai sektor unggulan, terdapat 15 kabupaten dan kota yang mengandalkan sektor konstruksi sebagai sektor unggulan, terdapat 14 kabupaten dan kota yang menjadikan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai sektor unggulan, dan terdapat 13 kabupaten dan kota yang mengandalkan sektor pengangkutan dan komunikasi sebagai sektor unggulan, sementara itu terdapat 17 kabupaten dan kota yang mengandalkan sektor keuangan, persewaaan, dan jasa perusahaan sebagai sektor unggulan dan sebanyak 29 kabupaten dan kota menjadikan sektor jasa-jasa sebagai sektor unggulan.

#### **4.2.3. Spesialisasi Antardaerah di Kawasan Andalan, Antar-daerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan, maupun Antar Kawasan Bukan Andalan**

Hasil perhitungan indeks spesialisasi regional dapat digunakan untuk melihat hasil rata-rata indeks spesialisasi regional atas dasar lapangan usaha kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur seperti yang tersebut pada Tabel 4.4. sebagai berikut :

Tabel 4.4. Indeks Spesialisasi Regional Rata-Rata Atas Dasar Lapangan Usaha Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Dari Tahun 2001 dan Tahun 2005

Kabupaten/Kota	Kode Kabupaten/Kota	Rata-Rata SI 2001	Rata-Rata SI 2005	Rata-Rata SI 2001/2005
Kabupaten Pacitan	1	0.00	0.65	0.33
Kabupaten Ponorogo	2	0.00	0.48	0.24
Kabupaten Trenggalek	3	(0.16)	0.56	0.23
Kabupaten Tulungagung	4	0.00	0.55	0.28
Kabupaten Blitar	5	0.00	0.58	0.29
Kabupaten Kediri	6	0.00	0.48	0.24
Kabupaten Malang	7	0.00	0.49	0.24
Kabupaten Lumajang	8	0.00	0.51	0.26
Kabupaten Jember	9	0.00	0.56	0.28
Kabupaten Banyuwangi	10	0.00	0.61	0.31
Kabupaten Bondowoso	11	0.00	0.61	0.31
Kabupaten Situbondo	12	0.00	0.54	0.27
Kabupaten Probolinggo	13	0.00	0.55	0.28
Kabupaten Pasuruan	14	0.00	0.58	0.29
Kabupaten Sidoarjo	15	0.00	0.92	0.46
Kabupaten Mojokerto	16	0.00	0.64	0.32
Kabupaten Jombang	17	0.00	0.51	0.26
Kabupaten Nganjuk	18	0.00	0.59	0.30
Kabupaten Madura	19	0.00	0.61	0.31
Kabupaten Magetan	20	0.00	0.62	0.31
Kabupaten Ngawi	21	0.00	0.61	0.30
Kabupaten Bojonegoro	22	0.00	0.66	0.33
Kabupaten Tuban	23	0.01	0.73	0.37
Kabupaten Lamongan	24	0.00	0.72	0.36
Kabupaten Gresik	25	0.00	0.81	0.41
Kabupaten Bangkalan	26	0.00	0.70	0.35
Kabupaten Sampang	27	0.01	0.92	0.47
Kabupaten Pamekasan	28	0.00	1.00	0.50
Kabupaten Sumenep	29	0.01	1.08	0.55
Kota Kediri	30	0.00	0.97	0.49
Kota Blitar	31	0.00	0.49	0.24
Kota Malang	32	0.00	0.38	0.19
Kota Probolinggo	33	0.00	0.33	0.17
Kota Pasuruan	34	0.00	0.30	0.15
Kota Mojokerto	35	(0.00)	0.38	0.19
Kota Madiun	36	0.00	0.47	0.24
Kota Surabaya	37	0.00	0.41	0.20
Kota Batu	38	0.00	0.00	0.00
Jawa Timur		(0.03)	0.60	0.28

Sumber : Lampiran 12 dan Lampiran 13

Hasil perhitungan indeks spesialisasi pada Tabel 4.4 menunjukkan adanya kenaikan nilai rata-rata indeks spesialisasi kabupaten/kota sektor atas dasar lapangan usaha di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,57, yaitu dari (0,03) pada tahun 2001 menjadi 0,60 pada tahun 2005. Kenaikan nilai rata-rata indeks spesialisasi tersebut didorong oleh terjadinya kenaikan nilai rata-rata pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur walaupun dibeberapa kabupaten/kota terjadi penurunan.

#### 4.2.4. Ketepatan Penetapan Kawasan Andalan di Provinsi Jawa Timur

Untuk melihat ketepatan kawasan andalan maka penelitian ini menggunakan Model logit atau *Binary Logistic Regression*. Analisis model logit atau *Binary Logistic Regression*, dilakukan dengan menggunakan persamaan (Kuncoro, 2004 : 230), yaitu :

$$\text{Prob } [Y=0] = 1 / [1 + \exp(b_0 + b_1\text{GR} + b_2\text{PK} + b_3\text{SI})]$$

Dimana :

- Y = Dummy Variabel
- 1 = Kawasan andalan
- 0 = Kawasan bukan andalan
- GR = Pertumbuhan PDRB
- PK = PDRB per kapita
- SI = Spesialisasi daerah

Telah ditetapkan sebelumnya kabupaten dan kota yang termasuk dalam kawasan andalan terdiri dari 23 kabupaten/kota, dan kawasan bukan andalan terdiri dari 15 kabupaten/kota. Hasil tersebut berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tentang penetapan kawasan andalan, kawasan bukan andalan,

dan daerah tertinggal. Kenyataan tersebut berbeda setelah dilakukan pengujian secara statistik.

Kabupaten dan kota yang termasuk dalam kawasan andalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi : (1). Kabupaten Tulungagung (2). Kabupaten Kediri (3). Kabupaten Malang (4). Kabupaten Jember (5). Kabupaten Banyuwangi (6). Kabupaten Bondowoso (7). Kabupaten Situbondo (8). Kabupaten Probolinggo (9). Kabupaten Pasuruan (10). Kabupaten Sidoarjo (11). Kabupaten Mojokerto (12). Kabupaten Bojonegoro (13). Kabupaten Tuban (14). Kabupaten Lamongan (15). Kabupaten Gresik (16). Kabupaten Bangkalan (17). Kota Kediri (18). Kota Malang (19). Kota Probolinggo (20). Kota Pasuruan (21). Kota Mojokerto (22). Kota Surabaya (23). Kota Batu

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan model *Binary Logistic Regression*, melalui bantuan komputer Program SPSS Versi 15.00 ternyata terjadi perubahan, seperti terlihat pada Lampiran 19. Kabupaten dan kota yang masuk dalam kawasan andalan berubah posisi, walaupun dengan jumlah yang tetap sama 23 kabupaten dan kota. Kenyataan itu disebabkan adanya perubahan kategori, yang dulu masuk dalam kategori 1 ( $Z$  skor = 1) berubah menjadi kategori 0 ( $Z$  skor = 0). Kategori yang berubah adalah Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, sehingga kabupaten dan kota yang masuk dalam kawasan

andalan yang baru adalah : (1). Kabupaten Tulungagung (2). Kabupaten Blitar (3). Kabupaten Malang (4). Kabupaten Lumajang (5). Kabupaten Jember (6). Kabupaten Banyuwangi (7). Kabupaten Probolinggo (8). Kabupaten Sidoarjo (9). Kabupaten Mojokerto (10). Kabupaten Jombang (11). Kabupaten Magetan (12). Kabupaten Tuban (13). Kabupaten Gresik (14). Kabupaten Sumenep (15) Kota Kediri (16). Kota Blitar (17). Kota Malang (18). Kota Probolinggo (19). Kota Pasuruan (20). Kota Mojokerto (21). Kota Madiun (22). Kota Surabaya (23). Kota Batu

Sebagai akibatnya terjadi perubahan kategori, yang dulu masuk dalam kategori 0 ( $Z$  skor = 0) berubah menjadi kategori 1 ( $Z$  skor = 1). Kategori yang berubah adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, dan Kota Madiun. Kabupaten dan kota yang masuk dalam kawasan bukan andalan yang baru adalah : (1). Kabupaten Pacitan (2). Kabupaten Ponorogo (3). Kabupaten Trenggalek (4). Kabupaten Kediri (5). Kabupaten Bondowoso (6). Kabupaten Situbondo (7). Kabupaten Pasuruan (8). Kabupaten Nganjuk (9). Kabupaten Madiun (10). Kabupaten Ngawi (11). Kabupaten Bojonegoro (12). Kabupaten Lamongan (13). Kabupaten Bangkalan (14). Kabupaten Sampang (15). Kabupaten Pamekasan

Faktor penyebab terjadinya perubahan kategori tersebut berdasarkan perhitungan statistik, karena berdasarkan hasil analisis logit atau *Binary Logistic Regression*, pengujian kecocokan model analisis menunjukkan bahwa pengujian model penuh dengan variabel bebas dibandingkan dengan konstanta, terbukti secara statistik bahwa terdapat satu variabel penjelas mampu membedakan kawasan andalan

dan kawasan bukan andalan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai Chi-Square = 7,970 dengan derajat kebebasan (3, N=38) yang signifikan dengan  $p < 0,05$ . Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 : Uji Kecocokan Model Kawasan Andalan dan Kawasan Bukan Andalan

<b>Step</b>	<b>Chi-Square</b>	<b>df</b>	<b>Significance</b>
1	8.993	8	.343
2	8.921	8	.349
3	7.970	8	.436

Sumber : Lampiran 15 (diolah)

Kemampuan prediksi dari model yang digunakan cukup bagus di mana tingkat sukses total sebesar 63,20% dengan 69,60% kawasan andalan dan 53,30% kawasan bukan andalan mampu diprediksi secara benar. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 : Klasifikasi Kemampuan Prediksi Variabel Bebas Terhadap Kawasan Andalan dan Kawasan Bukan Andalan Provinsi Jawa Timur

Observed	Predicted			Percentage Correct	
	Kawasan		Andalan		
	Bukan Andalan	Andalan			
Step 1 Kawasan	Bukan Andalan	8	7	53.30	
		5	18	78.30	
	Overall Percentage			68.40	
Step 2 Kawasan	Bukan Andalan	8	7	53.30	
		5	18	78.30	
	Overall Percentage			68.40	
Step 3 Kawasan	Bukan Andalan	8	7	53.30	
		7	16	69.60	
	Overall Percentage			63.20	

Sumber : Lampiran 15 (diolah)

Hasil analisis model logit menunjukkan bahwa menurut kriteria Wald, hanya variabel pendapatan per kapita (PK) yang dapat diandalkan untuk memprediksi kawasan andalan, dengan nilai statistik Wald sebesar 5,193 yang signifikan  $p < 0,05\%$ . Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut :

**Tabel 4.7 : Persamaan Variabel, Koefisien Regresi, *Standard Error*, Statistik Wald, dan *Odds Ratio***

Variables in the Equation						
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	GR	-1,941	2,266	,734	1	,392
	PK	,000	,000	3,686	1	,055
	SI	-1,650	2,430	,461	1	,497
Step 2	Constant	-2,348	2,832	,687	1	,407
	GR	-1,579	2,146	,541	1	,462
	PK	,000	,000	4,220	1	,040
Step 3	Constant	-3,849	1,844	4,359	1	,037
	PK	,000	,000	5,193	1	,023
	Constant	-3,783	1,744	4,705	1	,030

a. Variable(s) entered on step 1: GR, PK, SI.

Sumber : Lampiran 15 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.7. berarti bahwa, pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang positif terhadap probabilitas suatu daerah berada pada kawasan andalan. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan per kapita semakin tinggi pula probabilitas suatu daerah berada pada kawasan andalan. Koefisien pendapatan per kapita yang positif menunjukkan apabila pendapatan per kapita naik maka probabilitas kabupaten/kota yang berada pada kawasan andalan semakin tinggi. Variabel pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah menunjukkan keadaan yang tidak signifikan secara statistik, yang berarti tidak memiliki pengaruh terhadap

probabilitas suatu daerah berada pada kawasan andalan. Tingkat signifikan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan suatu daerah sebagai kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur tidak mempertimbangkan tingkat pertumbuhan PDRB dan spesialisasi daerah. Kriteria yang diacu dalam penetapan kawasan andalan hanya pendapatan per kapita.

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Posisi Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Hasil pengolahan Tipologi Klassen di Jawa Timur yang terdapat pada Lampiran 15 menentukan hasil Tipologi Klassen kawasan andalan seperti pada Tabel 4.8. sebagai berikut :

Tabel 4.8. : Tipologi Klassen Kawasan Andalan Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005

<b>Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Daerah Maju Tapi Tertekan</b>
1. Kabupaten Gresik 2. Kabupaten Sidoarjo 3. Kota Surabaya 4. Kota Mojokerto 5. Kota Malang 6. Kota Probolinggo	1. Kota Kediri
<b>Daerah Berkembang Cepat</b>	<b>Daerah Relatif Tertinggal</b>
1. Kabupaten Tulungagung 2. Kabupaten Malang 3. Kabupaten Jember 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Banyuwangi 6. Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Tuban 8. Kabupaten Mojokerto 9. Kota Batu 10.Kota Pasuruan	1. Kabupaten Kediri 2. Kabupaten Situbondo 3. Kabupaten Bondowoso 4. Kabupaten Bojonegoro 5. Kabupaten Lamongan 6. Kabupaten Bangkalan

Sumber : Lampiran 10 (diolah)

Tabel 4.8. menunjukkan bahwa 2 kabupaten dan 4 kota merupakan kawasan andalan yang masuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh, terdapat 1 kota yang masuk ke kategori daerah maju tapi tertekan, terdapat 8 kabupaten dan 2 kota yang masuk dalam kategori daerah berkembang cepat, dan terdapat 6 kabupaten masuk dalam kategori daerah relatif tertinggal. Menurut tipologi klassen maka keberadaan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo dan Kota Mojokerto sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh menunjukkan ketepatan penetapan kawasan andalan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kondisi tipologi klassen juga menunjukkan kurang tepatnya penetapan kawasan andalan Provinsi Jawa Timur, dilihat dari pertumbuhan PDRB sebagai syarat penetapannya, terutama Kota Kediri yang berada dalam kategori daerah maju tapi tertekan yang memiliki pertumbuhan PDRB yang rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Timur. Sementara itu jika dilihat dari PDRB per kapita sebagai syarat penetapan kawasan andalan maka pemilihan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, Kota Pasuruan yang tergolong daerah berkembang cepat kurang tepat karena memiliki PDRB per kapita yang rendah dibandingkan rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Timur. Dan jika menggunakan pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita sebagai syarat penetapan kawasan andalan

maka pemilihan Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro yang tergolong daerah relatif tertinggal kurang tepat karena memiliki pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita yang rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB dan rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota di Jawa Timur.

Hasil pengolahan Tipologi Klassen di Jawa Timur yang terdapat pada Lampiran 15 menentukan hasil Tipologi Klassen kawasan bukan andalan seperti pada Tabel 4.9. sebagai berikut :

Tabel 4.9. : Tipologi Klassen Kawasan Bukan Andalan Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005

<b>Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh</b>		<b>Daerah Maju Tapi Tertekan</b>
<b>Daerah Berkembang Cepat</b>		<b>Daerah Relatif Tertinggal</b>
1. Kabupaten Lumajang	1. Kabupaten Pacitan	
2. Kabupaten Jombang	2. Kabupaten Ponorogo	
3. Kabupaten Nganjuk	3. Kabupaten Trenggalek	
4. Kota Blitar	4. Kabupaten Blitar	
5. Kota Madiun	5. Kabupaten Madiun	
	6. Kabupaten Magetan	
	7. Kabupaten Ngawi	
	8. Kabupaten Sampang	
	9. Kabupaten Pamekasan	
	10. Kabupaten Sumenep	

Sumber : Lampiran 10 (diolah)

Tabel 4.9. menunjukkan bahwa daerah pada kawasan bukan andalan terbagi dalam dua kategori yang terdiri dari 3 kabupaten dan 2 kota tergolong pada kategori berkembang cepat dan 10 kabupaten tergolong daerah relatif tertinggal. Kondisi Tipologi Klassen pada kawasan bukan andalan menunjukkan kurang tepatnya penetapan kawasan bukan andalan Provinsi Jawa Timur, dilihat dari pertumbuhan PDRB sebagai syarat penetapannya, terutama Kabupaten Lumajang, Kabupaten

Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, dan Kota Madiun yang berada dalam kategori daerah berkembang cepat yang memiliki pertumbuhan PDRB yang tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB kabupaten/kota di Jawa Timur.

#### **4.3.2. Sektor Ekonomi Unggulan Yang Potensial Untuk Dikembangkan**

Perhitungan analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan, memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa sektor lapangan usaha. Artinya semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki sektor unggulan. Kawasan andalan dan kawasan andalan tidak memiliki sektor unggulan yang dominan, dimana tiap kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan memiliki sektor unggulan yang berbeda antara satu dengan yang lain, keanekaragaman posisi sektor unggulan tersebut dapat mendorong kerjasama perekonomian antara kawasan andalan, antara kawasan bukan andalan maupun antara kawasan andalan dan kawasan bukan andalan.

Melihat hasil perhitungan LQ yang menunjukkan tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur baik yang masuk sebagai kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan memiliki sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan maka penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang tepat. Hasil perhitungan analisis LQ Kawasan Andalan dapat ditunjukkan pada Tabel 4.10 sebagai berikut :

**Tabel 4.10. : LQ Rata-Rata Atas Dasar Lapangan Usaha Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005**

<b>Kabupaten /Kota</b>	<b>SEKTOR</b>								
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Tulungagung	1.03	1.31	0.59	0.66	0.52	1.16	0.58	2.32	1.48
Kediri	2.03	1.55	0.62	0.24	0.28	0.87	0.41	0.91	1.21
Malang	1.68	1.38	0.58	1.03	0.35	0.91	0.73	0.76	1.72
Jember	2.39	2.54	0.27	0.55	0.73	0.73	0.70	1.24	1.17
Banyuwangi	2.58	2.16	0.23	0.42	0.08	0.89	0.95	1.13	0.69
Bondowoso	2.67	0.20	0.26	0.34	0.69	0.69	0.33	1.67	1.33
Situbondo	1.70	1.20	0.36	0.60	0.70	1.32	0.83	0.75	1.01
Probolinggo	2.06	1.85	0.48	0.89	1.57	0.77	0.59	0.75	1.14
Pasuruan	1.46	0.01	1.07	1.28	0.55	0.82	0.48	0.74	1.21
Sidoarjo	0.23	1.07	1.93	0.97	0.51	0.77	1.68	0.27	0.48
Mojokerto	1.25	0.86	1.28	0.64	0.53	0.82	0.68	0.67	0.83
Bojonegoro	2.03	1.55	0.23	0.56	0.83	0.86	0.84	1.03	1.93
Tuban	1.47	7.07	0.65	1.82	1.75	0.65	0.50	0.63	0.91
Lamongan	2.49	0.11	0.18	0.94	0.76	1.03	0.28	0.64	1.40
Gresik	0.61	1.11	1.66	2.88	1.39	0.82	0.39	0.76	0.24
Bangkalan	2.04	0.78	0.15	0.47	1.13	0.99	1.20	0.91	1.66
Kota Malang	0.04	0.04	1.20	0.27	0.56	1.40	0.98	1.63	1.33
Kota Probolinggo	0.54	0.01	0.58	1.45	0.08	1.46	2.74	1.46	1.04
Kota Pasuruan	0.28	0.11	0.56	1.69	1.81	1.41	2.16	1.51	1.38
Kota Mojokerto	0.06	0.00	0.56	2.21	1.45	1.49	2.74	1.45	1.36
Kota Madiun	0.14	0.02	0.79	1.28	3.33	0.82	2.13	2.10	1.93
Kota Surabaya	0.01	0.01	1.11	1.56	1.88	1.32	1.70	1.27	0.88
Kota Batu	1.08	0.11	0.28	0.88	0.28	1.87	0.54	0.79	1.38

Sumber : Lampiran 11 (diolah)

Dari sembilan sektor lapangan usaha yang ada dalam kawasan andalan keseluruhannya merupakan sektor unggulan. Urutan sektor yang paling banyak menjadi sektor unggulan dalam kawasan andalan adalah sektor jasa-jasa terdapat 15 kabupaten/kota, sektor pertanian terdapat 15 kabupaten/kota, sektor listrik, gas, dan air bersih terdapat 11 kabupaten/kota, sektor pertambangan dan penggalian terdapat 10 kabupaten/kota, sektor perdagangan, hotel, dan restoran terdapat 10 kabupaten/kota, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terdapat 10

kabupaten/kota, sektor pengangkutan dan komunikasi terdapat 8 kabupaten/kota, sektor industri pengolahan terdapat 7 kabupaten/kota, sektor konstruksi terdapat 6 kabupaten/kota.

Posisi sektor unggulan yang berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya menunjukkan adanya sektor yang keunggulan daya saingnya dimiliki sendiri-sendiri oleh masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan daya saing atau keunggulan sektor tersebut sangat memungkinkan dilakukannya pola spesialisasi produksi antardaerah, sehingga akan membuka peluang terciptanya pertukaran komoditas sesuai dengan kemutuhan masing-masing daerah. Implikasinya adalah pertumbuhan suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan daerah lainnya. Peran pemerintah daerah untuk memberdayakan sektor unggulan sebagai penggerak perekonomian daerah sangat diperlukan, terutama dalam hal bekerjanya proses pertukaran komoditas antardaerah yang mendorong masuknya arus pendapatan dari luar ke daerah yang bersangkutan.

Setelah melihat hasil pengolahan LQ pada kawasan andalan maka perlu dilihat hasil pengolahan LQ pada kawasan bukan andalan untuk melakukan perbandingan antara hasil pengolahan LQ kawasan andalan dan hasil pengolahan LQ kawasan bukan andalan. Hasil pengolahan LQ kabupataen/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdapat pada Lampiran 16 bukan hanya dapat menentukan hasil LQ pada kawasan andalan tapi juga dapat menentukan hasil LQ pada kawasan bukan andalan di Provinsi Jawa Timur seperti yang tersebut pada Tabel 4.11. sebagai berikut :

**Tabel 4.11 : LQ Rata-Rata Atas Dasar Lapangan Usaha Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005**

No	Kabupaten /Kota	SEKTOR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pacitan	2.26	3.42	0.13	0.41	1.81	0.40	0.89	1.61	2.03
2	Ponorogo	1.58	1.81	0.30	0.77	2.13	0.98	0.85	1.10	1.55
3	Trenggalek	1.76	1.26	0.30	0.24	0.96	0.71	0.93	0.92	2.79
4	Blitar	2.66	1.68	0.10	0.43	0.43	0.92	0.37	1.06	1.24
5	Lumajang	1.92	1.80	0.58	0.58	1.05	0.76	0.54	1.67	0.96
6	Jombang	1.85	0.87	0.36	1.45	0.59	1.06	1.10	0.73	1.28
7	Nganjuk	1.81	0.98	0.32	0.25	0.60	1.36	0.37	0.78	1.22
8	Madiun	1.89	1.47	0.12	0.54	1.95	0.94	0.48	0.90	2.14
9	Magetan	1.95	0.34	0.26	0.59	1.55	0.92	0.34	0.78	2.21
10	Ngawi	2.04	0.34	0.22	0.36	1.06	1.06	0.54	1.02	1.68
11	Sampang	2.83	4.64	0.03	0.51	0.79	0.63	0.42	0.71	1.32
12	Pamekasan	3.06	0.67	0.04	0.77	1.06	0.42	0.70	1.15	1.83
13	Sumenep	2.99	4.82	0.09	0.06	0.47	0.55	0.55	0.74	1.13
14	Kota Kediri	0.01	0.00	2.59	0.14	0.04	0.79	0.13	0.62	0.12
15	Kota Blitar	0.50	0.04	0.37	1.88	1.29	0.85	3.28	2.47	2.24

Sumber : Lampiran 11 (diolah)

Dari sembilan sektor lapangan usaha yang ada dalam kawasan bukan andalan delapan sektor merupakan sektor unggulan dibeberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Satu sektor terakhir berada pada posisi dimana tidak satu pun kabupaten/kota dalam kawasan bukan andalan yang menjadikannya sebagai sektor unggulan, yaitu sektor industri pengolahan. Urutan sektor yang paling banyak menjadi sektor unggulan dalam kawasan bukan andalan adalah sektor jasa-jasa terdapat 14 kabupaten/kota, sektor pertanian terdapat 13 kabupaten/kota, sektor pertambangan dan penggalian terdapat 9 kabupaten/kota, sektor konstruksi terdapat 9 kabupaten/kota, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan terdapat 7 kabupaten/kota, sektor pengangkutan dan komunikasi terdapat 5 kabupaten/kota.

Sama dengan yang ada dalam kawasan andalan, posisi sektor unggulan di kawasan bukan andalan berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya sektor yang keunggulan daya saingnya dimiliki sendiri-sendiri oleh masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan daya saing atau keunggulan sektor tersebut sangat memungkinkan dilakukannya pola spesialisasi produksi antardaerah, sehingga akan membuka peluang terciptanya pertukaran komoditas sesuai dengan kemutuan masing-masing daerah.

#### **4.3.3. Spesialisasi Antardaerah di Kawasan Andalan, Antardaerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan, maupun Antar Kawasan Bukan Andalan**

Hasil indeks spesialisasi daerah atas dasar lapangan usaha kabupataen/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdapat pada Lampiran 17 sampai dengan Lampiran 18 dapat digunakan menentukan hasil indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan, antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan maupun antar kawasan bukan andalan.

##### **4.3.3.1. Spesialisasi Antardaerah di Kawasan Andalan**

Hasil indeks spesialisasi daerah atas dasar lapangan usaha kabupataen/kota di Provinsi Jawa Timur yang terdapat pada Lampiran 12 dapat digunakan menentukan hasil indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan seperti yang tersebut pada tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12. : Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001

Ko de Kab	Kabupaten/Kota																					
	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	22	23	24	25	26	30	32	33	34	35	37
4	0.0 0	0.4 0	0.3 2	0.8 0	0.6 2	0.6 0	0.3 5	0.5 1	0.4 6	0.9 4	0.4 8	0.5 1	0.6 6	0.5 8	0.7 4	0.5 2	1.2 0	0.5 6	0.4 9	0.4 7	0.5 1	0.6 3
6		0.0 0	0.1 9	0.3 0	0.3 2	0.3 2	0.2 4	0.3 3	0.2 2	1.0 2	0.4 7	0.2 5	0.5 0	0.2 9	0.8 2	1.2 6	0.8 1	0.6 7	0.7 1	0.7 9	0.7 7	
7		0.0 0	0.4 3	0.4 2	0.4 9	0.2 5	0.2 9	0.3 5	0.2 2	0.9 7	0.4 2	0.2 7	0.4 3	0.3 9	0.7 5	0.3 1	1.2 0	0.7 8	0.6 8	0.6 5	0.7 1	0.6 4
8		0.0 6	0.2 4	0.2 4	0.2 0	0.4 4	0.3 0	0.7 2	0.7 8	0.4 3	0.2 1	0.5 4	0.5 6	0.7 0	0.4 4	0.7 6	0.8 2	0.7 9	0.8 4	0.8 7	0.8 6	
10			0.0 4	0.2 4	0.4 2	0.3 6	0.6 3	0.8 5	1.1 2	0.6 6	0.2 4	0.6 7	0.2 8	0.9 3	0.3 3	1.3 8	1.0 4	0.8 8	0.9 7	0.9 5	1.0 4	
11			0.0 0	0.5 2	0.3 4	0.5 6	0.5 1	0.7 1	1.2 8	0.7 7	0.2 0	0.8 3	0.2 3	1.0 3	0.3 3	1.4 0	1.0 2	0.9 5	0.9 0	0.9 6	1.1 0	
12				0.0 0	0.3 6	0.4 4	1.0 2	0.0 0	0.3 8	0.5 2	0.4 2	0.8 4	0.3 4	0.4 0	0.8 8	0.5 5	0.5 5	0.6 5	0.6 2	0.6 5	0.7 5	
13					0.0 0	0.4 1	0.9 6	0.5 2	0.2 5	0.3 6	0.3 8	0.7 6	0.3 4	0.3 4	1.2 8	0.9 6	0.8 6	0.7 5	0.8 4	0.8 6	0.8 9	
14						0.0 0	0.7 2	0.1 8	0.4 9	0.4 8	0.5 4	0.5 1	0.5 5	0.5 2	0.5 7	0.8 8	0.5 5	0.5 0	0.7 5	0.8 0	0.8 4	
15							0.0 0	0.5 6	1.1 1	0.9 7	1.2 4	0.3 5	1.1 5	0.4 4	0.8 6	0.7 0	0.8 6	0.9 0	0.9 1	0.9 2		
16								0.0 0	0.6 1	0.5 4	0.7 1	0.3 8	0.6 8	0.8 0	0.5 1	0.6 0	0.6 0	0.6 0	0.6 1	0.5 4		
22									0.0 0	0.6 1	0.2 6	0.9 2	0.1 4	1.4 0	0.9 8	0.8 8	0.8 4	0.8 8	0.8 8	0.8 2		
23										0.0 0	0.7 0	0.7 0	0.6 7	1.2 8	1.0 8	0.8 3	0.8 3	0.8 8	0.8 3	0.8 4		
24											0.0 0	1.0 3	0.1 9	1.4 2	1.0 2	0.9 2	0.8 0	0.8 0	0.9 0	1.0 6		
25												0.0 0	1.0 1	0.6 0	0.6 4	0.7 0	0.6 0	0.8 3	0.8 4	0.8 8		
26													0.0 0	1.4 6	0.9 3	0.8 2	0.7 5	0.7 2	0.8 4	0.9 2		
30														0.0 0	0.8 2	1.1 9	1.1 9	1.1 7	0.8 4			
32															0.3 0	0.4 8	0.3 2	0.3 8	0.2 6	0.2 6		
33																0.0 0	0.3 2	0.2 8	0.3 7			
34																	0.0 0	0.1 5	0.3 8			
35																		0.0 0	0.4 0			
37																			0.0 0			

Sumber : Lampiran 12 (diolah)

Tabel 4.12 yang merupakan pengolahan indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan pada tahun pertama penelitian, yaitu tahun 2001 dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah terdapat perubahan hasil indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan pada tahun pertama penelitian, yaitu tahun 2001 dan tahun terakhir penelitian, yaitu tahun 2005. Untuk itu kita perlu melihat hasil indeks spesialisasi sektor atas dasar lapangan usaha antardaerah kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur tahun 2005, seperti yang tersebut pada tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13. : Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005

Ko de Ka d	Kabupaten/Kota																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	22	23	24	25	26	30	32	33	34	35	37
4	0.00	40.91	0.61	0.84	0.60	0.36	50.47	0.00	0.92	48.51	0.00	0.57	57.57	0.00	0.73	52.52	1.15	0.56	46.46	0.00	53.53	0.00	42.42	
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	46.27	44.27	29.81	27.16	16.80	59.59	71.71	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sumber : Lampiran 13 (diolah)

Dari Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 terlihat bahwa terdapat kenaikan maupun penurunan indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan dibeberapa kabupaten dan kota maka untuk lebih jelas melihat perubahan indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan seperti yang tersebut pada tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14. : Perubahan Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2001 ke Tahun 2005

No	Kabupaten/Kota	Naik	Turun
1	Kab. Tulungagung	Kab.Jember, Kab.Banyuwangi, Kab.Situbondo, Kab.Pasuruan, K.Mojokerto, K.Surabaya	Kab.Malang, Kab.Probolinggo, Kab.Sidoarjo, Kab.Tuban, Kab.Lamongan, Kab.Gresik, K.Kediri, K.Malang, K.Probolinggo, K.Pasuruan
2	Kab. Kediri	Kab.Pasuruan, Kab.Bojonegoro, Kab.Bangkalan, K.Probolinggo	Kab.Malang, Kab.Jember, Kab.Situbondo, Kab.Probolinggo, Kab.Sidoarjo, Kab.Mojokerto, Kab.Tuban, Kab.Gresik, K.Kediri, K.Malang, K.Mojokerto
3	Kab. Malang	K.Pasuruan, K.Mojokerto	Kab.Jember, Kab.Bondowoso, Kab.Probolinggo, Kab.Pasuruan, Kab.Sidoarjo, Kab.Mojokerto, Kab.Tuban, Kab.Gresik, Kab.Bangkalan, K.Kediri, K.Malang, K.Probolinggo, K.Surabaya
4	Kab. Jember	Kab.Sidoarjo, Kab.Mojokerto, Kab.Gresik, K.Kediri, K.Malang, K.Probolinggo, K.Pasuruan, K.Mojokerto	Kab.Banyuwangi, Kab.Bondowoso, Kab.Situbondo, Kab.Probolinggo, Kab.Pasuruan, Kab.Bojonegoro, Kab.Tuban, Kab.Lamongan, Kab.Bangkalan
5	Kab. Banyuwangi	Kab.Pasuruan, K.Pasuruan, K.Mojokerto, K.Suirabaya	Kab.Bondowoso, Kab.Tuban, K.Probolinggo
6	Kab. Bondowoso	Kab.Pasuruan, Kab.Bojonegoro, K.Mojokerto	Kab.Situbondo, Kab.Probolinggo, Kab.Sidoarjo, Kab.Mojokerto, Kab.Tuban, K.Malang, K.Probolinggo, K.Pasuruan, K.Surabaya
7	Kab. Situbondo	Kab.Pasuruan, Kab.Mojokerto, Kab.Gresik, Kab.Bangkalan, K.Pasuruan, K.Mojokerto	Kab.Probolinggo, Kab.Sidoarjo Kab.Bojonegoro, Kab.Tuban, Kab.Lamongan, K.Probolinggo, K.Surabaya
8	Kab. Probolinggo	K.Pasuruan, K.Surabaya	Kab.Pasuruan, Kab.Mojokerto, Kab.Bojonegoro, Kab.Tuban, Kab.Lamongan, Kab.Bangkalan, K.Kediri, K.Malang, K.Probolinggo, K.Mojokerto
9	Kab. Pasuruan	Kab.Lamongan, K.Probolinggo, K.Pasuruan, K.Mojokerto	Kab.Sidoarjo, Kab.Mojokerto, Kab.Bojonegoro, Kab.Tuban, Kab.Gresik, K.Kediri, K.Malang, K.Surabaya
10	Kab. Sidoarjo	K.Probolinggo, K.Mojokerto, K.Surabaya	Kab.Mojokerto, Kab.Tuban, Kab.Lamongan, Kab.Bangkalan, K.Kediri, K.Malang, K.Pasuruan
11	Kab. Mojokerto	K.Probolinggo, K.Mojokerto	Kab.Tuban, Kab.Lamongan, Kab.Gresik, Kab.Bangkalan, K.Pasuruan, K.Surabaya
12	Kab. Bojonegoro	Kab.Lamongan, Kab.Bangkalan, K.Pasuruan, K.Surabaya	Kab.Tuban, K.Malang, K.Probolinggo, K.Mojokerto
13	Kab. Tuban	K.Mojokerto	Kab.Lamongan, Kab.Gresik, Kab.Bangkalan, K.Kediri, K.Malang, K.Probolinggo, K.Pasuruan, K.Surabaya
14	Kab. Lamongan	Kab.Bangkalan	Kab.Gresik, K.Malang, K.Probolinggo, K.Pasuruan, K.Surabaya
15	Kab. Gresik	K.Probolinggo, K.Mojokerto, K.Surabaya	Kab.Bangkalan, K.Kediri, K.Malang, K.Pasuruan
16	Kab. Bangkalan	-	K.Kediri, K.Probolinggo
17	K. Kediri	K.Probolinggo, K.Mojokerto	K.Malang
18	K. Malang	K.Mojokerto	K.Pasuruan, K.Surabaya
19	K. Probolinggo	K.Surabaya	K.Pasuruan, K.Mojokerto
20	K. Pasuruan	-	K.Mojokerto, K.Surabaya
21	K. Mojokerto	K.Surabaya	-

Sumber : Lampiran 12 dan Lampiran 13 (diolah)

Dari Tabel 4.14 terlihat bahwa terdapat kenaikan indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan dibeberapa kabupaten dan kota. Kenaikan indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan tersebut menunjukkan semakin terspesialisasinya sektor lapangan usaha dibeberapa kabupaten/kota tersebut. Sementara itu dibeberapa daerah antardaerah kawasan andalan belum menunjukkan adanya spesialisasi, dimana hal tersebut ditunjukkan melalui penurunan nilai indeks spesialisasi yang terdapat dibeberapa kabupaten dan kota.

#### **4.3.3.2. Spesialisasi Antardaerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan**

Pada Tabel 4.15 merupakan hasil indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan pada tahun pertama penelitian, yaitu tahun 2001 dimana dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah terdapat perubahan hasil indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan pada tahun pertama penelitian, yaitu tahun 2001 dan tahun terakhir penelitian, yaitu tahun 2005. Hasil indeks spesialisasi daerah atas dasar lapangan usaha kabupataen/kota di Provinsi Jawa Timur yang dapat digunakan menentukan hasil indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan seperti yang tersebut pada Tabel 4.15 sebagai berikut :

**Tabel 4.15. : Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001**

Kabupaten/Kota	Kode Kab	Kabupaten/Kota															
		1	2	3	5	8	17	18	19	20	21	27	28	29	31	36	
Kabupaten Tulungagung	4				0.63	0.36	0.43	0.36	0.58	0.54	0.45	0.82	0.83	0.79	0.53	0.63	
Kabupaten Kediri	6					0.24	0.20	0.28	0.37	0.29	0.22	0.51	0.55	0.45	0.72	0.84	
Kabupaten Malang	7					0.23	0.22	0.30	0.35	0.29	0.30	0.80	0.80	0.55	0.60	0.70	
Kabupaten Jember	9						0.35	0.50	0.42	0.47	0.40	0.37	0.45	0.77	0.87	0.99	
Kabupaten Banyuwangi	10						0.31	0.42	0.41	0.43	0.33	0.36	0.45	0.31	0.65	1.04	
Kabupaten Bondowoso	11							0.33	0.41	0.43	0.33	0.28	0.28	0.31	0.28	0.78	0.94
Kabupaten Situbondo	12							0.22	0.10	0.44	0.40	0.34	0.68	0.71	0.60	0.70	0.90
Kabupaten Probolinggo	13							0.22	0.32	0.28	0.27	0.29	0.45	0.52	0.41	0.76	0.80
Kabupaten Pasuruan	14							0.41	0.46	0.59	0.49	0.50	0.73	0.80	0.68	0.77	0.88
Kabupaten Sidoarjo	15							1.04	1.12	1.20	1.19	1.20	1.28	1.38	1.23	1.02	0.80
Kabupaten Mojokerto	16							0.52	0.59	0.70	0.63	0.65	0.88	0.91	0.81	0.82	0.73
Kabupaten Bojonegoro	22												0.40	0.38	0.38	0.66	0.82
Kabupaten Tuban	23												0.55	0.80	0.63	0.88	0.88
Kabupaten Lamongan	24												0.34	0.40	0.35	0.79	1.02
Kabupaten Gresik	25												1.14	1.22	1.12	0.87	0.76
Kabupaten Bangkalan	26												0.43	0.40	0.41	0.66	0.67
Kota Kediri	30															1.31	1.08
Kota Malang	32																0.57
Kota Probolinggo	33																0.52
Kota Pasuruan	34																0.43
Kota Mojokerto	35																0.49
Kota Surabaya	37																

Sumber : Lampiran 12 (diolah)

Untuk melakukan perbandingan antara tahun pertama penelitian dan tahun terakhir penelitian maka kita juga perlu melihat hasil indeks spesialisasi sektor atas dasar lapangan usaha antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan di Provinsi Jawa Timur pada tahun terakhir penelitian, yaitu tahun 2005, seperti yang tersebut pada Tabel 4.16 sebagai berikut :

**Tabel 4.16. : Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005**

<b>Kabupaten /Kota</b>	<b>Kode Kab</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>														
		1	2	3	5	8	17	18	19	20	21	27	28	29	31	36
<b>Kabupaten Tulungagung</b>	4				0.64	0.35	0.43	0.39	0.53	0.54	0.44	0.81	0.84	0.82	0.50	0.61
<b>Kabupaten Kediri</b>	6					0.23	0.20	0.27	0.34	0.27	0.22	0.49	0.54	0.51	0.73	0.52
<b>Kabupaten Malang</b>	7					0.22	0.22	0.32	0.32	0.30	0.31	0.58	0.61	0.60	0.62	0.69
<b>Kabupaten Jember</b>	9						0.31	0.36	0.39	0.35	0.29	0.26	0.35	0.25	0.84	0.97
<b>Kabupaten Banyuwangi</b>	10					0.30	0.42	0.42	0.42	0.32	0.36	0.44	0.33	0.65	1.04	
<b>Kabupaten Bondowoso</b>	11						0.34	0.41	0.43	0.33	0.28	0.27	0.31	0.31	0.81	0.94
<b>Kabupaten Situbondo</b>	12						0.21	0.10	0.41	0.37	0.32	0.64	0.71	0.62	0.70	0.92
<b>Kabupaten Probolinggo</b>	13						0.24	0.32	0.32	0.28	0.28	0.42	0.51	0.42	0.76	0.80
<b>Kabupaten Pasuruan</b>	14						0.42	0.48	0.58	0.50	0.52	0.72	0.79	0.74	0.78	0.65
<b>Kabupaten Sidoarjo</b>	15						1.04	1.11	1.19	1.17	1.17	1.31	1.39	1.30	1.00	0.75
<b>Kabupaten Mojokerto</b>	16						0.51	0.58	0.87	0.62	0.64	0.63	0.90	0.82	0.83	0.71
<b>Kabupaten Bojonegoro</b>	22											0.38	0.40	0.42	0.66	0.84
<b>Kabupaten Tuban</b>	23											0.54	0.77	0.54	0.85	0.83
<b>Kabupaten Lamongan</b>	24											0.32	0.40	0.39	0.60	1.02
<b>Kabupaten Gresik</b>	25											1.14	1.23	1.17	0.85	0.78
<b>Kabupaten Bangkalan</b>	26											0.43	0.41	0.46	0.84	0.85
<b>Kota Kediri</b>	30														1.28	1.04
<b>Kota Malang</b>	32															0.54
<b>Kota Probolinggo</b>	33															0.52
<b>Kota Pasuruan</b>	34															0.44
<b>Kota Mojokerto</b>	35															0.51
<b>Kota Surabaya</b>	37															
<b>Kota Batu</b>	38															

Sumber : Lampiran 13 (diolah)

Dari Tabel 4.15 dan Tabel 4.16 terlihat bahwa terdapat kenaikan maupun penurunan indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan dibeberapa kabupaten dan kota maka untuk lebih jelas melihat perubahan indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan seperti yang tersebut pada tabel 4.17 sebagai berikut :

**Tabel 4.17. : Perubahan Indeks Spesialisasi Sektor Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Andalan dengan Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2001 ke Tahun 2005**

No	Kabupaten/Kota	Naik	Turun
1	Kab. Tulungagung	Kab.Bitar, Kab.Nganjuk, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep	Kab.Lumajang, Kab.Madiun, Kab.Ngawi, Kab.Sampang, K.Bitar, K.Madiun
2	Kab. Kediri	Kab.Sumenep, K.Bitar, K.Madiun	Kab.Lumajang, Kab.Nganjuk, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan
3	Kab. Malang	Kab.Nganjuk, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep, K.Bitar	Kab.Lumajang, Kab.Madiun, Kab.Sampang, K.Bitar
4	Kab. Jember	-	Kab.Jombang, Kab.Nganjuk, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep, K.Bitar, K.Madiun
5	Kab. Banyuwangi	Kab.Sumenep	Kab.Jombang, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan
6	Kab. Bondowoso	Kab.Jombang, Kab.Sumenep, K.Bitar	Kab.Sampang
7	Kab. Situbondo	K.Madiun	Kab.Jombang, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Sampang, Kab.Sumenep
8	Kab. Probolinggo	Kab.Jombang, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Sumenep	Kab.Ngawi, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan
9	Kab. Pasuruan	Kab.Jombang, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Sumenep, K.Bitar	Kab.Madiun, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan, K.Madiun
10	Kab. Sidoarjo	Kab.Sampang, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep	Kab.Jombang, Kab.Nganjuk, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan
11	Kab. Mojokerto	Kab.Sumenep, K.Bitar	Kab.Sampang
12	Kab. Bojonegoro	Kab.Sumenep, Kab.Pamekasan, K.Madiun	Kab.Sampang
13	Kab. Tuban	-	Kab.Sampang, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep, K.Bitar, K.Madiun
14	Kab. Lamongan	Kab.Sumenep, K.Bitar	Kab.Sampang
15	Kab. Gresik	Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep	K.Bitar
16	Kab. Bangkalan	Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep	K.Bitar, K.Madiun
17	K. Kediri	-	K.Bitar
18	K. Malang	-	K.Madiun
19	K. Pasuruan	K.Madiun	-
20	K. Mojokerto	K.Madiun	-

Sumber : Lampiran 12 dan Lampiran 13

Dari Tabel 4.17 terlihat bahwa terdapat kenaikan indeks spesialisasi antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan menunjukkan semakin terspesialisasinya kegiatan sektor lapangan usaha pada beberapa kabupaten/kota. Sementara itu dibeberapa daerah antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan belum menunjukkan adanya spesialisasi, dimana hal tersebut ditunjukkan melalui penurunan nilai indeks spesialisasi. Penurunan tersebut berakibat semakin terdiversifikasinya sektor lapangan usaha antardaerah kawasan andalan dengan kawasan bukan andalan. Penurunan nilai indeks spesialisasi terdapat dikabupaten/kota berikut.

#### **4.3.3.3. Spesialisasi Antardaerah Kawasan Bukan Andalan**

Pada Tabel 4.18 merupakan hasil indeks spesialisasi antardaerah kawasan bukan andalan pada tahun pertama penelitian, yaitu tahun 2001 dimana dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah terdapat perubahan hasil indeks spesialisasi antardaerah kawasan bukan andalan pada tahun pertama penelitian, yaitu tahun 2001 dan tahun terakhir penelitian, yaitu tahun 2005. Hasil indeks spesialisasi daerah atas dasar lapangan usaha kabupataen/kota di Provinsi Jawa Timur yang dapat digunakan menentukan hasil indeks spesialisasi antardaerah kawasan bukan andalan seperti yang tersebut pada Tabel 4.18 sebagai berikut :

**Tabel 4.18. : Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001**

<b>Kabupaten /Kota</b>	<b>Kode Kab</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>														
		1	2	3	5	8	17	18	19	20	21	27	28	29	31	36
Kabupaten Pacitan	1	0.00	0.40	0.41	0.44	0.49	0.46	0.60	0.31	0.37	0.36	0.37	0.32	0.35	0.82	0.83
Kabupaten Ponorogo	2		0.00	0.30	0.42	0.34	0.24	0.32	0.21	0.26	0.21	0.56	0.55	0.54	0.60	0.76
Kabupaten Trenggalek	3			0.00	0.49	0.42	0.36	0.41	0.29	0.25	0.34	0.55	0.51	0.53	0.64	0.74
Kabupaten Blitar	5				0.00	0.46	0.34	0.40	0.31	0.37	0.30	0.22	0.29	0.18	0.88	1.09
Kabupaten Lumajang	8					0.00	0.32	0.36	0.40	0.39	0.37	0.56	0.63	0.63	0.71	0.70
Kabupaten Jombang	17						0.00	0.20	0.29	0.23	0.16	0.47	0.52	0.45	0.64	0.85
Kabupaten Nganjuk	18							0.00	0.35	0.30	0.25	0.56	0.66	0.52	0.76	0.97
Kabupaten Madiun	19								0.00	0.12	0.24	0.43	0.47	0.44	0.68	0.82
Kabupaten Magetan	20									0.00	0.18	0.51	0.50	0.52	0.59	0.77
Kabupaten Ngawi	21										0.00	0.45	0.42	0.44	0.67	0.87
Kabupaten Sampang	27										0.00	0.28	0.14	1.03	1.19	
Kabupaten Pamekasan	28											0.00	0.26	0.96	1.10	
Kabupaten Sumenep	29											0.00	1.04	1.18		
Kota Blitar	31												0.00	0.00	0.45	
Kota Madiun	36												0.00			

Sumber : Lampiran 12 (diolah)

Indeks spesialisasi kawasan bukan andalan tahun 2005, pada Tabel 4.20 :

**Tabel 4.19. : Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005**

<b>Kabupaten /Kota</b>	<b>Kode Kab</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>															
		1	2	3	5	8	17	18	19	20	21	27	28	29	31	36	
Kabupaten Pacitan	1		0.43	0.41	0.45	0.50	0.48	0.62	0.34	0.41	0.40	0.38	0.32	0.39	0.84	0.94	
Kabupaten Ponorogo	2			0.30	0.43	0.32	0.22	0.31	0.22	0.24	0.22	0.56	0.58	0.60	0.59	0.74	
Kabupaten Trenggalek	3				0.00	0.50	0.36	0.32	0.41	0.28	0.24	0.33	0.55	0.51	0.58	0.60	0.79
Kabupaten Blitar	5					0.00	0.44	0.36	0.40	0.35	0.37	0.31	0.20	0.30	0.21	0.92	1.10
Kabupaten Lumajang	8						0.00	0.38	0.34	0.39	0.36	0.35	0.54	0.61	0.56	0.71	0.73
Kabupaten Jombang	17							0.00	0.20	0.28	0.22	0.17	0.48	0.54	0.51	0.62	0.64
Kabupaten Nganjuk	18								0.00	0.37	0.32	0.27	0.59	0.66	0.60	0.72	0.96
Kabupaten Madiun	19									0.00	0.12	0.19	0.48	0.47	0.52	0.64	0.83
Kabupaten Magetan	20										0.16	0.50	0.50	0.56	0.58	0.80	
Kabupaten Ngawi	21										0.00	0.44	0.43	0.48	0.66	0.86	
Kabupaten Sampang	27											0.00	0.28	0.10	1.06	1.18	
Kabupaten Pamekasan	28												0.00	0.30	0.97	1.10	
Kabupaten Sumenep	29												0.00	0.00	1.24		
Kota Blitar	31													0.00	0.42		
Kota Madiun	36																

Sumber : Lampiran 13 (diolah)

Dari Tabel 4.18 dan Tabel 4.19 terlihat bahwa terdapat kenaikan maupun penurunan indeks spesialisasi antardaerah kawasan bukan andalan dibeberapa kabupaten dan kota maka untuk lebih jelas melihat perubahan indeks spesialisasi antardaerah kawasan bukan andalan seperti yang tersebut pada tabel 4.20 sebagai berikut :

Tabel 4.20. : Perubahan Indeks Spesialisasi Sektor Atas Dasar Lapangan Usaha Antardaerah Kawasan Bukan Andalan Di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2001 ke Tahun 2005

No	Kabupaten/Kota	Naik	Turun
1	Kab. Pacitan	Kab.Ponorogo, Kab.Bitar, Kab.Lumajang, Kab.Jombang, Kab.Nganjuk, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Sampang, Kab.Sumenep, K.Bitar, K.Madiun	
2	Kab. Ponorogo	Kab.Bitar, Kab.Madiun, Kab.Ngawi, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep	Kab.Lumajang, Kab.Jombang, Kab.Nganjuk, Kab.Magetan, K.Bitar, K.Madiun
3	Kab. Trenggalek	Kab.Bitar, Kab.Sumenep, K.Madiun	Kab.Lumajang, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Jombang, K.Bitar
4	Kab. Blitar	Kab.Jombang, Kab.Madiun, Kab.Ngawi, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep, K.Bitar, K.Madiun	Kab.Lumajang, Kab.Sampang
5	Kab. Lumajang	Kab.Jombang, Kab.Sumenep	Kab.Nganjuk, Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan, K.Madiun
6	Kab. Jombang	Kab.Ngawi, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep	Kab.Madiun, Kab.Magetan, K.Bitar, K.Madiun
7	Kab. Nganjuk	Kab.Madiun, Kab.Magetan, Kab.Ngawi, Kab.Sampang, Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep	K.Bitar, K.Madiun
8	Kab. Madiun	Kab.Sampang, Kab.Sumenep, K.Madiun	Kab.Ngawi, K.Bitar
9	Kab. Magetan	Kab.Sumenep, K.Madiun	Kab.Ngawi, Kab.Sampang, K.Bitar
10	Kab. Ngawi	Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep, K.Madiun	Kab.Sampang, K.Bitar
11	Kab. Sampang	K.Bitar	Kab.Pamekasan, Kab.Sumenep, K.Madiun
12	Kab. Pamekasan	Kab.Sumenep, K.Bitar	
13	Kab. Sumenep	K.Bitar, K.Madiun	
14	Kota Blitar		K.Madiun

Sumber : Lampiran 12 dan Lampiran 13 (diolah)

Dari Tabel 4.20 terlihat bahwa terdapat kenaikan indeks spesialisasi antardaerah kawasan bukan andalan menunjukkan semakin terspesialisasinya kegiatan sektor lapangan usaha pada beberapa kabupaten/kota. Sementara itu dibeberapa daerah antardaerah kawasan bukan andalan belum menunjukkan adanya spesialisasi, dimana hal tersebut ditunjukkan melalui penurunan nilai indeks spesialisasi. Penurunan tersebut berakibat semakin terdiversifikasinya sektor lapangan usaha kawasan bukan andalan yang terdapat dikabupaten/kota.

#### 4.3.4. Ketepatan penetapan kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur

Kebijakan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur tentang penetapan kawasan andalan dan kawasan bukan andalan berdasarkan hasil analisis logit atau *Binary Logistic Regression*, terlihat kemampuan prediksi dari model yang cukup bagus di mana tingkat sukses total sebesar 63,20% dengan 69,60% kawasan andalan dan 53,30% kawasan bukan andalan mampu diprediksi secara benar. Maka kebijakan penetapan kawasan andalan dapat dipandang sangat tepat dalam upaya melaksanakan pemerataan pembangunan diseluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Seperti dapat dilihat pada Tabel 4.21. sebagai berikut :

**Tabel 4.21 : Klasifikasi Kemampuan Prediksi Variabel Bebas Terhadap Kawasan Andalan dan Kawasan Bukan Andalan Provinsi Jawa Timur**

Observed	Predicted			Percentage Correct	
	Kawasan		Andalan		
	Bukan Andalan				
Step 1 Kawasan	8	7	7	53.30	
	5	18	18	78.30	
				68.40	
Step 2 Kawasan	8	7	7	53.30	
	5	18	18	78.30	
				68.40	
Step 3 Kawasan	8	7	7	53.30	
	7	16	16	69.60	
				63.20	

Sumber : Lampiran 15 (diolah)

Walaupun secara statistik prediksi model menunjukkan hasil yang cukup bagus akan tetapi terjadi perubahan kategori dimana daerah yang masuk dalam kawasan andalan berubah menjadi kawasan bukan andalan dan daerah yang masuk dalam kawasan bukan andalan berubah menjadi kawasan andalan. Kabupaten dan kota yang berubah kategori seperti yang terlihat pada Tabel 4.22 sebagai berikut :

**Tabel 4.22 : Kabupaten dan Kota yang Berubah dari Kawasan Andalan ke Kawasan Bukan Andalan dan Kabupaten dan Kota yang Berubah dari Kawasan Bukan Andalan ke Kawasan Andalan**

Kawasan Andalan ke Kawasan Bukan Andalan	Kawasan Bukan Andalan ke Kawasan Andalan
1. Kabupaten Kediri	1. Kabupaten Blitar
2. Kabupaten Situbondo	2. Kabupaten Lumajang
3. Kabupaten Bondowoso	3. Kabupaten Jombang
4. Kabupaten Pasuruan	4. Kabupaten Magetan
5. Kabupaten Bojonegoro	5. Kabupaten Sumenep
6. Kabupaten Lamongan	6. Kota Blitar
7. Kabupaten Bangkalan	7. Kota Madiun

Sumber : Lampiran 15 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.22 menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan perubahan kebijakan kawasan andalan dengan mengubah susunan kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori kawasan andalan. Perubahan kebijakan kawasan andalan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil analisis logit atau *Binary Logistic Regression* adalah sebagai berikut : (1). Kabupaten Tulungagung (2). Kabupaten Blitar (3). Kabupaten Malang (4). Kabupaten Lumajang (5). Kabupaten Jember (6). Kabupaten Banyuwangi (7). Kabupaten Probolinggo (8). Kabupaten Sidoarjo (9). Kabupaten Mojokerto (10). Kabupaten Jombang (11). Kabupaten Magetan (12). Kabupaten Tuban (13). Kabupaten Gresik (14). Kabupaten Sumenep (15) Kota Kediri (16). Kota Blitar (17). Kota Malang (18). Kota Probolinggo (19). Kota Pasuruan (20). Kota Mojokerto (21). Kota Madiun (22). Kota Surabaya (23). Kota Batu.

Selanjutnya akan terjadi perubahan susunan kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori kawasan andalan. Susunan kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori kawasan bukan andalan yang baru berdasarkan hasil analisis logit atau *Binary Logistic Regression* adalah sebagai berikut : (1). Kabupaten Pacitan (2). Kabupaten Ponorogo (3). Kabupaten Trenggalek (4). Kabupaten Kediri (5). Kabupaten Bondowoso (6). Kabupaten Situbondo (7). Kabupaten Pasuruan (8). Kabupaten Nganjuk (9). Kabupaten Madiun (10). Kabupaten Ngawi (11). Kabupaten Bojonegoro (12). Kabupaten Lamongan (13). Kabupaten Bangkalan (14). Kabupaten Sampang (15). Kabupaten Pamekasan

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Simpulan**

1. Posisi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam kategori kawasan andalan dan kawasan bukan andalan berdasarkan hasil Tipologi Klassen menunjukkan bahwa dari dua puluh tiga kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan andalan 6 kabupaten/kota masuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh, 1 kota masuk kategori daerah maju tapi tertekan, 10 kabupaten/kota masuk kategori daerah berkembang cepat dan 6 kabupaten masuk dalam daerah relatif tertinggal. Kabupaten/kota yang bukan kawasan andalan, 5 kabupaten/kota masuk daerah berkembang cepat, dan 10 kabupaten masuk kategori daerah relatif tertinggal.
2. Subsektor ekonomi unggulan yang potensial untuk dikembangkan di kawasan andalan dan kawasan bukan andalan berdasarkan hasil LQ menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan, memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa sektor lapangan usaha. Kawasan andalan dan kawasan andalan tidak memiliki sektor unggulan yang dominan, dimana tiap kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan memiliki sektor unggulan yang berbeda antara satu dengan

yang lain. Urutan sektor yang paling banyak menjadi sektor unggulan dalam kawasan andalan adalah sektor jasa-jasa 15 kabupaten/kota, sektor pertanian 15 kabupaten/kota, sektor listrik, gas, dan air bersih 11 kabupaten/kota, sektor pertambangan dan penggalian 10 kabupaten/kota, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 10 kabupaten/kota, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 10 kabupaten/kota, sektor pengangkutan dan komunikasi 8 kabupaten/kota, sektor industri pengolahan 7 kabupaten/kota, sektor konstruksi 6 kabupaten/kota. Urutan sektor yang paling banyak menjadi sektor unggulan dalam kawasan bukan andalan adalah sektor jasa-jasa 14 kabupaten/kota, sektor pertanian 13 kabupaten/kota, sektor pertambangan dan penggalian 9 kabupaten/kota, sektor konstruksi 9 kabupaten/kota, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 7 kabupaten/kota, sektor pengangkutan dan komunikasi 5 kabupaten/kota, sektor perdagangan, hotel, dan restoran 4 kabupaten/kota, sektor listrik, gas, dan air bersih 3 kabupaten/kota.

3. Hasil indeks spesialisasi daerah menunjukkan bahwa kawasan andalan sebagai daerah yang memiliki keterkaitan perekonomian sektoral dengan daerah lain masih lemah. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin terdeversifikasiya sektor lapangan usaha daerah-daerah kawasan andalan terhadap beberapa daerah lain di Provinsi Jawa Timur, bahkan terjadi penurunan tingkat spesialisasi antardaerah kawasan andalan.

4. Ketetapan penetapan kawasan andalan dan kawasan bukan andalan berdasarkan *Binary Logistic Regression*, terlihat kemampuan prediksi dari model yang cukup bagus di mana tingkat sukses total sebesar 63,20% dengan 69,60% kawasan andalan dan 53,30% kawasan bukan andalan mampu diprediksi secara benar. Tidak terjadi perubahan jumlah kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori kawasan andalan dan kawasan bukan andalan, 23 kabupaten dan kota masuk kawasan andalan dan 15 kabupaten masuk kawasan bukan andalan. Terjadi perubahan susunan kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan andalan dan yang masuk dalam kawasan bukan andalan. Kabupaten yang berubah dari kawasan andalan ke kawasan bukan andalan, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan. Kabupaten yang berubah dari kawasan bukan andalan ke kawasan andalan, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, Kota Madiun.

#### 4.2. Saran

1. Dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian, lebih diprioritaskan pada subsektor unggulan yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, subsektor lain tetap mendapat perhatian untuk dikembangkan secara proporsional sesuai dengan potensi dan pengembangannya. Pengembangan subsektor unggulan

hendaknya diarahkan untuk menciptakan keterkaitan antardaerah di Propinsi Jawa Timur yang memungkinkan terjadi pergerakan perekonomian secara bersama-sama melalui proses pertukaran komoditas antardaerah.

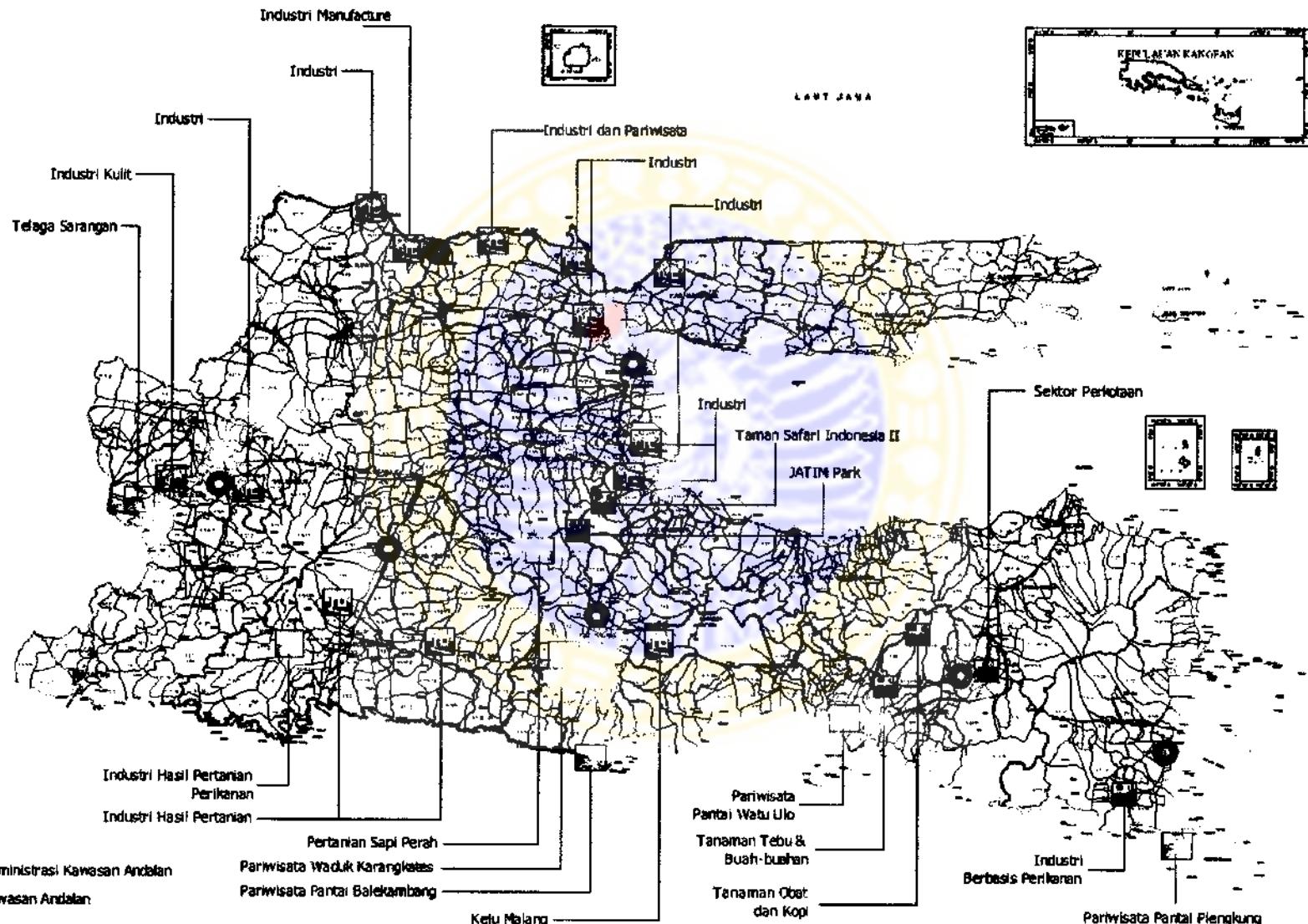
2. Diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap berjalannya fungsi kawasan andalan sebagai generator bagi pertumbuhan perekonomian wilayah dan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah sekitar.
3. Untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi pada kawasan andalan yang dikategorikan sebagai daerah relatif tertinggal, diperlukan adanya kebijakan yang dapat mendorong masuknya kegiatan investasi didaerah tersebut. Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan fasilitas insfrastruktur, sehingga dapat memangkas kelangkaan insfrastruktur yang menghambat laju investasi di daerah tersebut.
4. Selain menggunakan klasifikasi yang telah dilakukan pemerintah pusat berupa kawasan andalan dan kawasan bukan andalan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dapat menetapkan kebijakan pengklasifikasian daerah berdasarkan pada empat klasifikasi daerah berdasarkan tipologi daerah, yaitu cepat maju dan cepat tumbuh, maju tapi tertekan, berkembang cepat, dan relatif tertinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Produk Domestik Bruto Regional Provinsi Jawa Timur Per Kabupaten/Kota*. Surabaya : BPS.
- Ghalib, Rusli. 2005. *Ekonomi Regional*. Bandung : Pustaka Ramadhan.
- Hadi, Suprayogo. 2006. *Keterpaduan Kebijakan Antar Sektor dan Antar Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Andalan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Bappenas.
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE.
- Kamaludin, Rustian. 1999. *Pengantar Ekonomi Pembangunan Dilengkapi dengan Analisis Beberapa Aspek Kebijakan Pembangunan Nasional*. Jakarta: FEUI.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Nuryasman. 1996. Pengembangan Konsep Pusat Pertumbuhan : Terhadap Wilayah Kepulauan Indonesia, *Jurnal Media Ekonomi Volume 3 Nomor 3*. Jakarta: FEUI.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. 2007. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Bappeprov Jawa Timur.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)*. Bandung: Fokusmedia.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009*. Jakarta: Sinar Grafika
- Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Regional*. Edisi Revisi. Jakarta: FEUI.
- Santoso, Singgih. 2006. *Menguasai Statistik di Era Informasi dengan SPSS 15*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Tarigan, Robinson. 2005a. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2005b. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Bandung: Fokusmedia.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: CV. Laksana Mandiri.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

# LAMPIRAN 1 : PETA KAWASAN PENGEMBANGAN UTAMA PROVINSI JAWA TIMUR



Batas Administrasi Kawasan Andalan  
Pusat Kawasan Andalan

Skripsi

Studi Kebijakan Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur

Nurvi Rahma Dwi Sartika

**LAMPIRAN 2****PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2001 (jutaan rupiah)**

Kabupaten /Kota	SEKTOR								JUMLAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Pacitan	465,996.67	70,465.07	38,231.19	4,574.94	75,171.16	112,517.03	55,357.87	88,290.61	180,139.06	1,090,743.60
Ponorogo	706,667.47	82,755.87	177,058.89	17,166.08	182,744.86	584,596.92	103,553.34	125,220.24	304,856.56	2,284,622.23
Trenggalek	527,797.00	35,834.05	131,814.87	4,732.93	56,322.34	283,638.91	81,945.76	73,703.51	376,844.81	1,572,634.18
Tulungagung	1,022,412.29	128,304.31	847,996.73	35,775.71	107,837.18	1,538,902.78	149,670.65	574,696.05	647,900.94	5,053,496.64
Blitar	1,941,932.14	123,936.41	111,466.15	20,109.87	62,580.16	943,269.87	80,195.10	210,715.04	417,234.52	3,911,439.26
Kediri	1,831,012.71	139,169.17	770,943.31	15,255.41	52,880.45	1,095,415.87	107,861.75	216,972.73	485,673.34	4,715,184.74
Malang	3,082,011.03	246,047.06	1,590,552.37	131,637.23	129,233.77	2,261,833.98	412,228.38	367,849.45	1,436,185.86	9,657,579.13
Lumajang	1,367,109.55	135,961.33	650,662.19	29,781.04	158,788.07	782,212.83	121,073.19	337,017.06	321,769.93	3,904,375.19
Jember	3,314,487.44	372,443.84	555,449.53	50,392.06	200,657.36	1,335,477.86	279,583.44	435,221.46	711,274.89	7,254,987.88
Banyuwangi	3,445,798.83	316,121.20	461,481.01	39,185.67	21,847.56	1,620,763.90	349,585.46	424,001.09	425,966.59	7,104,751.31
Bondowoso	772,356.19	5,564.75	109,088.85	6,658.88	43,055.91	279,593.94	29,230.72	133,327.23	176,027.12	1,554,903.59
Situbondo	773,240.29	47,660.00	261,458.69	18,802.36	59,884.43	839,563.92	109,387.86	94,498.31	201,810.70	2,406,306.56
Probolinggo	1,810,756.31	176,697.85	618,314.57	53,045.43	295,318.47	839,008.47	148,316.45	166,153.85	440,248.70	4,547,860.10
Pasuruan	1,240,437.16	900.88	1,314,573.07	68,756.15	84,706.82	917,398.16	114,958.37	159,069.18	461,199.85	4,361,999.64
Sidoarjo	867,493.94	502,938.44	10,520,865.86	235,031.67	400,010.39	3,575,675.49	1,397,428.26	258,828.91	787,917.16	18,546,190.12
Mojokerto	955,926.98	64,010.23	1,454,769.57	34,432.10	84,019.68	868,169.04	158,183.42	139,569.67	297,186.65	4,056,267.34
Jombang	1,516,984.06	67,871.70	408,718.56	74,325.48	105,178.41	1,068,921.93	235,696.82	143,264.06	457,811.13	4,078,772.15
Nganjuk	1,136,877.48	63,132.22	296,000.73	9,698.07	78,925.17	1,118,933.90	65,854.03	128,112.02	335,624.82	3,233,158.44
Madiun	718,251.17	53,785.72	58,170.68	13,740.04	144,770.89	465,114.97	50,598.32	84,320.78	350,562.96	1,939,315.53
Magetan	839,277.06	14,802.40	162,818.79	16,042.21	137,606.38	522,288.55	40,773.88	88,015.05	421,955.32	2,243,579.64
Ngawi	867,445.82	13,808.08	133,284.52	9,634.54	86,349.64	573,843.16	63,832.33	104,478.84	301,839.47	2,154,516.40
Bojonegoro	1,611,363.02	79,933.68	255,699.37	28,138.88	120,459.67	870,551.63	178,510.79	203,431.25	643,763.77	3,991,852.06
Tuban	1,291,467.58	704,907.23	751,811.64	97,930.85	286,722.51	708,664.54	120,585.23	130,763.75	341,334.85	4,434,188.18
Lamongan	1,645,308.24	6,132.32	175,878.23	46,772.34	93,717.15	870,685.73	51,121.69	102,615.53	412,961.28	3,405,192.51
Gresik	1,175,264.32	232,632.09	4,700,624.63	369,625.13	533,265.49	2,058,910.25	208,792.98	387,952.87	206,075.83	9,873,143.59
Bangkalan	949,591.18	31,523.96	94,220.94	13,638.13	92,934.07	616,355.35	152,535.85	104,049.31	317,523.27	2,372,372.06
Sampang	1,017,252.15	179,636.86	18,195.59	11,879.60	61,608.43	305,169.59	41,146.92	67,847.55	218,603.15	1,921,339.84
Pamekasan	822,259.29	20,259.86	16,147.28	12,960.72	57,442.78	154,650.02	55,315.66	82,176.98	224,476.20	1,445,688.79
Sumenep	2,205,192.74	356,087.37	114,116.21	3,297.46	69,450.09	590,867.17	125,163.57	148,492.99	393,853.66	4,006,521.26
K. Kediri	36,351.51	1,034.92	13,885,459.67	27,335.61	28,133.65	3,435,385.15	109,882.48	479,612.23	169,141.00	18,172,336.22
K. Blitar	48,409.21	561.79	53,670.99	12,095.08	22,437.06	111,835.79	87,174.49	60,290.63	90,611.44	487,086.48
K. Malang	63,233.30	7,561.12	3,043,645.71	33,422.61	190,034.42	3,239,332.59	495,498.76	719,021.11	984,276.28	8,776,025.90
K. Probolinggo	119,442.44	376.42	272,429.00	23,016.05	4,441.92	452,668.75	185,983.52	85,414.04	112,859.47	1,256,631.61
K. Pasuruan	38,159.02	1,670.98	116,712.95	15,749.51	50,488.80	268,723.58	85,634.51	54,155.00	82,406.02	713,700.37
K. Mojokerto	10,106.03	-	133,223.39	24,320.22	41,601.80	314,990.01	117,313.37	58,425.42	93,255.37	793,235.61
K. Madiun	20,747.34	323.17	171,054.26	12,520.27	94,993.48	153,808.90	82,441.75	80,135.50	125,056.17	741,080.84
K. Surabaya	98,618.57	9,614.47	17,299,325.57	1,019,246.43	3,679,026.66	17,285,482.11	4,557,412.15	3,383,180.45	4,025,298.00	51,557,204.41
K. Batu	176,839.64	1,858.49	74,495.99	9,373.69	8,259.07	410,253.26	24,132.29	32,930.71	90,143.56	828,286.70
Jawa Timur	40,533,877.17	4,296,325.31	61,850,431.55	2,650,100.45	8,202,906.15	53,475,477.90	10,833,961.41	10,533,820.46	18,071,669.70	210,448,570.10

**LAMPIRAN 3****PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2002 (jutaan rupiah)**

Kabupaten /Kota	SEKTOR								JUMLAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Pacitan	468,726.91	74,329.70	38,731.07	5,656.43	75,224.87	118,288.01	56,088.76	89,784.27	186,445.86	1,113,275.88
Ponorogo	715,044.37	87,494.17	186,569.30	23,161.85	187,531.24	619,164.74	114,601.42	130,611.75	311,993.26	2,376,172.10
Trenggalek	539,581.56	38,965.86	135,261.15	5,509.76	57,605.50	303,168.71	84,695.97	75,154.37	385,208.33	1,625,151.21
Tulungagung	1,043,930.12	137,545.01	871,108.29	46,032.30	107,705.96	1,660,734.78	171,414.87	615,639.44	675,922.65	5,330,233.42
Blitar	1,978,737.00	135,223.06	112,924.29	24,567.60	65,550.41	1,004,413.26	85,729.03	213,546.55	431,997.07	4,052,688.27
Kediri	1,850,659.94	146,809.51	789,009.03	17,263.53	52,902.59	1,142,227.35	112,954.32	221,684.17	500,448.41	4,834,158.85
Malang	3,127,914.16	270,833.87	1,632,910.62	154,203.51	130,169.94	2,438,233.13	424,941.36	389,375.85	1,503,947.98	10,072,530.42
Lumajang	1,431,306.03	143,983.69	659,584.27	34,151.63	163,097.37	811,728.88	126,743.61	339,953.32	332,692.06	4,043,240.86
Jember	3,364,617.85	386,589.95	564,083.55	59,254.91	199,016.24	1,486,533.20	300,107.27	457,044.59	749,212.84	7,566,460.40
Banyuwangi	3,568,313.95	326,552.99	469,144.44	45,638.19	22,569.80	1,761,228.33	380,786.21	430,501.98	441,030.07	7,445,765.96
Bondowoso	796,556.58	6,088.77	114,504.21	7,673.66	42,847.97	290,531.63	30,639.31	133,420.87	182,584.24	1,604,847.24
Situbondo	778,133.25	57,651.16	254,312.59	22,069.57	67,087.30	890,485.49	117,144.48	96,292.83	219,676.73	2,502,853.40
Probolinggo	1,868,024.18	180,610.08	628,225.10	61,040.37	293,723.64	936,730.52	164,469.02	174,470.30	457,570.60	4,764,863.81
Pasuruan	1,264,024.20	1,073.70	1,337,443.67	85,556.11	90,326.56	993,094.01	130,691.04	167,279.58	477,283.15	4,546,772.02
Sidoarjo	899,130.84	457,194.79	10,643,544.76	274,873.05	396,027.89	3,907,861.09	1,727,020.87	264,727.91	808,468.56	19,378,849.76
Mojokerto	1,003,277.30	70,368.24	1,473,729.17	39,769.12	85,031.54	932,381.78	170,137.14	140,351.22	307,086.13	4,222,131.64
Jombang	1,519,717.30	75,237.23	425,948.22	86,478.41	99,051.18	1,169,244.24	267,058.04	150,284.09	467,869.86	4,260,888.57
Nganjuk	1,161,123.21	66,766.24	301,416.44	12,066.11	78,093.88	1,200,423.14	71,710.31	132,335.24	354,654.36	3,378,588.93
Madiun	731,653.95	57,577.34	61,389.36	15,780.21	146,559.87	494,805.98	56,569.58	87,912.54	362,309.58	2,014,558.41
Magetan	856,920.59	15,830.31	166,527.73	19,985.54	137,961.98	549,928.39	45,156.25	91,124.07	435,079.55	2,318,514.41
Ngawi	857,737.78	14,452.68	133,936.09	11,473.62	87,070.05	616,496.63	65,344.01	109,750.63	311,296.39	2,207,557.88
Bojonegoro	1,609,421.19	85,056.54	265,842.73	33,622.63	122,658.80	942,000.45	197,536.37	210,623.38	674,727.59	4,141,489.68
Tuban	1,292,165.98	680,083.33	800,099.75	115,347.51	299,703.77	782,100.94	129,917.14	136,942.57	355,079.85	4,591,440.84
Lamongan	1,678,629.12	7,411.10	177,914.00	52,979.59	97,649.17	941,054.35	57,589.08	108,770.53	424,091.49	3,546,088.43
Gresik	1,190,366.12	231,021.86	4,913,468.71	413,902.49	547,516.35	2,257,813.52	215,220.26	400,551.48	218,254.21	10,388,115.00
Bangkalan	953,497.29	35,295.16	96,788.02	15,844.04	96,736.06	655,119.57	159,900.75	108,428.69	337,626.82	2,459,236.40
Sampang	1,039,205.64	185,579.89	18,168.91	14,053.52	60,833.43	322,957.31	45,366.01	70,624.54	224,014.87	1,980,804.12
Pamekasan	843,544.82	19,196.71	16,800.70	17,388.09	59,087.62	162,152.68	58,880.81	85,302.33	228,473.10	1,490,826.86
Sumenep	2,294,277.24	396,701.79	112,739.56	3,727.35	72,655.55	617,413.24	130,472.85	153,478.98	403,563.01	4,185,029.57
K. Kediri	38,530.35	1,124.64	12,932,397.35	34,975.84	29,432.99	3,696,985.62	130,931.49	525,521.41	185,098.57	17,574,998.26
K. Blitar	49,563.30	473.39	55,874.21	14,435.47	23,640.41	119,208.71	97,962.78	63,711.93	98,639.25	523,509.45
K. Malang	63,713.30	7,911.25	3,092,734.07	36,941.00	195,185.81	3,390,058.35	525,299.35	739,114.82	1,041,238.18	9,092,196.13
K. Probolinggo	127,867.94	390.37	243,654.76	27,858.54	4,375.04	502,943.69	205,534.04	91,892.97	117,423.17	1,321,940.52
K. Pasuruan	39,026.77	1,675.65	119,413.43	18,365.35	51,566.46	285,429.27	93,296.38	55,699.09	86,905.83	751,378.23
K. Mojokerto	9,262.35	-	136,046.33	28,688.28	45,980.86	341,359.44	133,249.93	60,191.29	99,798.81	854,577.29
K. Madura	20,755.28	332.78	172,284.16	14,352.60	97,751.57	167,373.01	94,560.64	81,284.52	129,535.88	778,230.44
K. Surabaya Skripsi	99,288.43	9,639.12	17,166,847.22	Studi Kebutuhan dan pasar 3,894,619.88	18,974,005.83	5,238,062.41	3,452,961.52	VI. Pendekatn analisa	54,229,630.68	
K. Batu	180,041.95	2,001.44	75,524.41	11,342.56	8,769.90	440,971.04	27,512.98	34,665.73	101,961.72	882,791.73
Jawa Timur	41,354,488.14	4,415,073.37	61,396,901.67	3,144,023.77	8,293,319.45	57,926,650.31	12,245,296.14	10,891,211.35	18,785,422.87	218,452,387.07

**LAMPIRAN 4****PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2003 (jutaan rupiah)**

Kabupaten /Kota	SEKTOR									JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pacitan	476,796.87	77,214.35	40,534.13	7,279.92	75,142.51	123,931.91	56,846.80	89,999.10	195,568.25	1,143,313.84
Ponorogo	722,432.80	88,813.61	205,814.19	29,743.69	194,243.16	659,794.88	116,948.54	132,818.93	318,798.49	2,469,408.29
Trenggalek	541,143.56	41,323.05	144,033.81	6,256.11	59,235.77	324,004.20	86,381.79	74,900.29	393,927.98	1,671,206.56
Tulungagung	1,067,581.48	144,698.85	920,096.78	58,374.04	106,820.77	1,778,591.70	183,643.87	635,552.19	700,267.76	5,595,627.44
Blitar	2,090,312.02	139,253.36	116,507.25	28,318.06	68,226.41	1,060,428.91	88,306.23	221,787.75	443,137.57	4,256,277.56
Kediri	1,871,458.48	152,288.30	854,747.17	19,232.45	52,768.43	1,187,126.92	114,701.93	223,036.38	513,969.49	4,989,329.55
Malang	3,244,667.41	282,552.75	1,689,188.83	166,209.06	131,962.74	2,633,221.90	424,557.26	391,463.42	1,548,319.66	10,512,143.03
Lumajang	1,479,902.16	150,201.12	690,768.76	37,927.74	165,612.96	872,437.52	126,682.36	342,982.18	342,686.21	4,209,201.01
Jember	3,448,891.91	394,992.19	593,998.35	68,936.64	211,818.82	1,593,379.17	312,993.27	479,737.05	785,472.76	7,890,220.16
Banyuwangi	3,694,418.28	333,316.60	491,423.39	51,435.03	23,245.63	1,898,596.92	410,253.65	430,917.63	451,448.86	7,785,065.99
Bondowoso	824,588.64	6,754.36	123,065.33	8,918.88	42,626.41	311,343.08	30,847.10	133,290.58	185,759.21	1,667,193.59
Situbondo	815,765.65	65,851.50	260,223.36	25,348.92	69,357.51	941,014.78	123,276.83	95,573.73	224,718.44	2,621,130.72
Probolinggo	1,892,831.47	183,724.84	671,385.34	68,731.85	290,370.36	1,049,318.05	164,880.83	180,359.74	475,820.13	4,977,422.61
Pasuruan	1,295,299.04	987.62	1,421,836.41	96,281.72	96,757.04	1,074,704.64	131,127.45	172,952.39	491,959.78	4,781,906.09
Sidoarjo	865,223.86	422,530.47	11,230,667.43	315,437.59	389,547.11	4,336,995.69	1,984,158.34	268,116.17	837,298.65	20,649,975.31
Mojokerto	1,012,512.80	76,423.28	1,595,059.25	45,579.48	88,004.36	1,004,195.88	170,693.42	145,044.90	316,640.05	4,454,153.42
Jombang	1,512,242.38	79,489.23	460,784.68	98,896.50	95,458.47	1,305,033.56	283,366.16	157,572.33	479,069.26	4,471,912.57
Nganjuk	1,176,658.91	69,255.80	312,554.15	14,181.90	78,004.30	1,319,098.60	73,328.00	135,693.56	364,574.30	3,543,349.52
Madiun	713,420.58	59,722.29	67,136.17	17,445.78	148,672.95	531,520.02	56,231.81	89,797.49	372,491.96	2,056,439.05
Magetan	868,761.87	16,330.17	176,441.53	22,501.36	137,951.20	593,170.66	45,865.67	90,617.31	449,282.09	2,400,921.86
Ngawi	833,040.79	15,827.38	141,096.98	13,037.56	89,928.25	660,361.57	68,856.44	114,136.06	323,644.13	2,259,929.16
Bojonegoro	1,595,126.60	85,236.03	280,124.80	37,851.98	124,321.24	1,020,419.03	208,443.74	212,706.95	706,288.42	4,270,518.79
Tuban	1,285,404.62	671,855.62	867,365.04	136,432.75	307,142.33	847,208.47	132,796.73	147,225.42	364,746.29	4,760,177.27
Lamongan	1,696,528.96	8,039.77	182,597.48	56,089.87	104,448.70	1,038,037.29	57,828.09	111,129.79	441,250.22	3,695,950.17
Gresik	1,202,790.88	236,940.54	5,152,171.54	487,440.16	566,820.20	2,440,506.50	230,719.82	409,375.05	228,208.17	10,954,972.86
Bangkalan	952,558.56	39,241.30	103,726.38	18,655.16	104,717.53	695,686.26	166,506.03	112,512.17	359,762.51	2,553,365.90
Sampang	1,065,377.43	187,951.68	18,928.72	16,033.21	59,835.12	344,578.90	48,114.83	69,654.26	226,312.21	2,036,786.36
Pamekasan	877,368.05	19,561.48	17,898.35	19,715.64	60,417.31	172,423.22	60,052.37	86,156.29	239,770.00	1,553,362.71
Sumenep	2,372,576.50	438,439.76	114,735.70	4,159.50	78,754.38	643,076.84	131,113.70	156,166.01	413,714.45	4,350,736.84
K. Kediri	40,631.04	1,211.08	13,370,031.87	41,135.37	30,844.37	3,952,572.54	134,100.38	570,841.96	198,690.00	18,340,058.61
K. Blitar	51,619.90	443.05	58,460.89	16,205.69	28,377.11	123,831.28	103,687.83	66,934.97	103,066.42	552,627.14
K. Malang	63,746.64	8,074.04	3,224,712.75	40,411.25	197,435.64	3,624,405.63	521,651.00	759,237.43	1,076,614.83	9,516,289.21
K. Probolinggo	137,194.12	395.27	216,562.37	32,252.24	4,341.60	551,070.49	216,171.54	97,014.21	122,135.45	1,377,137.29
K. Pasuruan	40,726.71	1,661.04	124,565.80	20,995.03	52,529.24	302,194.21	94,746.33	57,370.63	91,195.53	785,984.52
K. Mojokerto	9,518.15	-	142,100.43	31,114.12	49,331.16	367,859.69	137,463.19	62,215.18	103,557.53	903,159.45
K. Madiun	21,010.14	334.96	178,763.47	16,106.48	100,343.08	182,179.27	98,010.05	82,763.13	131,953.88	811,464.46
K. Surabaya Skripsi	97,185.95	9,744.85	17,801,372.10	Studi kebutuhan dan wasa Pengembangan Surabaya	96,446,914.07	Praktis 20,869,902.38	5,529,750.50	3,478,430.39	Survi 1,290,112.65	5artik 87,077,933.92
K. Batu	186,120.05	2,020.59	72,145.57	13,316.47	9,869.73	478,558.85	28,353.69	36,543.55	110,887.15	937,815.65
Jawa Timur	42,143,435.26	4,512,702.18	64,133,626.55	3,631,942.88	8,447,765.37	62,512,781.36	12,953,457.57	11,122,626.57	19,426,120.74	228,884,458.48

**LAMPIRAN 5****PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2004 (jutaan rupiah)**

Kabupaten /Kota	SEKTOR								JUMLAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Pacitan	483,893.11	79,314.61	41,781.68	9,267.89	77,302.64	130,670.52	57,770.89	92,581.32	206,025.78	1,178,608.44
Ponorogo	724,641.27	88,524.60	226,147.73	37,452.17	198,709.69	701,463.82	121,199.05	137,555.03	332,475.33	2,570,168.69
Trenggalek	550,266.90	43,425.14	148,605.75	7,213.29	60,788.30	348,382.97	88,761.12	76,611.27	405,123.28	1,729,178.02
Tulungagung	1,091,446.52	149,600.75	984,322.45	73,155.98	104,725.37	1,915,325.60	194,359.87	672,497.24	728,569.49	5,914,003.27
Blitar	2,166,473.76	148,697.64	124,275.02	34,377.17	71,223.03	1,132,361.62	92,173.06	229,524.27	459,295.43	4,458,401.00
Kediri	1,878,138.94	153,316.53	989,135.37	21,340.81	51,639.10	1,237,437.11	116,629.59	229,198.17	525,209.19	5,202,044.81
Malang	3,396,747.51	301,628.64	1,838,786.84	189,934.82	138,469.72	2,812,340.93	430,482.15	405,603.28	1,579,024.91	11,093,018.80
Lumajang	1,577,954.05	154,830.94	728,235.30	43,569.18	164,554.30	932,669.14	128,210.22	353,465.82	357,904.33	4,441,393.28
Jember	3,563,390.62	399,588.60	625,902.74	77,787.27	219,267.27	1,722,542.00	323,459.15	509,069.85	821,656.29	8,262,663.79
Banyuwangi	3,809,717.40	329,913.43	511,328.02	58,059.96	23,343.96	2,055,877.86	445,347.72	439,460.75	461,399.09	8,134,448.19
Bondowoso	849,088.12	6,792.51	131,345.36	10,167.08	42,483.25	338,985.22	31,072.49	141,066.94	193,966.21	1,744,967.18
Situbondo	851,592.99	67,217.56	269,677.30	28,060.67	71,232.04	996,903.49	128,414.89	96,731.10	234,911.93	2,744,741.97
Probolinggo	1,918,742.78	181,004.09	727,410.08	79,203.12	283,114.04	1,182,201.22	169,027.57	192,617.14	498,894.51	5,232,214.55
Pasuruan	1,319,094.28	906.01	1,535,814.22	112,128.28	103,443.58	1,186,467.29	129,077.96	182,764.61	505,184.55	5,074,680.78
Sidoarjo	895,019.09	409,475.19	11,792,915.30	348,773.44	383,144.70	4,719,447.80	2,362,550.80	276,619.26	854,248.35	22,042,193.93
Mojokerto	1,067,118.20	81,852.36	1,758,559.30	51,544.42	89,359.29	1,086,401.00	173,904.18	153,080.20	325,896.95	4,787,715.90
Jombang	1,531,669.06	79,267.81	483,164.36	120,441.96	93,810.83	1,440,853.99	289,558.56	171,865.40	492,299.76	4,702,931.73
Nganjuk	1,204,096.93	69,460.93	327,975.10	17,069.73	77,465.97	1,433,840.53	74,600.94	141,391.00	380,689.23	3,726,590.36
Madiun	711,993.56	61,227.80	71,603.24	19,352.81	148,680.72	563,999.07	56,344.80	94,235.80	381,160.31	2,108,598.11
Magetan	876,227.89	16,634.20	186,347.04	25,370.96	136,392.50	653,366.79	46,096.89	95,145.27	464,262.29	2,499,843.83
Ngawi	854,364.46	15,598.89	144,793.77	14,150.62	89,767.33	705,421.45	70,965.52	120,382.33	332,980.26	2,348,424.63
Bojonegoro	1,603,078.02	150,134.34	290,621.93	43,151.42	138,603.80	1,080,755.74	211,852.95	229,918.90	731,556.71	4,479,673.81
Tuban	1,292,135.52	631,340.43	949,410.76	161,491.99	313,480.69	929,563.49	135,479.26	155,373.25	375,144.23	4,943,419.62
Lamongan	1,730,295.55	8,255.64	191,934.64	55,496.56	107,448.60	1,144,010.49	58,898.56	123,765.04	446,697.67	3,866,802.75
Gresik	1,263,265.42	238,212.61	5,349,519.74	579,597.21	576,010.99	2,689,295.16	263,389.84	421,640.68	237,904.57	11,618,836.22
Bangkalan	970,840.15	42,251.60	112,966.01	21,345.24	112,421.91	729,073.87	180,383.26	121,737.24	380,267.95	2,671,287.23
Sampang	1,095,366.78	188,036.86	19,758.56	19,365.01	58,810.77	384,553.23	51,337.33	74,282.23	233,812.23	2,125,323.00
Pamekasan	904,531.76	20,574.83	17,810.91	21,684.29	61,999.78	191,049.09	63,101.96	90,168.23	247,808.64	1,618,729.49
Sumenep	2,464,695.55	454,539.59	114,937.27	4,583.20	74,121.98	675,686.30	133,708.80	162,813.16	422,973.11	4,508,058.96
K. Kediri	41,629.13	1,210.76	13,935,166.36	50,578.95	31,072.09	4,335,677.09	134,906.80	610,202.78	207,512.02	19,347,955.98
K. Blitar	52,947.42	440.57	58,870.43	18,537.57	28,353.59	135,290.59	108,402.26	71,422.29	110,439.29	584,704.01
K. Malang	64,718.01	8,111.32	3,378,654.95	44,861.11	200,654.92	3,963,355.93	530,682.76	799,302.26	1,127,521.38	10,117,862.64
K. Probolinggo	150,054.41	397.24	203,500.53	36,424.20	4,267.49	610,842.87	220,389.25	105,434.29	126,195.92	1,457,506.20
K. Pasuruan	42,700.71	1,648.63	125,673.35	23,812.37	53,182.44	323,204.79	96,971.76	60,808.74	96,114.69	824,117.48
K. Mojokerto	9,328.82	-	146,803.09	34,461.53	51,112.34	396,043.15	143,989.09	67,955.75	107,772.00	957,465.77
K. Madiun	21,184.47	330.03	183,498.62	18,291.35	101,524.02	198,415.21	101,174.94	85,983.18	135,481.99	845,883.81
K. Surabaya Skips	110,885.54	10,035.93	18,718,445.72	1,647,731.54	4,052,195.22	22,692,830.94	5,836,171.91	3,752,504.71	4,449,043.85	61,266,895.46
K. Batu	192,158.41	2,123.25	72,736.02	14,730.21	10,223.04	519,361.03	29,591.53	38,564.26	117,850.75	997,338.50
Jawa Timur	43,331,493.11	4,595,921.86	67,520,434.86	4,171,615.48	8,604,401.30	68,295,968.39	13,830,439.68	11,783,343.04	20,095,274.47	242,228,892.19

**LAMPIRAN 6****PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2005 (jutaan rupiah)**

Kabupaten /Kota	SEKTOR									JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pacitan	495,213.94	88,480.42	44,845.32	11,111.90	80,176.19	138,251.34	58,566.55	96,705.64	217,688.44	1,231,039.74
Ponorogo	731,009.57	95,782.23	249,748.83	43,934.69	206,507.84	743,067.15	127,035.17	145,076.70	344,637.98	2,686,800.16
Trenggalek	564,158.71	49,761.95	160,346.12	7,746.53	63,475.69	376,606.83	92,833.09	79,333.46	416,627.30	1,810,889.68
Tulungagung	1,113,657.31	167,735.94	1,047,984.49	82,252.71	104,628.77	2,069,517.33	209,470.44	717,658.95	762,547.44	6,275,453.38
Blitar	2,257,705.35	163,560.92	132,416.66	37,674.72	72,333.66	1,196,713.50	94,326.91	240,062.85	475,769.38	4,670,563.95
Kediri	1,932,001.96	180,792.82	1,019,247.44	22,100.52	51,354.28	1,308,609.61	119,932.45	240,684.22	541,895.04	5,416,618.34
Malang	3,546,666.67	353,198.20	2,007,362.70	201,610.65	146,136.67	3,017,046.76	442,776.40	429,659.93	1,626,336.76	11,770,794.74
Lumajang	1,652,802.48	172,896.79	776,085.96	45,465.73	165,923.75	1,014,289.12	131,233.17	378,890.89	369,807.25	4,707,395.14
Jember	3,766,859.94	441,730.44	662,293.55	82,832.19	228,464.68	1,850,161.66	334,294.69	547,376.66	865,529.26	8,779,543.07
Banyuwangi	3,959,468.27	358,667.45	542,194.36	61,001.99	23,817.49	2,222,405.78	473,028.27	454,334.10	473,745.16	8,568,662.87
Bondowoso	875,483.11	7,534.36	145,654.71	10,922.27	43,398.98	369,190.92	32,529.38	150,280.01	204,303.71	1,839,297.45
Situbondo	894,402.52	75,952.64	289,451.59	29,098.37	73,016.66	1,067,939.71	131,532.55	103,698.47	246,099.53	2,911,192.04
Probolinggo	1,943,421.18	191,346.61	769,168.74	84,618.60	280,593.69	1,311,847.33	175,580.19	208,603.55	525,574.13	5,490,754.02
Pasuruan	1,333,853.14	1,063.05	1,688,789.63	120,809.77	113,386.80	1,275,125.22	134,018.69	197,024.19	533,568.97	5,397,639.46
Sidoarjo	918,792.77	383,825.36	12,512,658.11	392,521.39	390,003.32	5,395,152.07	2,383,102.02	288,599.29	890,362.03	23,556,016.36
Mojokerto	1,119,808.51	94,935.16	1,843,958.96	54,413.29	92,463.23	1,182,698.36	179,686.75	167,859.32	335,607.22	5,071,430.80
Jombang	1,558,515.97	83,298.39	518,175.16	129,151.12	94,620.53	1,572,564.34	301,493.95	184,629.15	519,785.03	4,962,233.64
Nganjuk	1,250,903.56	77,567.23	353,785.38	18,318.59	79,986.02	1,562,413.54	78,031.65	149,374.47	398,212.98	3,968,593.42
Madiun	713,238.29	68,036.54	81,526.89	19,991.14	151,515.18	612,538.15	58,120.87	102,248.97	394,873.22	2,202,089.25
Magetan	889,456.27	18,344.06	205,046.95	26,234.42	137,245.07	715,428.58	47,463.37	101,988.42	478,130.52	2,619,337.66
Ngawi	864,782.69	17,287.91	152,034.52	14,899.30	93,474.38	753,645.94	73,643.42	128,461.33	343,158.52	2,441,388.01
Bojonegoro	1,611,285.92	278,320.30	295,174.49	45,588.80	151,094.99	1,146,377.65	216,001.85	246,226.79	754,947.14	4,745,017.93
Tuban	1,298,541.54	643,038.63	1,020,588.81	172,102.48	328,647.48	1,024,068.28	140,508.18	170,093.27	392,462.34	5,190,051.01
Lamongan	1,746,323.11	9,675.08	207,019.69	56,440.08	112,770.77	1,271,418.66	60,693.82	141,059.38	474,202.00	4,079,602.59
Gresik	1,303,706.10	269,007.37	5,692,596.72	639,343.26	585,470.18	2,981,962.53	280,698.27	441,691.16	247,587.54	12,442,063.13
Bangkalan	976,913.55	51,128.14	120,650.07	24,388.67	125,835.97	775,590.61	197,247.94	132,793.15	399,588.23	2,804,136.33
Sampang	1,127,665.04	203,292.16	20,700.57	20,917.09	58,291.37	425,682.72	52,149.59	77,787.08	242,083.43	2,228,569.05
Pamekasan	928,412.81	23,398.19	18,554.67	22,387.95	64,145.35	208,674.46	64,610.12	96,702.12	262,368.19	1,689,253.86
Sumenep	2,613,633.61	429,596.11	119,595.69	4,748.89	80,889.75	731,128.89	137,696.98	177,817.67	444,544.16	4,739,651.75
K. Kediri	44,071.76	1,327.44	13,891,299.50	53,260.13	31,274.53	4,638,695.30	139,372.40	644,899.80	217,244.84	19,661,445.70
K. Blitar	52,529.22	474.57	63,091.13	19,661.66	28,941.15	155,512.43	106,423.01	75,066.44	119,418.84	621,118.45
K. Malang	66,617.35	8,886.06	3,620,250.39	45,769.20	208,925.05	4,192,605.17	547,058.33	860,690.46	1,186,481.49	10,737,283.50
K. Probolinggo	155,104.64	438.60	193,955.63	37,457.91	4,291.66	682,912.88	230,208.39	123,640.34	132,435.93	1,560,445.98
K. Pasuruan	43,604.02	1,751.37	134,446.30	24,990.45	54,505.24	344,828.69	100,904.66	65,371.66	101,501.23	871,903.62
K. Mojokerto	9,501.72	-	149,860.84	35,538.08	53,722.30	422,744.59	154,850.45	73,588.58	112,451.02	1,012,257.58
K. Madiun	21,100.27	353.34	200,364.95	19,532.19	104,320.18	215,651.28	107,561.99	91,704.50	139,384.79	899,973.49
K. Surabaya Kripsi	121,315.85	9,480.04	19,609,390.55	550,070.69	wasan 4,206,201.51 P	25,014,916.62	6,276,621.54	4,092,426.44	Rah 627,502,001	65,653,355.33
K. Batu	198,455.46	2,276.10	75,552.93	15,733.93	11,117.05	558,751.79	30,506.82	41,283.86	127,186.13	1,060,864.07
Jawa Timur	44,700,984.18	5,024,241.97	70,635,868.96	4,429,541.55	8,903,497.41	74,546,735.69	14,521,814.32	12,666,393.27	20,945,649.20	256,374,726.55

**LAMPIRAN 7****JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Kabupaten/Kota	TAHUN				
	2001	2002	2003	2004	2005
Pacitan	532,726	535,674	538,292	542,556	546,150
Ponorogo	864,424	866,995	869,359	875,448	880,701
Trenggalek	663,790	667,582	671,076	677,185	682,465
Tulungagung	949,197	954,863	960,067	968,983	976,691
Blitar	1,100,663	1,105,902	1,110,726	1,121,716	1,131,222
Kediri	1,454,244	1,464,954	1,474,840	1,493,209	1,509,135
Malang	2,322,699	2,331,120	2,338,865	2,368,372	2,393,959
Lumajang	987,939	993,971	999,533	1,009,349	1,017,839
Jember	2,205,492	2,219,175	2,231,793	2,248,968	2,263,794
Banyuwangi	1,526,870	1,533,679	1,539,948	1,552,867	1,564,026
Bondowoso	700,692	704,831	708,646	714,836	720,183
Situbondo	613,778	617,570	621,067	626,600	631,382
Probolinggo	1,017,365	1,027,181	1,036,262	1,048,616	1,059,322
Pasuruan	1,381,027	1,401,079	1,419,716	1,443,550	1,464,297
Sidoarjo	1,592,385	1,638,669	1,682,278	1,738,285	1,787,771
Mojokerto	938,758	954,161	968,502	989,965	1,008,740
Jombang	1,152,962	1,163,083	1,172,439	1,187,178	1,199,958
Nganjuk	1,015,318	1,022,050	1,028,260	1,041,812	1,053,569
Madiun	653,421	655,234	656,918	660,873	664,282
Magetan	621,738	621,222	620,750	621,160	621,511
Ngawi	833,944	837,072	839,949	846,355	851,884
Bojonegoro	1,195,706	1,204,542	1,212,700	1,226,691	1,238,811
Tuban	1,061,529	1,069,618	1,077,088	1,087,121	1,095,795
Lamongan	1,221,528	1,229,000	1,235,890	1,249,867	1,261,972
Gresik	1,026,488	1,043,747	1,059,822	1,081,800	1,101,000
Bangkalan	864,279	875,584	886,077	907,651	926,560
Sampang	812,575	823,498	833,640	855,405	874,512
Pamekasan	722,148	731,487	740,154	755,331	768,587
Sumenep	1,016,812	1,024,843	1,032,260	1,045,501	1,056,985
Kota Kediri	251,697	251,872	252,033	253,287	254,367
Kota Blitar	122,683	123,027	123,344	124,203	124,944
Kota Malang	756,294	762,155	767,567	773,703	779,002
Kota Probolinggo	196,591	198,493	200,252	203,056	205,490
Kota Pasuruan	172,840	174,859	176,730	179,587	182,072
Kota Mojokerto	110,100	111,087	111,999	114,339	116,383
Kota Madiun	169,595	169,536	169,481	170,260	170,931
Kota Surabaya	2,633,067	2,647,283	2,660,381	2,681,092	2,698,972
Kota Batu	170,030	173,763	177,256	181,631	185,467
Jawa Timur	35,633,394	35,930,461	36,205,960	36,668,408	37,070,731

**LAMPIRAN 8****PDRB PER KAPITA MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Kabupaten /Kota	TAHUN					
	2001	2002	2003	2004	2005	RERATA
Pacitan	2,047,475.81	2,078,271.26	2,123,965.88	2,172,325.88	2,254,032.30	2,135,214.23
Ponorogo	2,642,941.69	2,740,698.74	2,840,493.16	2,935,832.50	3,050,751.80	2,842,143.58
Trenggalek	2,369,174.26	2,434,384.41	2,490,338.74	2,553,479.51	2,653,454.29	2,500,166.24
Tulungagung	5,323,970.30	5,582,197.05	5,828,371.81	6,103,309.62	6,425,218.81	5,852,613.52
Blitar	3,553,711.95	3,664,599.82	3,831,977.97	3,974,625.48	4,128,777.51	3,830,738.55
Kediri	3,242,361.49	3,299,870.75	3,382,963.27	3,483,802.21	3,589,220.54	3,399,643.65
Malang	4,157,912.47	4,320,897.43	4,494,548.86	4,683,816.06	4,916,873.99	4,514,809.76
Lumajang	3,952,040.75	4,067,765.42	4,211,167.63	4,400,255.29	4,624,891.70	4,251,224.16
Jember	3,289,509.95	3,409,582.57	3,535,372.75	3,673,980.15	3,878,242.93	3,557,337.67
Banyuwangi	4,653,147.49	4,854,839.87	5,055,401.86	5,238,341.85	5,478,593.62	5,056,064.94
Bondowoso	2,219,097.11	2,276,924.88	2,352,646.58	2,441,073.45	2,553,930.67	2,368,734.54
Situbondo	3,920,483.56	4,052,744.47	4,220,367.08	4,380,373.40	4,610,825.21	4,236,958.74
Probolinggo	4,470,234.48	4,638,777.21	4,803,247.26	4,989,638.29	5,183,271.96	4,817,033.84
Pasuruan	3,158,518.73	3,245,193.18	3,368,213.14	3,515,555.94	3,686,164.39	3,394,729.08
Sidoarjo	11,646,800.32	11,825,969.59	12,275,907.64	12,680,425.78	13,176,193.35	12,320,879.34
Mojokerto	4,320,887.11	4,424,967.74	4,599,013.14	4,836,247.65	5,027,490.53	4,641,721.23
Jombang	3,537,646.64	3,663,443.25	3,814,196.36	3,961,437.74	4,135,339.44	3,822,412.69
Nganjuk	3,184,380.11	3,305,698.28	3,445,966.51	3,577,027.68	3,766,809.22	3,455,976.36
Madiun	2,967,941.85	3,074,563.30	3,130,434.92	3,190,625.29	3,314,991.60	3,135,711.39
Magetan	3,608,561.23	3,732,183.36	3,867,775.85	4,024,476.51	4,214,467.10	3,889,492.81
Ngawi	2,583,526.47	2,637,237.75	2,690,555.21	2,774,751.29	2,865,869.07	2,710,387.96
Bojonegoro	3,338,489.61	3,438,227.71	3,521,496.49	3,651,835.56	3,830,300.13	3,556,069.90
Tuban	4,177,171.02	4,292,598.70	4,419,487.79	4,547,257.96	4,736,333.90	4,434,569.88
Lamongan	2,787,649.98	2,885,344.53	2,990,517.09	3,093,771.38	3,232,720.37	2,998,000.67
Gresik	9,618,372.15	9,952,713.64	10,336,615.83	10,740,281.22	11,300,693.12	10,389,735.19
Bangkalan	2,744,914.62	2,808,681.29	2,881,652.38	2,943,077.49	3,026,394.76	2,880,944.11
Sampang	2,364,507.69	2,405,353.89	2,443,244.52	2,484,580.99	2,548,357.31	2,449,208.88
Pamekasan	2,001,928.68	2,038,077.04	2,098,702.04	2,143,073.02	2,197,869.41	2,095,930.04
Sumenep	3,940,277.32	4,083,581.16	4,214,768.41	4,311,864.80	4,484,123.95	4,206,923.13
Kota Kediri	72,199,256.33	69,777,499.13	72,768,481.15	76,387,481.32	77,295,583.55	73,685,660.29
Kota Blitar	3,970,285.04	4,255,240.31	4,480,373.10	4,707,648.04	4,971,174.69	4,476,944.24
Kota Malang	11,603,987.21	11,929,589.30	12,397,991.59	13,077,191.95	13,783,383.74	12,558,428.76
Kota Probolinggo	6,392,111.59	6,659,884.83	6,877,021.40	7,177,853.40	7,593,780.62	6,940,130.37
Kota Pasuruan	4,129,254.63	4,297,052.08	4,447,374.64	4,588,959.56	4,788,784.77	4,450,285.13
Kota Mojokerto	7,204,683.11	7,692,864.96	8,063,995.66	8,373,921.15	8,697,641.24	8,006,621.22
Kota Madiun	4,369,709.25	4,590,355.09	4,787,937.64	4,968,188.71	5,265,127.39	4,796,263.62
Kota Surabaya	19,580,665.59	20,485,014.51	21,454,796.86	22,851,470.77	24,325,319.17	21,739,453.38
Kota Batu	4,871,415.04	5,080,435.59	5,290,741.36	5,491,014.75	5,719,961.34	5,290,713.62
Jawa Timur	5,905,936.72	6,079,865.97	6,321,734.28	6,605,928.79	6,915,826.03	6,365,858.36

**LAMPIRAN 9**

**PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Kabupaten /Kota	TAHUN					
	2001 %	2002 %	2003 %	2004 %	2005 %	RERATA %
Pacitan	0.92	2.07	2.70	3.09	4.45	2.64
Ponorogo	3.34	4.01	3.92	4.08	4.54	3.98
Trenggalek	4.04	3.34	2.83	3.47	4.73	3.68
Tulungagung	4.86	5.48	4.98	5.69	6.11	5.42
Blitar	2.16	3.61	5.02	4.75	4.76	4.06
Kediri	4.59	2.52	3.21	4.26	4.12	3.74
Malang	4.16	4.30	4.36	5.53	6.11	4.89
Lumajang	3.23	3.56	4.10	5.52	5.99	4.48
Jember	2.74	4.29	4.28	4.72	6.26	4.46
Banyuwangi	4.30	4.80	4.56	4.49	5.34	4.70
Bondowoso	2.21	3.21	3.88	4.66	5.41	3.87
Situbondo	2.01	4.01	4.73	4.72	6.06	4.31
Probolinggo	3.59	4.77	4.46	5.12	4.94	4.58
Pasuruan	3.44	4.24	5.17	6.13	6.36	5.07
Sidoarjo	3.73	4.49	6.56	6.74	6.87	5.68
Mojokerto	3.07	4.09	5.50	7.49	5.93	5.21
Jombang	2.82	4.46	4.95	5.17	5.51	4.58
Nganjuk	2.27	4.50	4.88	5.17	6.49	4.66
Madiun	3.80	3.88	2.08	2.54	4.43	3.35
Magetan	2.58	3.34	3.55	4.12	4.78	3.67
Ngawi	2.23	2.46	2.37	3.92	3.96	2.99
Bojonegoro	2.88	3.75	3.12	4.90	5.92	4.11
Tuban	6.15	3.55	3.68	3.85	4.99	4.44
Lamongan	3.09	4.14	4.23	4.62	5.50	4.32
Gresik	4.11	5.22	5.46	6.06	7.09	5.59
Bangkalan	3.33	3.66	3.83	4.62	4.97	4.08
Sampang	1.93	3.09	2.83	4.35	4.86	3.41
Pamekasan	0.80	3.12	4.19	4.21	4.36	3.34
Sumenep	0.38	4.46	3.96	3.62	5.14	3.51
Kota Kediri	4.31	(3.29)	4.35	5.50	1.62	2.50
Kota Blitar	3.82	7.48	5.56	5.80	6.23	5.78
Kota Malang	2.36	3.60	4.66	6.32	6.12	4.61
Kota Probolinggo	1.77	5.20	4.18	5.84	7.06	4.81
Kota Pasuruan	4.12	5.28	4.61	4.85	5.80	4.93
Kota Mojokerto	5.55	7.73	5.68	6.01	5.72	6.14
Kota Madiun	3.91	5.01	4.27	4.24	6.39	4.77
Kota Surabaya	4.88	5.18	5.25	7.34	7.16	5.96
Kota Batu	4.52	6.58	6.23	6.35	6.37	6.01
Jawa Timur	3.81	3.80	4.78	5.83	5.84	4.81

**LAMPIRAN 10****TIPOLOGI KLASSEN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2001/2005**

Kabupaten /Kota	RERATA PERTUMBUHAN PDRB	RERATA KAB/KOTA		RERATA PDRB/KAPITA	RERATA KAB/KOTA		TIPOLOGI DAERAH
Pacitan	2.64	4.43	RENDAH	2,135,214.23	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Ponorogo	3.98	4.43	RENDAH	2,842,143.58	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Trenggalek	3.88	4.43	RENDAH	2,500,166.24	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Tulungagung	5.42	4.43	TINGGI	5,852,613.52	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Blitar	4.06	4.43	RENDAH	3,830,738.55	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Kediri	3.74	4.43	RENDAH	3,399,643.65	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Malang	4.89	4.43	TINGGI	4,514,809.76	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Lumajang	4.48	4.43	TINGGI	4,251,224.16	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Jember	4.46	4.43	TINGGI	3,557,337.67	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Banyuwangi	4.70	4.43	TINGGI	5,056,064.94	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Bondowoso	3.87	4.43	RENDAH	2,368,734.54	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Situbondo	4.31	4.43	RENDAH	4,236,958.74	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Probolinggo	4.58	4.43	TINGGI	4,817,033.84	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Pasuruan	5.07	4.43	TINGGI	3,394,729.06	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Sidoarjo	5.66	4.43	TINGGI	12,320,879.34	6,886,575.70	TINGGI	CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH
Mojokerto	5.21	4.43	TINGGI	4,641,721.23	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Jombang	4.58	4.43	TINGGI	3,822,412.69	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Nganjuk	4.66	4.43	TINGGI	3,455,976.38	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Mediun	3.35	4.43	RENDAH	3,135,711.39	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Magetan	3.67	4.43	RENDAH	3,869,492.61	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Ngawi	2.99	4.43	RENDAH	2,710,387.96	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Bojonegoro	4.11	4.43	RENDAH	3,556,069.90	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Tuben	4.44	4.43	TINGGI	4,434,569.88	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Lamongan	4.32	4.43	RENDAH	2,998,000.67	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Gresik	5.59	4.43	TINGGI	10,389,735.19	6,886,575.70	TINGGI	CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH
Bangkalan	4.08	4.43	RENDAH	2,880,944.11	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Sampang	3.41	4.43	RENDAH	2,449,208.88	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Pamekasan	3.34	4.43	RENDAH	2,095,930.04	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Sumenep	3.51	4.43	RENDAH	4,206,923.13	6,886,575.70	RENDAH	RELATIF TERTINGGAL
Kota Kediri	2.50	4.43	RENDAH	73,685,660.29	6,886,575.70	TINGGI	MAJU TAPI TERTEKAN
Kota Blitar	5.78	4.43	TINGGI	4,476,944.24	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Kota Malang	4.61	4.43	TINGGI	12,558,428.78	6,886,575.70	TINGGI	CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH
Kota Probolinggo	4.81	4.43	TINGGI	6,940,130.37	6,886,575.70	TINGGI	CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH
Kota Pasuruan	4.83	4.43	TINGGI	4,450,285.13	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Kota Mojokerto	6.14	4.43	TINGGI	8,006,621.22	6,886,575.70	TINGGI	CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH
Kota Madiun	4.77	4.43	TINGGI	4,796,263.62	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Kota Surabaya	5.96	4.43	TINGGI	21,739,453.36	6,886,575.70	TINGGI	CEPAT MAJU DAN CEPAT TUMBUH
Kota Batu	6.01	4.43	TINGGI	5,290,713.62	6,886,575.70	RENDAH	BERKEMBANG CEPAT
Jawa Timur	4.81	4.43		6,365,858.36			

**LAMPIRAN 11**

**LQ RATA-RATA MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2001-2005**

Kabupaten /Kota	SEKTOR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pacitan	2.26	3.42	0.13	0.41	1.81	0.40	0.89	1.61	2.03
Ponorogo	1.58	1.81	0.30	0.77	2.13	0.98	0.85	1.10	1.55
Trenggalek	1.76	1.26	0.30	0.24	0.96	0.71	0.93	0.92	2.79
Tulungagung	1.03	1.31	0.59	0.66	0.52	1.16	0.58	2.32	1.48
Blitar	2.66	1.68	0.10	0.43	0.43	0.92	0.37	1.06	1.24
Kediri	2.03	1.55	0.62	0.24	0.28	0.87	0.41	0.91	1.21
Malang	1.68	1.38	0.58	1.03	0.35	0.91	0.73	0.76	1.72
Lumajang	1.92	1.80	0.58	0.58	1.05	0.76	0.54	1.67	0.96
Jember	2.39	2.54	0.27	0.55	0.73	0.73	0.70	1.24	1.17
Banyuwangi	2.58	2.16	0.23	0.42	0.08	0.89	0.95	1.13	0.69
Bondowoso	2.67	0.20	0.26	0.34	0.69	0.69	0.33	1.67	1.33
Situbondo	1.70	1.20	0.36	0.60	0.70	1.32	0.83	0.75	1.01
Probolinggo	2.06	1.85	0.48	0.89	1.57	0.77	0.59	0.75	1.14
Pasuruan	1.46	0.01	1.07	1.28	0.55	0.82	0.48	0.74	1.21
Sidoarjo	0.23	1.07	1.93	0.97	0.51	0.77	1.68	0.27	0.48
Mojokerto	1.25	0.86	1.28	0.64	0.53	0.82	0.68	0.67	0.83
Jombang	1.85	0.87	0.36	1.45	0.59	1.06	1.10	0.73	1.28
Nganjuk	1.81	0.98	0.32	0.25	0.60	1.36	0.37	0.78	1.22
Madiun	1.89	1.47	0.12	0.54	1.95	0.94	0.48	0.90	2.14
Magetan	1.95	0.34	0.26	0.59	1.55	0.92	0.34	0.78	2.21
Ngawi	2.04	0.34	0.22	0.36	1.06	1.06	0.54	1.02	1.68
Bojonegoro	2.03	1.55	0.23	0.56	0.83	0.86	0.84	1.03	1.93
Tuban	1.47	7.07	0.65	1.82	1.75	0.65	0.50	0.63	0.91
Lamongan	2.49	0.11	0.18	0.94	0.76	1.03	0.28	0.64	1.40
Gresik	0.61	1.11	1.66	2.88	1.39	0.82	0.39	0.76	0.24
Bangkalan	2.04	0.78	0.15	0.47	1.13	0.99	1.20	0.91	1.66
Sampang	2.83	4.64	0.03	0.51	0.79	0.63	0.42	0.71	1.32
Pamekasan	3.06	0.67	0.04	0.77	1.06	0.42	0.70	1.15	1.83
Sumenep	2.99	4.82	0.09	0.06	0.47	0.55	0.55	0.74	1.13
Kota Kediri	0.01	0.00	2.59	0.14	0.04	0.79	0.13	0.62	0.12
Kota Blitar	0.50	0.04	0.37	1.88	1.29	0.86	3.28	2.47	2.24
Kota Malang	0.04	0.04	1.20	0.27	0.56	1.40	0.98	1.63	1.33
Kota Probolinggo	0.54	0.01	0.58	1.45	0.08	1.46	2.74	1.46	1.04
Kota Pasuruan	0.28	0.11	0.56	1.69	1.81	1.41	2.16	1.51	1.38
Kota Mojokerto	0.06	0.00	0.56	2.21	1.45	1.49	2.74	1.45	1.36
Kota Madiun	0.14	0.02	0.79	1.28	3.33	0.82	2.13	2.10	1.93
Kota Surabaya	0.01	0.01	1.11	1.56	1.88	1.32	1.70	1.27	0.88
Kota Batu	1.08	0.11	0.28	0.88	0.28	1.87	0.54	0.79	1.38
Jawa Timur	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

## INDEKS SPESIALISASI SEKTOR ATAS DASAR LAPANGAN USAHA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2009

## LAMPIRAN 13

## INDEX SPESIALISASI SEKTOR ATAS DASAR LAPANGAN USAHA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2005

Kabupaten /Kota	Kode Kab	KABUPATEN/KOTA																																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ADLIN	Pel	pusbakan	Universitas	Airat	Rgg	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	RT	
Pacitan	1	0.00	0.43	0.41	0.73	0.45	0.54	0.55	0.50	0.32	0.45	0.36	0.64	0.40	0.78	1.33	0.87	0.46	0.62	0.34	0.41	0.40	0.29	0.56	0.46	1.17	0.35	0.38	0.32	0.38	1.63	0.84	1.16	1.10	0.98	1.05	0.84	1.19	0.92	0.85
Ponorogo	2		0.00	0.30	0.36	0.43	0.37	0.25	0.32	0.36	0.40	0.44	0.26	0.30	0.49	1.08	0.56	0.22	0.31	0.22	0.24	0.22	0.24	0.44	0.35	0.85	0.24	0.56	0.58	0.60	1.98	0.59	0.84	0.74	0.62	0.70	0.74	0.79	0.51	0.46
Trenggalek	3			0.00	0.54	0.50	0.42	0.29	0.36	0.35	0.47	0.42	0.39	0.34	0.82	1.05	0.61	0.32	0.41	0.28	0.24	0.36	0.24	0.51	0.47	0.95	0.31	0.55	0.51	0.58	1.36	0.60	0.67	0.69	0.64	0.90	0.79	1.02	0.88	0.56
Tulungagung	4				0.00	0.04	0.40	0.31	0.35	0.61	0.64	0.60	0.96	0.50	0.47	0.92	0.48	0.43	0.39	0.53	0.64	0.44	0.51	0.57	0.57	0.73	0.52	0.81	0.84	0.82	1.18	0.50	0.58	0.48	0.46	0.53	0.61	0.66	0.42	0.55
Bitar	5					0.00	0.30	0.44	0.44	0.23	0.19	0.20	0.49	0.38	0.57	1.26	0.71	0.36	0.40	0.85	0.37	0.31	0.30	0.68	0.21	1.05	0.30	0.20	0.80	0.21	1.46	0.82	1.10	0.97	1.00	1.06	1.10	1.15	0.71	0.58
Kediri	6						0.00	0.16	0.23	0.28	0.32	0.32	0.31	0.20	0.34	1.01	0.46	0.20	0.27	0.34	0.27	0.22	0.27	0.44	0.28	0.81	0.27	0.49	0.54	0.51	1.16	0.73	0.80	0.68	0.71	0.78	0.82	0.67	0.55	0.48
Malang	7						0.00	0.22	0.42	0.42	0.48	0.25	0.27	0.30	0.80	0.36	0.22	0.32	0.32	0.30	0.31	0.27	0.38	0.38	0.74	0.32	0.58	0.81	0.60	1.18	0.62	0.77	0.84	0.66	0.72	0.69	0.83	0.54	0.48	
Lumajang	8						0.00	0.30	0.38	0.36	0.31	0.19	0.35	0.91	0.42	0.39	0.34	0.38	0.36	0.35	0.90	0.30	0.47	0.89	0.39	0.54	0.61	0.56	1.18	0.71	0.80	0.87	0.87	0.73	0.73	0.60	0.85	0.51		
Jember	9						0.00	0.15	0.15	0.42	0.22	0.58	1.11	0.63	0.31	0.38	0.39	0.35	0.29	0.26	0.49	0.25	0.96	0.31	0.26	0.35	0.25	1.39	0.84	1.03	0.90	0.92	0.85	0.97	1.05	0.89	0.58			
Banyuwangi	10						0.00	0.23	0.42	0.36	0.65	1.12	0.65	0.30	0.42	0.42	0.24	0.32	0.26	0.62	0.27	0.98	0.33	0.38	0.44	0.33	1.38	0.85	1.04	0.85	0.96	0.99	1.04	1.08	0.72	0.61				
Bondowoso	11							0.00	0.50	0.32	0.56	1.18	0.70	0.34	0.41	0.43	0.33	0.28	0.29	0.82	0.20	1.03	0.33	0.27	0.31	0.31	1.40	0.81	1.00	0.92	0.89	0.99	1.09	0.71	0.81					
Stubondo	12								0.00	0.35	0.46	1.00	0.50	0.21	0.10	0.41	0.37	0.32	0.38	0.48	0.40	0.85	0.35	0.84	0.71	0.62	1.30	0.70	0.88	0.54	0.58	0.85	0.82	0.72	0.37	0.54				
Probolinggo	13								0.00	0.40	0.96	0.50	0.24	0.32	0.32	0.28	0.28	0.24	0.30	0.38	0.76	0.80	0.42	0.51	0.42	1.28	0.78	0.94	0.82	0.76	0.81	0.80	0.90	0.65	0.55					
Pasuruan	14								0.00	0.67	0.16	0.42	0.48	0.56	0.60	0.52	0.51	0.42	0.55	0.50	0.55	0.72	0.78	0.74	0.93	0.78	0.58	0.83	0.76	0.85	0.85	0.61	0.61	0.58						
Sidoarjo	15									0.00	0.54	1.01	1.11	1.19	1.17	1.17	1.11	0.98	1.22	0.35	1.12	1.31	1.39	1.30	0.40	1.00	0.83	0.80	0.87	0.93	0.75	0.63	1.14	0.92						
Mojokerto	16									0.00	0.51	0.58	0.87	0.62	0.84	0.61	0.51	0.70	0.37	0.84	0.63	0.90	0.82	0.80	0.83	0.51	0.84	0.77	0.87	0.71	0.56	0.88	0.64							
Jombang	17										0.00	0.20	0.28	0.22	0.17	0.21	0.48	0.22	0.88	0.15	0.46	0.54	0.51	1.32	0.62	0.80	0.70	0.85	0.73	0.84	0.84	0.48	0.51							
Nganjuk	18										0.04	0.37	0.32	0.27	0.34	0.57	0.34	0.94	0.34	0.59	0.68	0.80	1.36	0.72	0.74	0.64	0.66	0.71	0.86	0.84	0.40	0.59								
Madura	19										0.00	0.12	0.19	0.20	0.54	0.31	0.94	0.18	0.46	0.47	0.52	1.46	0.64	1.02	0.93	0.82	0.92	0.83	0.98	0.64	0.61									
Mageban	20											0.00	0.18	0.19	0.54	0.27	0.91	0.23	0.50	0.50	0.58	0.58	0.88	0.87	0.79	0.69	0.80	0.87	0.57	0.82										
Ngawi	21												0.00	0.14	0.58	0.18	0.98	0.10	0.44	0.43	0.48	1.40	0.66	0.89	0.80	0.74	0.82	0.88	0.92	0.59	0.61									
Bojonegoro	22													0.00	0.53	0.27	0.82	0.17	0.38	0.40	0.42	1.40	0.88	0.98	0.87	0.87	0.87	0.84	1.03	0.85	0.80									
Tuban	23														0.00	0.64	0.76	0.80	0.54	0.77	0.54	1.24	0.85	0.88	0.83	0.77	0.77	0.83	0.87	0.76	0.73									
Lamongan	24															0.00	1.02	0.20	0.32	0.40	0.39	1.42	0.80	0.98	0.88	0.85	0.94	1.02	1.03	0.80										
Gresik	25																0.00	0.99	1.14	1.23	1.17	0.58	0.85	0.83	0.75	0.82	0.87	0.76	0.80	0.98	0.81	0.81								
Bangkalan	26																	0.00	0.43	0.41	0.46	1.44	0.84	0.93	0.81	0.75	0.82	0.86	0.84	0.61	0.70									
Sampang	27																		0.00	0.28	0.10	1.36	1.08	1.27	1.17	1.14	1.12	1.18	1.32	0.89	0.92									
Patukmasan	28																			0.00	0.30	1.66	0.97	1.27	1.16	1.12	1.18	1.10	1.31	0.95										
Sumenep	29																				0.00	1.58	1.11	1.28	1.15	1.18	1.13	1.24	1.33	0.87	1.08									
K.Kediri	30																					0.00	1.28	0.78	1.06	1.19	1.20	1.04	0.84	1.33	0.97									
K.Bitar	31																						0.00	0.74	0.44	0.42	0.44	0.42	0.70	0.73	0.49									
K.Malang	32																							0.00	0.38	0.36	0.42	0.54	0.49	0.70	0.38									
K.Probolinggo	33																								0.00	0.24	0.26	0.82	0.38	0.58	0.39									
K.Pasuruan	34																									0.00	0.13	0.44	0.36	0.57	0.30									
K.Mojokerto	35																										0.00	0.51	0.41	0.63	0.38									
K.Medium Skripsi	36																											0.00	0.46	0.96	0.47									
K.Sumbawa	37																												0.00	0.82	0.41									
K.Batu	38																													0.00	0.00									
Jawa Timur		0.84	0.45	0.59	0.35	0.72	0.46	0.39	0.39	0.64	0.96	0.72	0.44	0.51	0.28	0.82	0.20	0.44	0.57	0.62	0.80	0.58	0.59	0.52	0.66	0.43	0.55	0.69	0.80	0.53	0.68	0.60								

Studi Kehijakan Kawasan Andalan Di Provinsi Jawa Timur

Nurvi Rahma Dwit Santika

**LAMPIRAN 14****DATA LOGIT DAN LOGISTIK**

No	Kabupaten /Kota	GR	PK	SI	K
1	Kabupaten Pacitan	2.64	2,135,214.23	0.33	0.00
2	Kabupaten Ponorogo	3.98	2,842,143.58	0.24	0.00
3	Kabupaten Trenggalek	3.68	2,500,166.24	0.23	0.00
4	Kabupaten Tulungagung	5.42	5,852,613.52	0.28	1.00
5	Kabupaten Blitar	4.06	3,830,738.55	0.29	0.00
6	Kabupaten Kediri	3.74	3,399,643.65	0.24	1.00
7	Kabupaten Malang	4.89	4,514,809.76	0.24	1.00
8	Kabupaten Lumajang	4.48	4,251,224.16	0.26	0.00
9	Kabupaten Jember	4.46	3,557,337.67	0.28	1.00
10	Kabupaten Banyuwangi	4.70	5,056,064.94	0.31	1.00
11	Kabupaten Bondowoso	3.87	2,368,734.54	0.31	1.00
12	Kabupaten Situbondo	4.31	4,236,958.74	0.27	1.00
13	Kabupaten Probolinggo	4.58	4,817,033.84	0.28	1.00
14	Kabupaten Pasuruan	5.07	3,394,729.08	0.29	1.00
15	Kabupaten Sidoarjo	5.68	12,320,879.34	0.46	1.00
16	Kabupaten Mojokerto	5.21	4,641,721.23	0.32	1.00
17	Kabupaten Jombang	4.58	3,822,412.69	0.26	0.00
18	Kabupaten Nganjuk	4.66	3,455,976.36	0.30	0.00
19	Kabupaten Madiun	3.35	3,135,711.39	0.31	0.00
20	Kabupaten Magetan	3.67	3,889,492.81	0.31	0.00
21	Kabupaten Ngawi	2.99	2,710,387.96	0.30	0.00
22	Kabupaten Bojonegoro	4.11	3,556,069.90	0.33	1.00
23	Kabupaten Tuban	4.44	4,434,569.88	0.37	1.00
24	Kabupaten Lamongan	4.32	2,998,000.67	0.36	1.00
25	Kabupaten Gresik	5.59	10,389,735.19	0.41	1.00
26	Kabupaten Bangkalan	4.08	2,880,944.11	0.35	1.00
27	Kabupaten Sampang	3.41	2,449,208.88	0.47	0.00
28	Kabupaten Pamekasan	3.34	2,095,930.04	0.50	0.00
29	Kabupaten Sumenep	3.51	4,206,923.13	0.55	0.00
30	Kota Kediri	2.50	73,685,660.29	0.49	1.00
31	Kota Blitar	5.78	4,476,944.24	0.24	0.00
32	Kota Malang	4.61	12,558,428.76	0.19	1.00
33	Kota Probolinggo	4.81	6,940,130.37	0.17	1.00
34	Kota Pasuruan	4.93	4,450,285.13	0.15	1.00
35	Kota Mojokerto	6.14	8,006,621.22	0.19	1.00
36	Kota Madiun	4.77	4,796,263.62	0.24	0.00
37	Kota Surabaya	5.96	21,739,453.38	0.20	1.00
38	Kota Batu	6.01	5,290,713.62	0.00	1.00
	Jawa Timur	4.81	6,365,858.36	0.28	

Ket :

K = 1,00 untuk kawasan andalan  
 0,00 untuk kawasan bukan andalan

**LAMPIRAN 15**

No	Kabupaten /Kota	GR	PK	SI	K	Predicted Groups
1	Pacitan	0,33	2072926,17	0,64	0	0
2	Ponorogo	0,47	2615911,79	0,49	0	0
3	Trenggalek	0,46	2338111,23	0,61	0	0
4	Tulungagung	0,67	5297010,07	0,56	1	1
5	Blitar	0,52	3592408,25	0,58	0	1
6	Kediri	0,48	3281139,15	0,48	1	0
7	Malang	0,69	4059353,44	0,49	1	1
8	Lumajang	0,73	4101546,05	0,51	0	1
9	Jember	0,53	3386924,33	0,56	1	1
10	Banyuwangi	0,40	4713145,89	0,61	1	1
11	Bondowoso	0,60	2270022,67	0,61	1	0
12	Situbondo	0,70	4038456,19	0,59	1	0
13	Probolinggo	0,55	4574508,06	0,55	1	1
14	Pasuruan	0,72	3275074,98	0,58	1	0
15	Sidoarjo	1,13	13026517,52	0,92	1	1
16	Mojokerto	0,64	4455850,07	0,64	1	1
17	Jombang	0,60	3588123,21	0,52	0	1
18	Nganjuk	0,72	3259382,27	0,59	0	0
19	Madiun	0,27	2985442,13	0,61	0	0
20	Magetan	0,48	3570226,90	0,62	0	1
21	Ngawi	0,44	2583708,20	0,61	0	0
22	Bojonegoro	0,53	3377831,29	0,66	1	0
23	Tuban	0,80	4245125,76	0,75	1	1
24	Lamongan	0,60	2802861,13	0,73	1	0
25	Gresik	1,04	9920412,33	0,80	1	1
26	Bangkalan	0,42	2872374,53	0,70	1	0
27	Sampang	0,18	2497192,77	0,93	0	0
28	Pamekasan	0,41	2080586,44	1,01	0	0
29	Sumenep	1,01	4028260,69	1,08	0	1
30	Kota Kediri	0,66	71501194,52	0,95	1	1
31	Kota Blitar	0,81	4007767,47	0,48	0	1
32	Kota Malang	1,17	12084232,34	0,35	1	1
33	Kota Probolinggo	0,66	6698217,14	0,32	1	1
34	Kota Pasuruan	0,85	4209807,88	0,27	1	1
35	Kota Mojokerto	0,98	7239245,01	0,34	1	1
36	Kota Madiun	1,23	4291412,20	0,35	0	1
37	Kota Surabaya	1,25	20364925,47	0,20	1	1
38	Kota Batu	1,23	4728845,65	0,00	1	1
	Jawa Timur	0,83	6023480,36	0,60		

Ket :

K = 1,00 untuk kawasan andalan dan 0,00 untuk kawasan bukan andalan

## Logistic Regression

**Case Processing Summary**

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	38	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	38	100,0
Unselected Cases		0	,0
	Total	38	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

**Dependent Variable Encoding**

Original Value	Internal Value
Kawasan Bukan Andalan	0
Kawasan Andalan	1

## Block 0: Beginning Block

**Iteration History<sup>a,b,c</sup>**

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients	
		Constant	
Step 0	50,983	,421	
1	50,982	,427	
2	50,982	,427	
3	50,982	,427	

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 50,982
- c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

**Classification Table<sup>a,b</sup>**

Observed	Predicted			Percentage Correct	
		Kawasan			
		Kawasan Bukan Andalan	Kawasan Andalan		
Step 0 Kawasan	Kawasan Bukan Andalan	0	15	,0	
	Kawasan Andalan	0	23	100,0	
Overall Percentage				60,5	

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	,427	,332	1,659	1	,198	1,533

**Variables not in the Equation<sup>a</sup>**

	Variables	Score	df	Sig.
Step 0	GR	3,680	1	,055
	PK	2,275	1	,131
	SI	1,610	1	,204

a. Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies.

## Block 1: Method = Backward Stepwise (Wald)

Iteration History<sup>a,b,c,d,e</sup>

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients			
		Constant	GR	PK	SI
Step 1	44,504	,102	1,409	,000	-1,558
	43,233	,225	1,548	,000	-2,137
	40,471	,270	,278	,000	-2,248
	38,145	-,106	-1,068	,000	-2,410
	37,031	-1,405	-1,502	,000	-1,923
	36,804	-2,230	-1,858	,000	-1,665
	36,799	-2,345	-1,939	,000	-1,650
	36,799	-2,348	-1,941	,000	-1,650
	36,799	-2,348	-1,941	,000	-1,650
Step 2	45,567	-1,126	1,945	,000	
	44,454	-1,330	2,049	,000	
	41,664	-1,383	,832	,000	
	38,835	-2,095	-,376	,000	
	37,486	-3,199	-1,085	,000	
	37,296	-3,765	-1,507	,000	
	37,293	-3,848	-1,577	,000	
	37,293	-3,849	-1,579	,000	
	37,293	-3,849	-1,579	,000	
Step 3	48,146	,141		,000	
	45,272	-,234		,000	
	41,407	-1,126		,000	
	38,855	-2,259		,000	
	37,909	-3,378		,000	
	37,844	-3,758		,000	
	37,844	-3,783		,000	
	37,844	-3,783		,000	

- a. Method: Backward Stepwise (Wald)
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 50,982
- d. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than ,001.
- e. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than ,001.

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	14,184	3	,003
	Block	14,184	3	,003
	Model	14,184	3	,003
Step 2 <sup>a</sup>	Step	-,494	1	,482
	Block	13,690	2	,001
	Model	13,690	2	,001
Step 3 <sup>a</sup>	Step	-,551	1	,458
	Block	13,138	1	,000
	Model	13,138	1	,000

- a. A negative Chi-squares value indicates that the Chi-squares value has decreased from the previous step.

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	36,799 <sup>a</sup>	,312	,422
2	37,293 <sup>a</sup>	,303	,410
3	37,844 <sup>b</sup>	,292	,396

- a. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter estimates changed by less than ,001.  
 b. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than ,001.

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	8,993	8	,343
2	8,921	8	,349
3	7,970	8	,436

**Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test**

		Kawasan = Kawasan Bukan Andalan		Kawasan = Kawasan Andalan		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	3	3,271	1	,729	4
	2	3	2,853	1	1,147	4
	3	2	2,505	2	1,495	4
	4	1	1,914	3	2,086	4
	5	4	1,655	0	2,345	4
	6	2	1,437	2	2,563	4
	7	0	,985	4	3,015	4
	8	0	,370	4	3,630	4
	9	0	,010	4	3,990	4
	10	0	,000	2	2,000	2
Step 2	1	3	3,269	1	,731	4
	2	3	2,803	1	1,197	4
	3	2	2,361	2	1,639	4
	4	1	1,946	3	2,054	4
	5	4	1,721	0	2,279	4
	6	2	1,385	2	2,615	4
	7	0	1,147	4	2,853	4
	8	0	,357	4	3,643	4
	9	0	,009	4	3,991	4
	10	0	,000	2	2,000	2
Step 3	1	3	3,193	1	,807	4
	2	3	2,844	1	1,156	4
	3	2	2,376	2	1,624	4
	4	1	2,048	3	1,952	4
	5	4	1,619	0	2,381	4
	6	1	1,312	3	2,688	4
	7	1	1,052	3	2,948	4
	8	0	,540	4	3,460	4
	9	0	,016	4	3,984	4
	10	0	,000	2	2,000	2

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed			Predicted		Percentage Correct	
			Kawasan			
			Kawasan Bukan Andalan	Kawasan Andalan		
Step 1	Kawasan	Kawasan Bukan Andalan	8	7	53,3	
		Kawasan Andalan	5	18	78,3	
		Overall Percentage			68,4	
Step 2	Kawasan	Kawasan Bukan Andalan	8	7	53,3	
		Kawasan Andalan	5	18	78,3	
		Overall Percentage			68,4	
Step 3	Kawasan	Kawasan Bukan Andalan	8	7	53,3	
		Kawasan Andalan	7	16	69,6	
		Overall Percentage			63,2	

a. The cut value is ,500

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	GR	-1,941	2,266	,734	1	,392
	PK	,000	,000	3,686	1	,055
	SI	-1,650	2,430	,461	1	,497
	Constant	-2,348	2,832	,687	1	,407
Step 2	GR	-1,579	2,146	,541	1	,462
	PK	,000	,000	4,220	1	,040
	Constant	-3,849	1,844	4,359	1	,037
Step 3	PK	,000	,000	5,193	1	,023
	Constant	-3,783	1,744	4,705	1	,030

a. Variable(s) entered on step 1: GR, PK, SI.

**Correlation Matrix**

	Constant	GR	PK	SI
Step 1	Constant	1,000	-,125	-,635
	GR	-,125	1,000	-,582
	PK	-,635	-,582	1,000
	SI	-,756	,236	,158
Step 2	Constant	1,000	,127	-,809
	GR	,127	1,000	-,663
	PK	-,809	-,663	1,000
Step 3	Constant	1,000		-,974
	PK	-,974		1,000

**Variables not in the Equation**

		Score	df	Sig.
Step 2 <sup>a</sup>	Variables SI	,482	1	,487
	Overall Statistics	,482	1	,487
Step 3 <sup>b</sup>	Variables GR	,554	1	,457
	SI	,281	1	,596
	Overall Statistics	1,067	2	,587

a. Variable(s) removed on step 2: SI.

b. Variable(s) removed on step 3: GR.

**Crosstabs\_Predicted\*Observed Groups****Kawasan \* Predicted Value Crosstabulation**

		Predicted Value		Total
		Kawasan Bukan Andalan	Kawasan Andalan	
Kawasan	Kawasan Bukan Andalan	8	7	15
	Kawasan Andalan	7	16	23
Total		15	23	38